



PEMERINTAH
KAB. BUTON TENGAH

RKPD

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2024**





BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentuksn Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

4. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran dan/atau barang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2005-2025 selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (Empat) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah yang Selanjutnya disingkat RKPD adalah perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 memuat tentang Pedoman Pemetaan Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal

Sistematika RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari 1 (satu) Buku meliputi:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VII : PENUTUP

BAB IV
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 memiliki tujuan yaitu sebagai kerangka acuan bagi instansi/ Badan/ Dinas/ Kantor/ Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Kabupaten Buton Tengah di dalam menyusun Rencana Kerja pada Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

RKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membahas Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 5 juli 2023

PARAF KOORDINASI		
SEKDA		✓
AS. II		✓
Ka. Mappada		✓
Thy. H. Amriah	F	

Pi. BUPATI BUTON TENGAH,

HAMMAD YUSUF

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH

KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023
NOMOR :



BUPATI BUTON TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat disusun dan disajikan. Penyusunan RKPD Kabupaten Buton Tengah merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana didalamnya termuat tentang penyusunan RKPD setiap Kabupaten dan Kota.

Dokumen RKPD Kabupaten Buton Tengah adalah gambaran refleksi kebutuhan masyarakat Buton Tengah. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buton Tengah ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan sehingga masih perlu masukan untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dan bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan Kabupaten Buton Tengah sangat di harapkan.

Akhirnya, marilah kita senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT agar kita senantiasa diberi kemampuan dan kekuatan lahir batin dalam mengembangkan amanah rakyat untuk melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara khususnya dalam membangun Kabupaten Buton Tengah yang lebih baik. Terima kasih.

Billahi Taufiq wal Hidayah
Wassalamu alaikum wr. Wb.

 **BUPATI BUTON TENGAH**

IMAM YUSUF

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Rancangan Peraturan Bupati Buton Tengah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I – 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I – 6
1.4 Maksud dan Tujuan	I – 7
1.5 Sistematika RKPD	I – 9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Buton Tengah	II – 1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II – 15
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II – 17
2.1.4. Demografi	II – 21
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 28
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II – 28
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II – 36
2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga	II – 54
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II – 54
2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II – 54
2.3.2. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar	II – 73

2.3.3.	Fokus Urusan Pilihan	II – 90
2.3.4.	Fokus Urusan Penunjang	II – 96
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II – 100
2.4.1.	Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur	II – 100
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN		III – 1
3.1	Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi	III – 1
3.2	Kinerja Keuangan dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 16
3.3	Kinerja Pelaksanaan APBD	III – 17
3.4	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 22
3.5	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III – 34
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		IV – 1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah	IV – 1
4.2	Prioritas Pembangunan Dan Program Prioritas Daerah	IV – 3
4.2.1.	Isu Startegis Pembangunan Kabupaten Buton Tengah	IV – 4
4.2.2.	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024	IV – 9
4.2.3.	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara	IV – 11
4.2.4.	Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV – 13
4.2.5.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Tengah	IV – 13
4.2.6.	Program Prioritas	IV – 16
4.2.7.	Inovasi Pembangunan	IV – 34
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		V – 1
5.1.	Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024	V – 1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		
6.1.	Indikator Kinerja Utama	VI - 1

6.2. Indikator Kinerja Kunci	VI - 6
BAB VII PENUTUP	VII - 1
Lampiran I – RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Batas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, Tahun 2022	II - 2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Kabupaten Buton Tengah Menurut Kecamatan Tahun 2022	II - 3
Tabel 2.3	Letak Astronomis Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, Tahun 2022	II - 4
Tabel 2.4	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Betoambari, Tahun 2022	II - 11
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan/Tutupan lahan Kabupaten Buton Tengah	II - 12
Tabel 2.6	Sebaran dan Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Buton Tengah	II - 14
Tabel 2.7	Potensi Luas Bahaya Bencana di Kabupaten Buton Tengah	II - 18
Tabel 2.8	Potensi Penduduk Terpapar Kerentanan di Kabupaten Buton Tengah	II - 20
Tabel 2.9	Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Buton Tengah	II - 20
Tabel 2.10	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022	II - 21
Tabel 2.11	Kepadatan Penduduk Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022	II - 22
Tabel 2.12	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan, 2017-2021	II - 23
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Buton Tengah	II - 24
Tabel 2.14	Perkembangan Penduduk dan Proyeksi Penduduk Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022	II - 26
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buton Tengah (juta rupiah), 2018-2022	II - 27
Tabel 2.16	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buton Tengah (persen), 2018-20	II - 28
Tabel 2.17	Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2022	II - 31
Tabel 2.18	<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017-2022</u>	II - 33
Tabel 2.19	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan, Maret 2017-2020	II - 35

Tabel 2. 20	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022	II - 36
Tabel 2.21	Harapan Lama sekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022	II - 39
Tabel 2.22	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki, Tahun 2020	II - 41
Tabel 2.23	Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Formal menurut Jenis Kelamin, 2019-2020	II - 42
Tabel 2.24	Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin, 2018-2019	II - 46
Tabel 2.25	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, Tahun 2022	II - 48
Tabel 2.26	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Tengah, Tahun 2020	II - 51
Tabel 2.27	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Buton Tengah, Tahun 2020 dan 2022	II - 53
Tabel 2.28	Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022/2023	II - 55
Tabel 2.29	Perkembangan Rasio Murid-Guru, 2017-2021	II - 56
Tabel 2.30	Persentase Baduta (Usia 0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI menurut Jenis Kelamin, 2018-2021	II - 56
Tabel 2.31	Persentase Balita (Usia 0-59 Bulan) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Karakteristik, 2021	II - 58
Tabel 2.32	Persentase Balita (Usia 0-59 Bulan) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin, 2021	II - 59
Tabel 2.33	Fasilitas Kesehatan Per Kecamatan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021	II - 60
Tabel 2.34	Jumlah Posyandu dan Polindes berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Buton Tengah	II - 60
Tabel 2.35	Jumlah Tenaga Kesehatan Per Kecamatan Di Kabupaten Buton Tengah 2022	II - 61
Tabel 2.36	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya (km) di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022	II - 63
Tabel 2.37	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Buton Tengah 2022	II - 64

Tabel 2.38	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga tahun 2021	II - 65
Tabel 2.39	Karakteristik Status Kepemilikan Bangunan Kabupaten Buton Tengah 2022	II - 66
Tabel 2,40	Jumlah Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Buton Tengah	II - 66
Tabel 2.41	Proyeksi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 - 2022	II - 67
Tabel 2.42	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019	II - 68
Tabel 2.43	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal Yang Paling Sering Terjadi	II - 69
Tabel 2.44	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Perkelahian Massal Yang Terjadi Selama Setahun Terakhir	II - 69
Tabel 2.45	Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buton Tengah Tahun Tahun 2016	II - 70
Tabel 2.46	Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Buton Tengah Tahun Tahun 2016	II - 71
Tabel 2.47	Jumlah Program Keluarga Harapan Kabupaten Buton Tengah Pada Tahun 2017	II - 71
Tabel 2.48	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas dan Jenis Kelamin, Tahun 2020	II - 73
Tabel 2.49	IDG, IPG, Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Keterlibatan Perempuan diparlemen Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018-2022	II - 75
Tabel 2.50	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022	II - 77
Tabel 2.51	Jumlah Penduduk yang telah memiliki E-KTP Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021	II - 78
Tabel 2.52	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2021	II - 79
Tabel 2.53	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun Yang Memiliki akta Kelahiran menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi, 2021	II - 80
Tabel 2.54	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022	II - 80
Tabel 2.55	Jumlah Pasangan Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020	II - 81
Tabel 2.56	Kunjungan Kapal, Arus Barang, dan Penumpang menurut Kabupaten/Kota 2018-2020	II - 82
Tabel 2.57	Jumlah Angkutan Umum yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Menurut	II - 82

Tabel 2.58	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun Ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi, Buton Tengah Tahun 2020	II - 84
Tabel 2.59	Banyaknya Desa1/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler, 2021	II - 84
Tabel 2.60	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, Tahun 2018-2021	II - 85
Tabel 2.61	Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016 - 2019	II - 85
Tabel 2.62	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Buton Tengah, 2022	II - 90
Tabel 2.63	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Buton Tengah, 2022	II - 91
Tabel 2.64	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Buton Tengah, 2022	II - 91
Tabel 2.65	Jumlah Rumah Makan/Restoran menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, 2019-2022	II - 92
Tabel 2.66	Jumlah Akomodasi Hotel menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, 2021-2022	II - 92
Tabel 2.67	Luas areal tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ha) di Kabupaten Buton Tengah, 2021 dan 2022	II - 93
Tabel 2.68	Jumlah Pasar Dirinci Menurut Jenisnya dan Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, 2020	II - 94
Tabel 2.69	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tahun 2016 s.d 2018 Kabupaten Buton Tengah	II - 96
Tabel 2.70	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Dan Sumeber Utama Pencemaran Lingkungan Hidup Tahun 2021	II - 100
Tabel 3.1	Tabel Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Buton Tengah	III - 5
Tabel 3.2	Distribus Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buton Tengah	III - 7
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah	III - 9
Tabel 3.4	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 - 2022 dan APBD Tahun 2023	III - 18
Tabel 3.5	Rincian Laporan Realisasi Anggaran 2018-2022, dan APBD Tahun 2023	III - 19

Tabel 3.6	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018-2022, dan APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023	III - 23
Tabel 3.7	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024	III - 27
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2022, dan APBD Tahun 2023	III - 28
Tabel 3.9	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024	III - 32
Tabel 3.10	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018-2022, dan APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023.	III - 33
Tabel 3.11	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024	III - 34
Tabel 3.12	Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024	III - 35
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024	IV - 2
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV - 11
Tabel 4.3	Target Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	IV - 12
Tabel 4.4	Perbandingan Target Pembangunan Kabupaten Buton Tengah dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	IV - 15
Tabel 4.5	Program Prioritas Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024	IV - 16
Tabel 4.6	Keselarasan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional	IV - 29
Tabel 4.7	Keterkaitan Sasaran Pembangunan Dengan Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional	IV - 30
Tabel 5.1	Proyeksi Prioritas Belanja Berdasarkan OPD Tahun Anggaran 2024	V - 3
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI - 3
Tabel 6.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VI - 7

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1	Hubungan Antar Dokumen, Tiap Jenjang dan Tingkat Pemerintahan	I - 5
Grafik 2.1	Persentase Luas Wilayah Kabupaten Buton Tengah Menurut Kecamatan Tahun 2022	II - 3
Grafik 2.2.	Distribusi Penduduk Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022	II - 22
Grafik 2.3.	Piramida Penduduk Kabupaten Buton Tengah	II - 25
Grafik 2.4.	Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Buton Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020-2022	II - 45
Grafik 2.5.	Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Buton Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2019-2022	II - 49
Grafik 2.6.	Perkembangan TPT Kabupaten Buton Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2019-2022	II - 50
Grafik 2.7.	Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak Di Kab. Buton Tengah 2023	II - 62
Grafik 2.8.	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Buton Tengah 2022	II - 63
Grafik 2.9.	Jumlah Tindak Pidana Di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 – 2021	II - 69
Grafik 2.10.	Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah (Hektar), 2021	II - 76
Grafik 2.11.	Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah (Hektar), 2021	II - 101
Grafik 3.1	Pertumbuhan PDRB beberapa Lapangan Usaha	III - 4
Grafik 3.2	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022 dan APBD Tahun 2023	III - 22



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar fungsi pemerintah pusat dan daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip meliputi; menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional; dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

penyelenggaraan pemerintah daerah, secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan perangkat daerah pelaksana. Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati antara kepala daerah bersama DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Sebagai dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, parsitipatif, terukur, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 berorientasi pada proses dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan;
3. Pendekatan Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up) dengan penyelarasan usulan musyawarah rencana pembangunan dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional;
4. Pendekatan Politik dengan penyelarasan hasil reses DPRD melalui usulan Pokok Pikiran DPRD;

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton tengah Tahun 2021 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

22. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 7)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 – 2040.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 tidak dapat terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2019-2024, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 - 2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023, RPJPD Kabupaten Buton Tengah tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 - 2026. RKPD Kabupaten Buton Tengah merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun Kedua yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah.

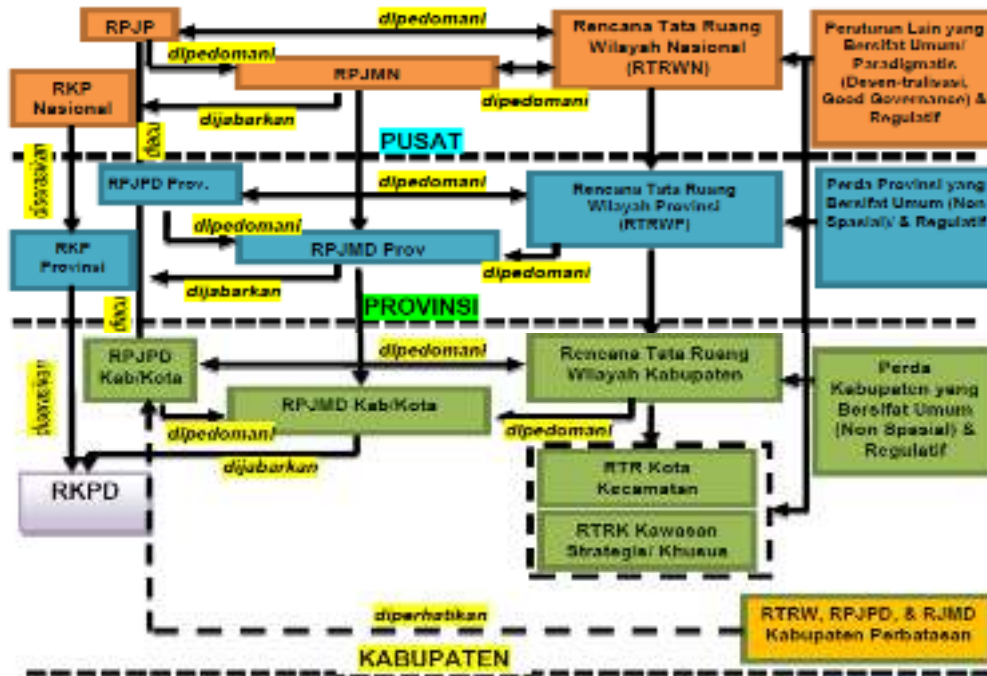
Adapun hubungan antar dokumen, dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Gambar 1.1.

Hubungan Antar Dokumen, Tiap Jenjang dan Tingkat Pemerintahan



Kabupaten Buton Tengah akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja SKPD dan menjadi

Pedoman dalam pelaksanaan musrenbang Kabupaten, Musrenbang Kecamatan maupun Forum SKPD Kabupaten dan diharapkan pada RKPD Tahun 2024 ini menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Buton Tengah dalam kurun waktu satu tahun sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

makro serta program – program SKPD, yang tercermin dalam bentuk: (1) kerangka regulasi, dan (2) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam penyusunan rancangan Renja SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan dalam forum musrenbang SKPD kabupaten/kota, forum musrenbang di kecamatan dan menjadi acuan dalam membahas Renja SKPD dalam forum SKPD kabupaten/kota.
3. Memuat program-program prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat;
4. Memuat rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumberdari APBD.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tengah tahun 2024 adalah :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 – 2026;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPD Tahun 2023-2026;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

1.5. Sistematika RKPD

RKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana serta Sistematika Dokumen RKPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat tentang Kondisi daerah, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun Berkenaan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan tahun berjalan, perumusan permasalahan pembangunan daerah dalam menentukan langkah – langkah kebijakan yang diperlukan dalam RKPD untuk Tahun 2024.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Pada bab III memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah, beserta kerangka pendanaan serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2026 pada tahun berkenaan dalam rangka Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Menjelaskan perencanaan program dan kegiatan, indikator, kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, OPD penanggung jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII Penutup

Menjelaskan hal-hal fundamental pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan atau pedoman dan penegasan Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menggunakan dokumen RKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Buton Tengah

2.1.1.1. Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Buton Tengah memiliki wilayah daratan seluas $\pm 837,08$ km². Kabupaten Buton Tengah beribukota di Labungkari, Kecamatan Lakudo. Kabupaten ini terdiri atas 7 kecamatan yang terbagi lagi atas 67 desa dan 10 kelurahan. Beberapa kecamatan tersebut yaitu:

1. Kecamatan Lakudo;
2. Kecamatan Mawasangka Timur;
3. Kecamatan Mawasangka Tengah;
4. Kecamatan Mawasangka;
5. Kecamatan Talaga Raya;
6. Kecamatan Gu;
7. Kecamatan Sangia Wambulu.

Batas wilayah Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Tanjung Kecamatan Tongkuno, Kelurahan Lawama, Desa Labasa, Desa Waleale Kecamatan Tongkuno Selatan, Desa Bone Lolibu, Desa Bone Tondo Kecamatan Bone, dan Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna;
- Sebelah timur : Selat Buton
- Sebelah selatan : Laut Flores; dan
- Sebelah barat : Teluk Bone.

Sedangkan batas wilayah tiap Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.1.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.1.

Batas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, Tahun 2022

Kecamatan	Utara	Selatan	Timur	Barat
Talaga Raya	Teluk Bone	Laut Flores	Selat Muna	Laut Flores
Mawasangka	Kab. Muna	Laut Flores	Mawasangka Tengah	Selat Muna
Mawasangka Tengah	Kec. Mawasangka	Kec. Mawasangka Timur	Kec. Lakudo	Kec. Mawasangka
Mawasangka Timur	Kec. Mawasangka Tengah	Laut Flores	Teluk Lasongko	Teluk Liana Banggai
Lakudo	Kec. Gu	Laut Flores	Kec. Gu	Teluk Lasongko
Gu	Kab. Muna	Kec. Lakudo	Selat Buton	Kec. Lakudo
Sangia Wambulu	Kec. Gu	Teluk Tolandona	Selat Buton	Kec. Gu

Sumber : RTRW Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2040

Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mawasangka dengan luas 229,02 km², Lakudo 204,3 km² serta Mawasangka Tengah dengan luas 121,99 km² atau masing-masing sebesar 27,36%, 24,40% serta 14,57% terhadap total luas wilayah Kabupaten Buton Tengah. Sedangkan wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Sangia Wambulu dengan luas wilayah 5,91 km² atau 0,71% dari total luas wilayah Kabupaten Buton Tengah. Adapun luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Buton Tengah disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Luas Wilayah Kabupaten Buton Tengah Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase	Jumlah Pulau
Talaga Raya	89,49	10,69	6
Mawasangka	229,02	27,36	-
Mawasangka Tengah	121,99	14,57	3
Mawasangka Timur	93,35	11,15	1
Lakudo	204,30	24,40	2
Gu	93,10	11,12	-



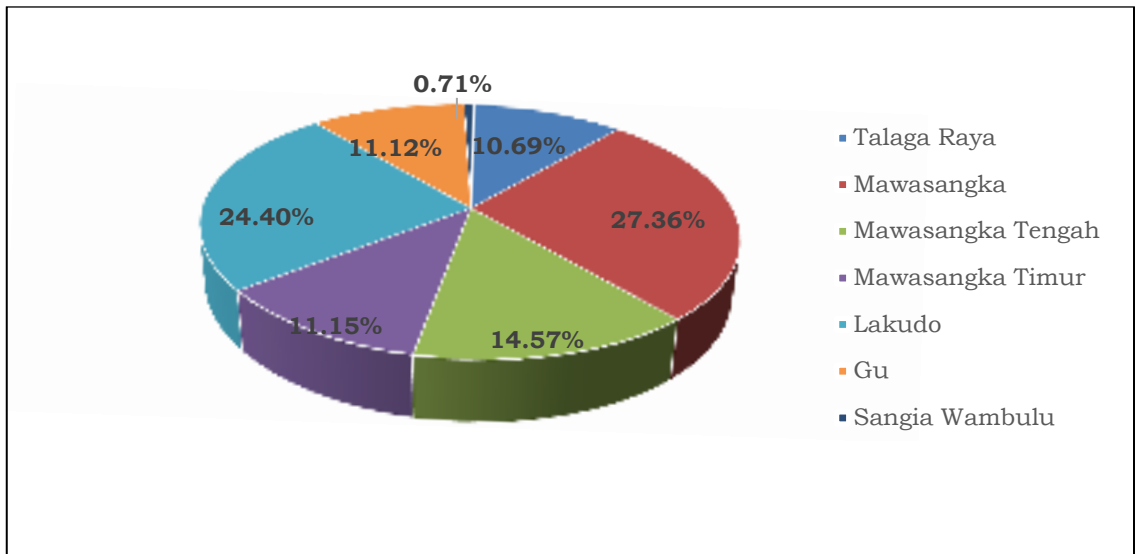
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Sangia Wambulu	5,91	0,71	-
Buton Tengah	837,16	100	12

Sumber : RTRW Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2040

Grafik 2.1.

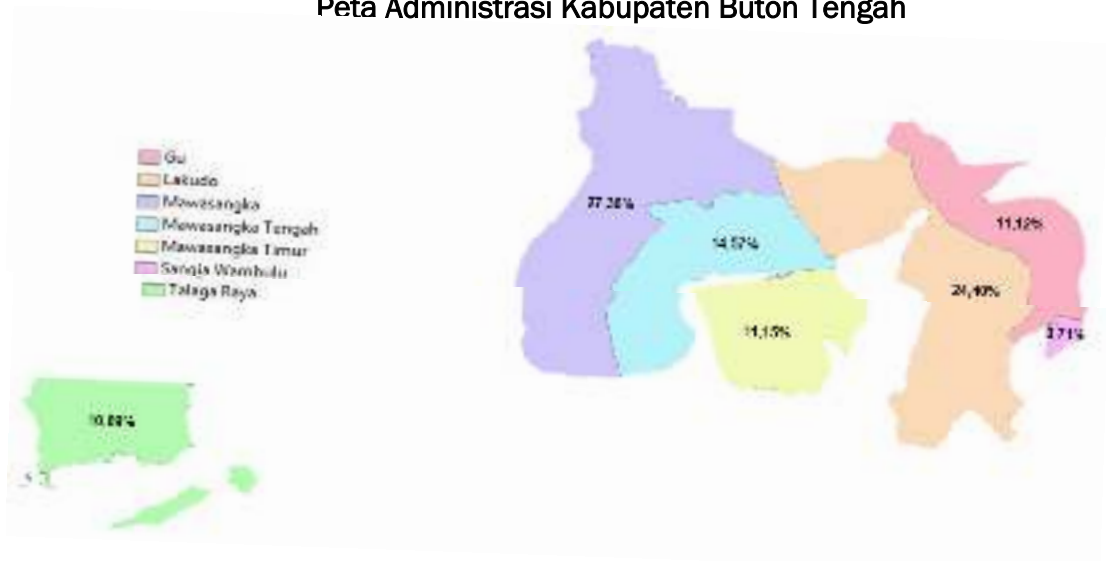
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Buton Tengah Menurut Kecamatan Tahun 2022



Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.1.

Peta Administrasi Kabupaten Buton Tengah



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tengah, 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Buton Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru pemekaran dari Kabupaten Buton yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi yang sebagian wilayahnya berada di Pulau Muna sebagian lainnya kepulauan Talaga dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 5,15° Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 122,33° Bujur Timur. Adapun letak astronomis tiap kecamatan di Kabupaten Buton Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Letak Astronomis Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, Tahun 2022

Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
Talaga Raya	5° 28.407' S	122° 4.950' E
Mawasangka	5° 17.047' S	122° 17.242' E
Mawasangka Tengah	5° 19.990' S	122° 22.195' E
Mawasangka Timur	5° 24.242' S	122° 26.927' E
Lakudo	5° 18.808' S	122° 31.827' E
Gu	5° 15.147' S	122° 34.543' E
Sangia Wambulu	5° 121.723' S	122° 37.097' E
Buton Tengah	5° 16.678' S	122° 33.212' E

Sumber :RTRW Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2040

2.1.1.3. Kondisi Topografi

Secara fisiografi Kabupaten Buton Tengah terdiri dari beberapa relief topografi yakni sebagai berikut:

- Relief perbukitan (Bukit Wanepanepa, Wadiabero, Bukit Bombonawulu di Lolibu-Lasongko/Wajo dan Wambuloli-Lagili).
- Relief dataran tinggi yang hampir diseluruh wilayah Kabupaten Buton Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

- c) Relief Teluk (Teluk Lasongko, Teluk Wambuloli, Teluk Kolowa/Tolandona dan Teluk Lombe serta Teluk Nambo)
- d) Selat Baruta sebagai bagian dari Selat Buton yang sangat sempit dengan arus badai bolak-balik yang sangat keras.

Sekeliling pantai mulai dari selat Buton dari Walengkabola – Watulea - Lombe di timur; Wamengkoli – Waara - Teluk Lasongko - Teluk Wambuloli - Mawasangka sampai tepi-tepi perbatasan dengan Kabupaten Muna Barat pantainya diisi oleh keberadaan terumbu karang (*coral reef*).

Pada bagian barat terdapat selat Muna -Selat Tiworo. Ditinjau dari aspek kelerengan, maka wilayah Kabupaten Buton Tengah dapat dikelompokkan ke dalam:

- a) Kelerengan 0-3 % sepanjang Pantai Barat Mawasangka - Tampunawou dan Lombe – Watulea
- b) kelerengan 3-8 % pada bagian tengah dan timur (Katukobari - Lasongko)
- c) kelerengan 8-15 % disekitar perbukitan Lolibu – Wambuloli – Wanepanepa - Bombonawulu
- d) kelerengan >15 % berada pada perbukitan Lolibu - Wambuloli – Wanepanepa - Bombonawulu.

Berdasarkan relief dan kelerengan diatas, maka topografi di Kabupaten Buton tengah dapat dibedakan ke – dalam:

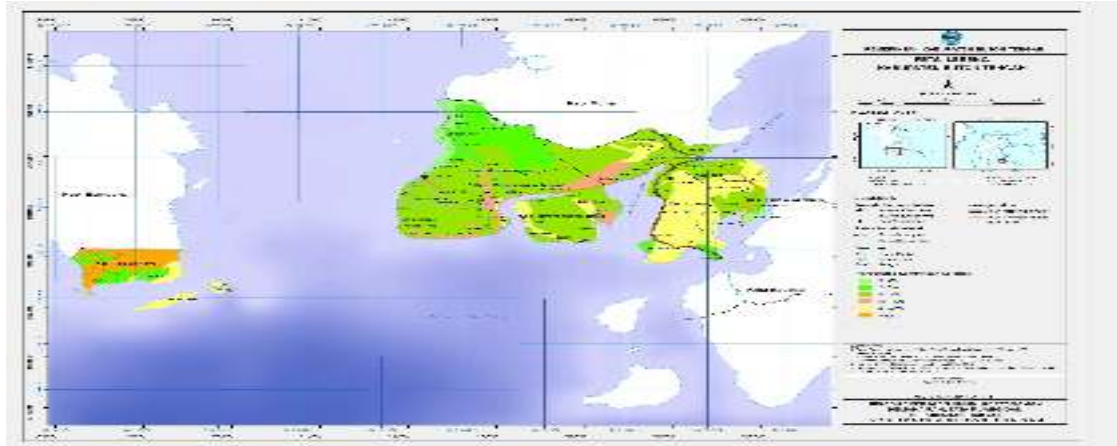
- a) Topografi perbukitan yang terdapat pada bagian tengah dari Kabupaten Buton Tengah
- b) Topografi bergelombang pada kaki perbukitan dan
- c) Topografi dataran pantai pada bagian barat Buton Tengah yang cukup dominan, bagian Selatan dan bagian Timurnya.

Kondisi fisiografi relief, kelerengan, dan topografi/rupa bumi tersebut di atas adalah sangat dipengaruhi oleh topografi karst yang berasal dari endapan batu gamping/batu kapur yang hampir menutupi seluruh wilayah Kabupaten Buton Tengah ini.



Gambar 2.2.

Peta Lereng Kabupaten Buton Tengah



Sumber: RTRW Kabupaten Buton Tengah 2020-2040

2.1.1.4. Kondisi Geohidrologi

Air tanah yang berada dibawah permukaan bumi menjadi potensi yang tersembunyi, karena hanya sebagian yang tampak muncul sebagai mata air maupun muara sungai bawah tanah di daerah ini. Proses pelarutan batuan bersifat karbonat (gampingan) menghasilkan akuifer air tanah yang saling berhubungan satu sama lain melalui retakan akibat proses dekonstruksi, dekomposisi maupun patahan dan retakan proses-proses tektonik seperti patahan/struktur geologi yang telah di uraikan di atas.

Pemunsulan sungai-sungai bawah tanah melalui perancangan topografi banyak terjadi jika diperhatikan kalau kita berjalan dari arah Waara menuju Kecamatan Mawasangka. Pada beberapa kemunculan mata air dan sungai-sungai bawah tanah menjadi tempat permandian dan dapat dijadikan sebagai daerah objek destinasi tujuan wisata (ODTW) yakni:

- 1) Permandian Wadiabero (Kecamatan Gu)
- 2) Permandian Kedeula Air Maamba (Kecamatan Gu)
- 3) Permandian Lahumbo (Kecamatan Gu)
- 4) Permandian Labungkari (Kecamatan Lakudo)
- 5) Permandian Fotu (Kecamatan Mawasangka)
- 6) Permandian Sondi (Kecamatan Mawasangka)



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

7) Permandian Maobu (Kecamatan Mawasangka Tengah), Demikian pula terdapat danau-danau sebagai uvala dan dolina dalam sistem topografi Karst yang juga menjadi DOTW adalah:

- a) Danau Lakaedu (Kecamatan Lakudo)
- b) Danau Anano Tei'da
- c) Danau Bungi Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Buton Tengah sebagian besar wilayahnya berupa perairan kelautan yaitu:
 - o Di sebelah Timur dikelilingi oleh perairan Selat Buton yang relative sempit antara Baruta (Kecamatan Sangia Mambulu) dan Batu Sori (Kecamatan Lea-Lea/Kota Baubau)
 - o Sebelah Selatan dikelilingi oleh Laut Flores yang sangat luas.
 - o Sebelah Barat dikelilingi oleh Selat Muna dan Teluk Bone (Provinsi Sulawesi Selatan).

Pada kondisi perairan esteria mulai dari Pantai Timur, Pantai Selatan dan Pantai Barat wilayah Buton Tengah daratan merupakan pantai berkarang yang ditumbuhi oleh terumbu karang atau *coral reef*. Demikian pula dengan Pulau Talaga Kecil yang berada di Kecamatan Talaga Raya adalah berasal dari Laguna dan Atols sebagai bagian dari terumbu karang tersebut. Keberadaan terumbu karang adalah menjadi tempat kehidupan biota laut (habitat) yang ditunjang oleh kehadiran mangrove atau bakau di Pantai Buton Tengah (Perairan Estuaria) sebagai “nichea” atau sumber pakan dan tempat inkubasi bagi ikan-ikan yang menetas di kawasan terumbu karang dan dibesarkan di kawasan bakau kemudian kembali lagi ke Laut lepas. Demikian sehingga interaksi terumbu karang dan bakau “mangrove” harus dapat terpelihara dari kerusakan untuk menjalin keberlangsungan biota perairan laut dangkal dan laut lepas.

Disisi lain bahwa keberadaan ikan di kawasan terumbu karang yang sebagian besar spesiesnya dapat dikategorikan sebagai ikan hias menjadi komoditas yang sangat ekonomis untuk dikembangkan serta menjadi objek destinasi tujuan wisata bahari yang sangat potensial di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kawasan-kawasan tersebut dapat dijadikan sebagai kawasan konservasi dan lindung lingkungan hidup daerah Kabupaten Buton Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan basimetrisnya maka Perairan Laut Kabupaten Buton Tengah memiliki paparan pantai laut dangkal (litoral-meritik) kedalaman 5-50 cm, tiba-tiba kedalaman melonjak mulai 100 sampai mencapai laut dalam, sangat dalam (batial-abisal-hadal). Sehingga kondisi perairan wilayah Kabupaten Buton Tengah dapat dikembangkan sebagai: a) Alur pelayaran mendukung, ALKI-2 dan ALKI-3 b) Kawasan pengembangan Wisata Bahari khususnya dapat dijadikan sebagai pusat peristirahatan kapal-kapal pesisir, khususnya di Teluk Lasongko dan Teluk Wambuloli. c) Kawasan pengembangan Pelabuhan Murhum (Kota Baubau) dengan pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Wamengkoli untuk melayani kebutuhan arus barang dan jasa serta penumpang di Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat. Posisi Perairan Kabupaten Buton Tengah sangat strategis bagi pengembangan pelayaran Indonesia (Timur-Barat dan Utara-Selatan) untuk lalu lintas transportasi moda laut, serta menjadi tempat pengembangan wisata bahari terkait dengan pelayaran kapal-kapal pesiar untuk menjadi tempat penambatan/pelabuhan “Yacht” atau kapal-kapal pesiar mengantisipasi wisata “sail” yang diadakan setiap tahunnya maupun program kemaritiman yang diangkat sejak tahun 2014 yang lalu.

2.1.1.5. Kondisi Geologi

Pada Kabupaten Buton Tengah tampak adanya gejala pengangkatan dari bukti adanya undak-undak terumbu karang seperti yang tampak pada unit satuan Litostratigrafi dari Formasi WAPULAKA, tetapi lapisan batuan sedimen pada umumnya horizontal tidak ada kemiringan lapisan batuan sedimen. Walaupun demikian sekalipun terjadi peningkatan pada Kuartar Awal atau diakhir Tersier yang tidak melibatkan perlipatan batuan, tetapi berdasarkan unsur geografi seperti yang di atas, terdapat pola kelurusan topografi dari Selat Baruta sebagai bagian dari Selat Buton yang paling sempit, Teluk Lasongko dan Teluk Wambuloli mencerminkan adanya kontrol struktur geologi.

Untuk lebih pastinya akan ditelaah dalam pelaksanaan survei lapangan sebagai masukan yang paling berharga di dalam penyusunan RTRW Kabupaten Buton Tengah. Berdasarkan dengan deduksi tersebut maka diketahui pola struktur geologi Kabupaten Buton Tengah seperti diuraikan berikut ini. a) Pola Utara –



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Selatan yang diperlihatkan oleh arah Teluk Lasongko dan Teluk Wambuloli dari arah Pantai Selatan Kabupaten Buton Tengah. Arah kelurusan ini sama dengan arah perlipatan dan Sesar Anjak di daratan Pulau Buton yaitu arah Sesar Anjak Lambusango dan Sesar Anjak Teluk Sampolawa. b) Timur laut – Barat daya dari pembelokan Teluk Lasongko yang membelok di Wongko menuju ke arah Lasongko adalah searah dengan Selat Baruta Patahan Bungi – Langkoromi di Pulau Buton maupun Patahan Suandala yang mengarah ke Teluk Lawele. c) Timur – Barat yang ditunjukkan oleh pembelokan Teluk Wambuloli di Katukobari yang mengarah ke Timur sama dengan struktur geologi Patahan Normal Pasarwajo serta Patahan Gunung Wani di Buton Utara. Berdasarkan kemiripan tersebut dapat disimpulkan bahwa Litostratigrafi yang berumur Tersier Akhir dan Kwartir Awal di Kabupaten Buton Tengah berada diatas bidang patahan (struktur geologi) yang berumur Miosen Tengah ke atas, sehingga pada saat terjadi pengangkatan maka bidang lemah yang diakibatkan oleh patahan sebelumnya menjadi tampak pada unsur geografis seperti yang diuraikan sebelumnya.

Untuk diketahui bahwa patahan /sesar dari unsur struktur geologi tersebut merupakan bidang lemah yang dapat menjadi medium rambat gelombang gempa kalau terjadi gempa bumi yang ada disekitarnya sehingga perlu dikaitkan dengan stabilitas wilayah untuk menetapkan kawasan rawan bencana dalam segala resikonya terhadap pengembangan wilayah. Oleh karena itu dalam penyusunan RTRW Kabupaten Buton Tengah perlu dipertimbangkan wilayah-wilayah yang rawan bencana didalam aspek mitigasi bencana alam khususnya bencana geologi ke depan.



Gambar 2.3.

Peta Geologi Kabupaten Buton Tengah



Sumber: RTRW Kabupaten Buton Tengah 2020-2040

2.1.1.6. Kondisi Klimatologi

Secara umum terdapat dua jenis musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, dimana musim hujan terjadi pada Bulan November sampai Maret. Adapun musim kemarau terjadi pada Bulan Mei sampai Oktober yang bertiup angin timur dari arah Australia. Sedangkan pada Bulan April terjadi angin pancaroba. Curah hujan tidak merata di seluruh wilayah. Curah hujan pada tahun 2022 adalah 2641 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 232 hari. Sedangkan suhu udara rata-rata berkisar antara 26,1°C - 27,8°C dan kelembaban rata-rata berkisar antara 80%-88%. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka iklim di Kabupaten Buton Tengah dapat dikategorikan sebagai iklim tipe D dan E. Kondisi iklim di Kabupaten Buton Tengah menurut Menurut Schmidt and Ferguson (1951), merupakan wilayah dengan tipe hujan cukup bervariasi yaitu tipe B, C dan D. Sedangkan menurut klasifikasi Koppen, wilayah Kabupaten Buton Tengah mempunyai tipe iklim Am yaitu iklim hujan tropis yang dicirikan adanya satu atau lebih bulan kering nyata (< 60 mm/bulan) menyebar di sebagian besar daratan Pulau Buton bagian selatan mempunyai tipe hujan C dan D, sedangkan bagian tengah Pulau Buton memiliki tipe iklim B dan C. Sedangkan Pulau Muna mempunyai tipe hujan D, kecuali sekitar Lasehao yang mempunyai tipe hujan B. Jumlah bulan kering (curah hujan kurang 60 mm/bulan) 1 bulan dan jumlah basah (curah hujan



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

lebih dari 100 mm/bulan) 10 bulan. Curah hujan rata-rata bervariasi antara 62,1 mm sampai 437 mm. Seluruh pulau dan bagian selatan Pulau Buton mempunyai zona agroklimat D3 dan Pulau Buton bagian tengah sampai utara mempunyai zona agroklimat C3.

Tabel 2.4.

Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Betoambari, Tahun 2022

Bulan	Iklim		Suhu Udara (°C)			Kelembapan Udara (%)		
	Curah Hujan	Hari Hujan	Min	Maks	Rata-Rata	Min	Maks	Rata-Rata
Januari	164	26	23	34,4	27,8	52	98	83
Februari	380	20	21,6	34,2	26,7	59	100	87
Maret	291	23	22,2	33,2	27,1	55	99	88
April	99	15	21,8	32,8	27,3	58	100	86
Mei	177	18	22,2	34,2	27,1	51	99	87
Juni	495	24	21,2	32,8	26,1	43	100	87
Juli	18	10	21,2	32,6	26,6	43	99	82
Agustus	119	13	20,8	33	26,4	44	100	80
September	63	9	21,8	34,4	26,8	47	99	82
Oktober	211	23	23,2	33,8	27,3	54	100	86
November	274	27	22,4	33,2	27	53	100	87
Desember	350	24	22,4	33	27,2	53	100	85

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2022

2.1.1.7. Tutupan Lahan

Karakteristik wilayah yang digambarkan dengan penutupan lahan merupakan informasi yang berperan dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi pemanfaatan ruang. Proses identifikasi analisis penggunaan lahan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi sistem informasi melalui berbagai jenis analisis citra satelit.

Kondisi penggunaan lahan/tutupan lahan di Kabupaten Buton Tengah yang disajikan pada tabel dibawah ini. Tampak dalam Tabel tersebut bahwa hutan lahan kering sekunder dan semak/belukar masih mendominasi wilayah Kabupaten Buton, berturut-turut 72.228 ha dan 66.852 ha. Pertanian lahan kering bercampur



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

dengan semak dan padang rumput juga ditemui masih menepati segmen wilayah yang cukup luas.

Tabel 2.5.

Penggunaan Lahan/Tutupan lahan Kabupaten Buton Tengah

No.	Penggunaan Lahan/Penutupan lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan lahan kering primer	14,889	4.84
2	Hutan lahan kering sekunder	72,228	23.49
3	Hutan Manggrove primer	1,743	0.57
4	Hutan Manggrove Sekunder	3,030	0.99
5	Permukiman	3,288	1.07
6	Pertambangan	138	0.04
7	Pertanian lahan kering	12,494	4.06
8	Pertanian lahan kering bercampur dengan semak	34,862	11.34
9	Rawa	11	0.00
10	Padang Rumput	57,599	18.74
11	Sawah	309	0.10
12	Semak/Belukar	66,852	21.75
13	Semak/belukar rawa	178	0.06
14	Tanah terbuka	11,625	3.78
15	Tubuh Air	113	0.04
16	daerah tertutup awan	28,062	9.13
Total		307,421	100.00

Sumber : Dokumen RPIJM Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016

2.1.1.8. Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan UU No 41 Tahun 1999, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Di Kabupaten Buton, Kawasan lindung telah ditetapkan dalam Peta Status Kawasan Hutan dan Perairan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, dan



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Rancangan Perda RTRW Sultra yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam UU No 41 1999 tentang Kehutanan. Secara umum, kriteria kawasan hutan berfungsi lindung meliputi:

- Hutan konservasi
- Hutan lindung dan atau kawasan hutan lainnya dengan nilai skor > 175 (kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan); dan atau
- Lereng lapangan > 40% dan pada daerah yang tanahnya peka terhadap erosi dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan atau
- Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

Sebaran status kawasan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten yang ditetapkan adalah 28.918 ha atau 9,4% dari luas seluruh kabupaten. Disamping itu terdapat juga suaka margasatwa Lambusango seluas 28.510 ha.

Tabel 2.6.

Sebaran dan Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Buton Tengah

Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
Gu	3500	12.10
Lakudo	5600	19.37
Mawasangka	00.00	0.00
Mawasangka Tengah	1250	4.32
Mawasangka Timur	00.00	0.00
Talaga Raya	00.00	0.00
Sangia Mambulu	0	0.00
Total	10350	35.79

Sumber: Rancangan RTRW Provinsi Sultra (2011) dan Kementerian Kehutanan (2010), Analisis GIS, Dokumen RIPJM Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Buton Tengah ditetapkan menjadi kawasan strategis. Kegiatan pembangunan pada kawasan strategis akan menjadi prioritas penanganannya karena kawasan ini mempunyai karakteristik



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

yang spesifik khususnya dalam memacu pengembangan wilayah di Kabupaten Buton Tengah maupun untuk pertimbangan strategis lainnya. Dengan menggarap suatu kawasan strategis secara multisektor dan terintegrasi diharapkan akan terjadi pengembangan wilayah sesuai karakteristiknya sehingga secara umum akan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Kabupaten Buton Tengah.

Kawasan strategis ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksudkan untuk:

1. Mengarahkan perhatian seluruh pihak terhadap perlunya pemusatan sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang ada, baik dari level Pusat hingga Daerah, maupun sumber-sumber donor lain yang memungkinkan, ke kawasan – kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis, secara terintegrasi sehingga mampu memicu efek pengganda bagi perekonomian wilayah secara menyeluruh; dan
2. Memusatkan perhatian para pemangku kepentingan pembangunan daerah pada kawasan-kawasan strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunannya melihat potensi dan permasalahan yang ada.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah, kawasan strategis yang akan diangkat meliputi:

1. Kawasan Perkotaan Labungkari
Kawasan Perkotaan Labungkari direncanakan sebagai pusat pemerintahan dan kawasan perkotaan. Wilayah ini diprioritaskan pengembangannya untuk mendorong kegiatan perekonomian Kabupaten Buton Tengah
2. Kawasan Strategis pertanian dan perikanan Masawangka Tengah dan Sekitarnya
Kawasan Strategis perikanan dan pertanian masawangka tengah dan sekitarnya direncanakan sebagai kawasan strategis ekonomi dengan komoditas pertanian dan perikanan. Wilayah ini diprioritaskan pengembangannya karena memiliki potensi yang tinggi pada perikanan dan pertanian serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian.
3. Kawasan Strategis Pariwisata Lakudo dan sekitarnya



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

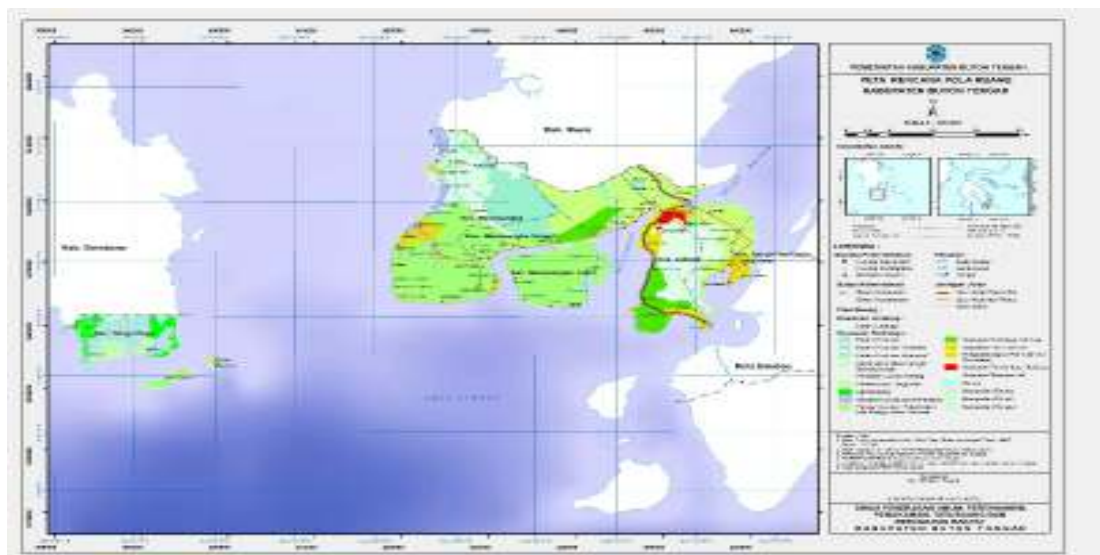
Kawasan strategis pariwisata lakudo dan sekitarnya direncanakan sebagai kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Kawasan strategis lakudo dan sekitarnya memiliki potensi pariwisata yang tinggi terutama pariwisata bahari,

4. Kawasan Strategis Industri Pertambangan Di Kecamatan Talaga Raya

Kawasan Strategis Industri Pertambangan Kecamatan Talaga Raya direncanakan sebagai kawasan strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan tambang ini merupakan tambang logam terdiri atas nikel dengan luas area potensi pertambangan 10.931, 50 Ha.

Gambar 2.4.

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Buton Tengah



Sumber: RTRW Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020-2040

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Potensi rawan bencana di Kabupaten Buton Tengah tidak terlepas dari potensi rawan bencana Kabupaten Sulawesi Tenggara. Secara garis besar, gambaran umum kebencanaan di Provinsi Sulawesi Tenggara dijabarkan menjadi beberapa aspek yaitu gambaran umum wilayah, sejarah kejadian bencana dan potensi bencana di daerah. Gambaran umum wilayah menjelaskan kondisi daerah berdasarkan aspek geografis, topografi, fisiografi, dan demografi. Sejarah kejadian bencana daerah merupakan bencana-bencana yang pernah terjadi di Provinsi



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Sulawesi Tenggara. Sedangkan potensi bencana merupakan prediksi bencana-bencana yang berkemungkinan terjadi.

Keadaan topografi, Provinsi Sulawesi Tenggara umumnya memiliki permukaan tanah yang bergunung, bergelombang berbukit-bukit. Di antara gunung dan bukit-bukit, terbentang daratan yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan seluas 1.868.860 Ha telah digunakan untuk usaha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100–500 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi iklim dan keadaan topografi seperti ini juga dapat menimbulkan dampak bencana bagi manusia seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor.

Pengkajian risiko bencana disusun dengan menggunakan indeks bahaya, indeks kerentanan dan indeks kapasitas. Indeks-indeks ini digunakan untuk menentukan kelas di masing-masing indeks yang nantinya akan menghasilkan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Indeks bahaya dan indeks kerentanan bergantung pada jenis bahaya, sedangkan indeks kapasitas ditentukan berdasarkan wilayah administrasi yang difokuskan kepada institusi pemerintah di kawasan kajian.

Gambar 2.5

Peta Rawan Bencana Kabupaten Buton Tengah



Sumber: RTRW Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 tahun 2020-2040

2.1.3.1. Bahaya

Pengkajian indeks bahaya disusun berdasarkan jenis potensi bencana dan besaran dampak yang tercatat untuk bencana yang pernah terjadi. Dapat dikatakan bahwa indeks ini disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian bencana



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

pada suatu daerah. Dari potensi bencana yang ada di suatu daerah, maka dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi di daerah tersebut. Terdapat 12 jenis bahaya telah diatur dan disamakan penamaannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia Tahun 2015. Penentuan jenis dan tingkat bahaya merupakan langkah awal dalam melakukan sebuah kajian risiko bencana. Adapun beberapa bahaya bencana di Kabupaten Buton Tengah menurut hasil kajian indeks bahaya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7.

Potensi Luas Bahaya Bencana di Kabupaten Buton Tengah

Bahaya	Luas	Kelas
Banjir	64.047	Sedang
Banjir Bandang	15	Tinggi
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	5.938	Tinggi
Gempa Bumi	85.324	Rendah
Kekeringan	85.326	Sedang
Cuaca Ekstrim	82.640	Sedang
Tanah Longsor	6.798	Sedang
Tsunami	2.613	Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan	65.130	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2021

2.1.3.2. Kerentanan

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Pengkajian kerentanan dihitung berdasarkan komponen sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Pengkajian tersebut nantinya akan menghasilkan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian.

Indeks penduduk terpapar dilihat berdasarkan komponen sosial budaya. Komponen ini ditentukan dengan parameter kepadatan penduduk dan penduduk kelompok rentan (rasio jenis kelamin kelompok umur rentan, penduduk miskin dan penduduk cacat). Sedangkan indeks kerugian dikelompokkan dalam dua indeks



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

yaitu kerugian rupiah (komponen fisik dan ekonomi) dan kerugian lingkungan (komponen lingkungan). Komponen fisik diperoleh berdasarkan parameter rumah, fasilitas umum dan fasilitas kritis yang berpotensi terdampak bencana, komponen ekonomi berdasarkan parameter lahan produktif dan PDRB. Sedangkan komponen lingkungan diperoleh berdasarkan parameter penutupan lahan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, rawa, dan semak belukar).

Kajian kerentanan di Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada standar pengkajian risiko bencana. Sumber informasi utama yang digunakan untuk analisis kerentanan pada kajian risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara berbeda-beda tiap komponennya.

1. Komponen sosial budaya dengan sumber data dari Kemendagri tahun 2010 yang diproyeksikan ke tahun 2015.
2. Komponen fisik dengan sumber data data statistik BPS untuk parameter PDRB dan data penutupan/penggunaan lahan.
3. Komponen ekonomi dengan sumber data Podes untuk data jumlah rumah, data Podes untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan data pembangkit listrik (PLTA, PLTU) untuk parameter jumlah fasilitas kritis bersumber dari BIG (Badan Informasi Geospasial).
4. Komponen lingkungan dengan sumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Data Hutan Lindung Tahun 2011.

Tabel 2.8.

Potensi Penduduk Terpapar Kerentanan di Kabupaten Buton Tengah

Kerentanan	Penduduk Terpapar	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	Kelas
Banjir	60.781	11.485	27.926	713	TINGGI
Banjir Bandang	-	-	-	-	RENDAH
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	25.725	4.864	11.823	207	TINGGI
Gempa Bumi	88.971	16.811	40.885	906	TINGGI
Kekeringan	88.971	16.811	40.885	906	TINGGI
Cuaca Ekstrim	86.937	16.427	39.951	893	TINGGI



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Kerentanan	Penduduk Terpapar	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	Kelas
Tanah Longsor	3.575	673	1.641	18	TINGGI
Tsunami	14.056	2.660	6.457	98	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2021

Tabel 2.9.

Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Buton Tengah

Kerentanan	KERUGIAN RUPIAH (Milyar Rupiah)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS	TOTAL	KELAS
Banjir	78,9	3	81,8	Tinggi	13	Rendah
Banjir Bandang	-	-	-	Rendah	5	Sedang
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	124,8	0,2	125	Sedang	739	Tinggi
Gempa Bumi	-	-	-	Sedang	-	-
Kekeringan	-	5,5	5,5	Sedang	16.820	Tinggi
Cuaca Ekstrim	396	5,3	401,3	Tinggi	-	-
Tanah Longsor	16,8	0	16,9	Sedang	2.193	Tinggi
Tsunami	45,6	0,2	45,8	Sedang	159	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	-	0,1	0,1	Rendah	28.272	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2021

2.1.4. Demografi

2.1.4.1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data agregat Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKB Semester 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Buton Tengah tahun 2022 sebanyak 118.904 jiwa, atau tumbuh sebesar 1,95. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 59.419 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 59.485 jiwa. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Kabupaten Buton Tengah pada Tahun 2022 sebesar 99,89 yang berarti bahwa untuk setiap 100 orang perempuan terdapat sekitar 99 hingga 100 orang laki-laki dengan kata lain jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.10.

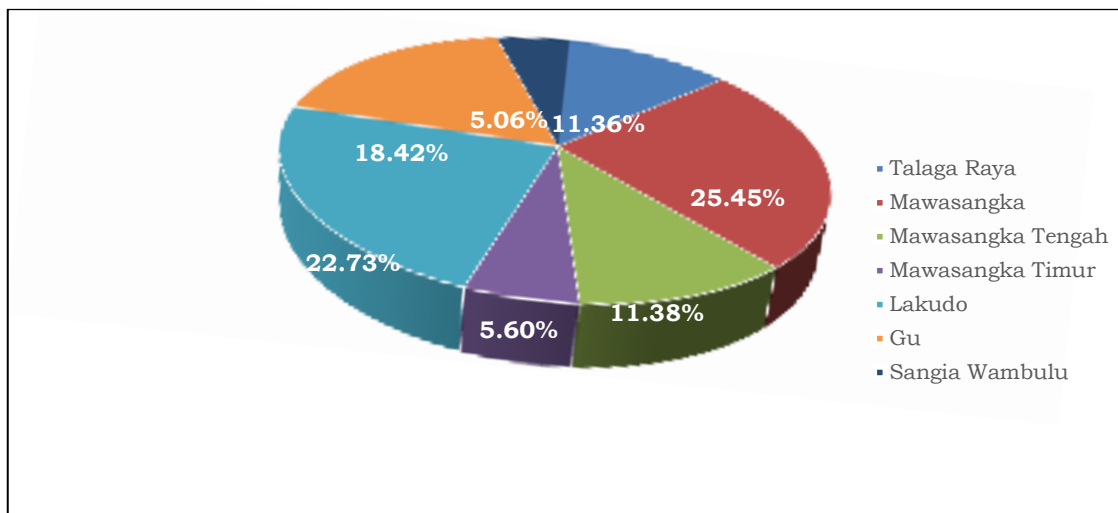
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Talaga Raya	6 914	6 683	13 597	2,70	103.46
Mawasangka	14 805	15 135	29 940	1,83	97.82
Mawasangka Tengah	6 658	6 622	13 280	2,38	100.54
Mawasangka Timur	3 020	3 267	6 287	1,47	92.44
Lakudo	13 766	13 664	27 430	1,71	100.75
Gu	11 278	11 120	22 398	2,16	101.42
Sangia Wambulu	2 978	2 994	5 972	0,78	99.47
Buton Tengah	59 419	59 485	118 904	1,95	99.89

Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023

Grafik 2.2.

Distribusi Penduduk Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022



Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023

Dilihat dari pola persebaran penduduknya, seperempat populasi penduduk Kabupaten Buton Tengah menetap di Kecamatan Mawasangka (25,45% atau 29.940 jiwa). Kemudian disusul oleh kecamatan Lakudo (22,73% atau 27.430 jiwa). Hampir separuh dari penduduk Buton Tengah berada di Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Mawasangka dan Lakudo. Sedangkan yang paling kecil adalah kecamatan Sangia Wambulu (5,06% atau 5.972 jiwa).

2.1.4.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduknya sebesar 142 jiwa per kilometer persegi. Di sisi lain, jika ditinjau dari kepadatan penduduk, Kecamatan Sangia Wambulu merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yang mencapai 1.010,5 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Mawasangka Timur dengan kepadatan penduduk sebesar 67,3 jiwa per kilometer persegi menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah.

Tabel 2.11.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022

Kecamatan	Luas	Penduduk	Kepadatan Penduduk
Talaga Raya	89,49	13 597	151,9
Mawasangka	229,02	29 940	130,7
Mawasangka Tengah	121,99	13 280	108,9
Mawasangka Timur	93,35	6 287	67,3
Lakudo	204,3	27 430	134,3
Gu	93,1	22 398	240,6
Sangia Wambulu	5,91	5 972	1010,5
Buton Tengah	837.16	118 904	142,16

Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023

2.1.4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Piramida Penduduk Kabupaten Buton Tengah masih menunjukkan pola pertumbuhan penduduk yang ekspansif. Jumlah penduduk yang berada di kelompok usia muda yaitu kelompok usia 0–14 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tengah dan usia tua. Sekitar 40 persen sebaran penduduk tersebar di usia 0–14 tahun. Hal tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan dan kelahiran penduduk yang masih cukup tinggi.

Umur Median (Median Age) adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, bagian yang pertama lebih muda dan bagian



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

yang kedua lebih tua daripada ‘umur median’. Umur Median digunakan untuk menunjukkan klasifikasi struktur penduduk apakah termasuk “muda”, “sedang” atau “tua”. Untuk kabupaten Buton Tengah, Median umur penduduk adalah sebesar 20,78 tahun sehingga menurut kategorisasi penduduk di kabupaten buton Tengah dikategorikan sebagai penduduk “usia intermediate”

Tabel 2.12.
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban
Ketergantungan, 2017-2021

Tahun	0-14	15-64	65+	Angka Beban Ketergantungan		
				YADR	OADR	DR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2017	34,60	58,86	6,54	58,78	11,11	69,89
2018	34,19	59,08	6,73	57,86	11,39	69,25
2019	33,77	59,29	6,94	56,96	11,71	68,67
2020	31,30	62,86	5,84	49,78	9,29	59,07
2021	30,94	62,99	6,07	49,13	9,63	58,76

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Buton Tengah Tahun 2022

Tabel 2.13.
Jumlah Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Tahun
2021 (Ribu)

Kelompok umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
0-4	5.845	5.628	11.473	103,86
5-9	6.012	6.16	12.172	97,60
10-14	6.426	6.011	12.437	106,90
15-19	6.057	5.767	11.824	105,03
20-24	5.704	5.631	11.335	101,30
25-29	5.199	4.75	9.949	109,45
30-34	4.577	4.155	8.732	110,16
35-39	3.671	3.502	7.173	104,83
40-44	3.118	3.188	6.306	97,80
45-49	2.94	2.903	5.843	101,27



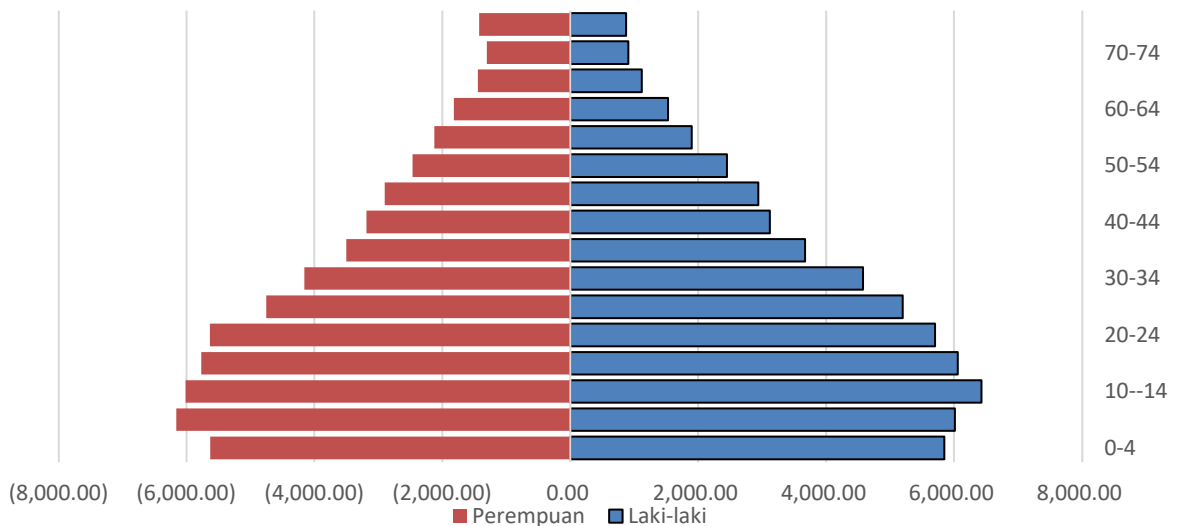
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

50-54	2.448	2.467	4.915	99,23
55-59	1.899	2.123	4.022	89,45
60-64	1.527	1.818	3.345	83,99
65-69	1.119	1.445	2.564	77,44
70-75	906	1.305	2.211	69,43
75+	875	1.423	2.298	61,49
Total	58.323	58.276	116.599	100,08

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022

Grafik 2.3.

Piramida Penduduk Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022



Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (Diolah)

Berdasarkan gambar 2.3, dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk Buton Tengah tahun 2021 termasuk tipe ekspansif, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda yang berarti angka kelahiran cukup tinggi. Jika diamati pada 3 (tiga) kelompok umur yaitu kelompok umur 0-4 tahun, umur 5-9 tahun, dan usia 10-14 tahun, jumlahnya lebih besar dari kelompok umur yang lebih tua. Hal ini menunjukkan kelompok penduduk ini memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi yakni 49,13 persen di tahun 2021. Sementara jumlah kelompok penduduk usia tua yang kecil menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua,



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

yaitu 9,63 persen di tahun 2021. Secara total, angka beban ketergantungan Kabupaten Buton Tengah tahun 2021 sebesar 58,76 persen yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 58 hingga 59 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Jika dilihat dari trennya, angka beban ketergantungan ini semakin menurun baik dari penduduk belum produktif dan penduduk yang sudah tidak produktif. Hal ini berarti beban yang perlu ditanggung oleh penduduk usia produktif semakin ringan.

2.1.4.4. Perkembangan Penduduk

Metode perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Buton Tengah adalah menggunakan metode proyeksi bunga berganda. Penggunaan model proyeksi ini didasarkan pada kecenderungan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Buton Tengah dari tahun ke tahun. Selain itu hal ini juga bertujuan meningkatkan pelayanan wilayah terhadap penduduk sehingga semua penduduk pada tahun rencana dapat terlayani secara baik.

Proyeksi penduduk di Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2043 akan mencapai 210.503 jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi kebutuhan sarana/prasarana wilayah, lapangan pekerjaan dan tentu diperlukan penataan ruang supaya dalam pengalokasiannya sesuai dengan peruntukannya. Adapun perkembangan dan proyeksi penduduk di Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 2.14.
Perkembangan Penduduk dan Proyeksi Penduduk Kabupaten
Buton Tengah Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)							
	2017*	2019**	2021***	2023	2028	2033	2038	2043
Talaga Raya	9.708	13.455	13.517	14.651	16.796	19.254	22.073	25.304
Mawasangka	23.286	29.562	30.286	33.114	39.045	46.038	54.283	64.006
Mawasangka Tengah	9.636	13.077	13.544	14.241	16.026	18.035	20.296	22.840
Mawasangka Timur	5.115	6.596	6.662	7.119	8.161	9.356	10.726	12.296
Lakudo	21.408	27.089	27.053	29.681	34.610	40.357	47.057	54.871



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)							
	2017*	2019**	2021***	2023	2028	2033	2038	2043
Gu	15.654	21.909	21.925	22.076	22.076	22.076	22.076	22.076
Sangia Wambulu	5.292	6.378	6.024	6.541	7.106	7.719	8.386	9.110
Kab. Buton Tengah	91.099	118.066	119.011	127.424	143.820	162.835	184.897	210.503

*Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2018 ** 2020 *** 2022

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang di dalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (satu tahun). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar, yaitu dalam periode tahun sampai dengan tahun 2022 ini menggunakan tahun dasar tahun 2000.

Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, PDRB Kabupaten Buton Tengah atas harga berlaku adalah 2.169.779,5 juta rupiah tahun 2018, meningkat menjadi 2.794.153,98 juta rupiah di tahun 2023. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 adalah 3,86 dengan laju pertumbuhan PDRB paling besar disumbang oleh sektor penyedia akomodasi dan makanminum yaitu sebesar 8,28. Adapun nilai PDRB dan Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.15

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buton Tengah (juta rupiah), 2018-2022

	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	884.816,14	974.968,46	989.101,48	651 525,6	686 883,7
B	Pertambangan dan Penggalian	119.508,87	128.547,55	196.327,67	143 860,3	150 935,2
C	Industri Pengolahan	113.912,22	122.575,27	122.834,95	88 346,4	89 753,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	958,54	1.023,77	1.037,25	1 059,7	1 122,3
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9.856,72	10.292,11	10.629,50	8 417,0	8 427,4
F	Konstruksi	326.906,71	369.511,38	367.298,63	273 193,1	272 900,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	276.652,87	299.898,63	293.543,34	213 297,3	226 573,1
H	Transportasi dan Pergudangan	24.434,79	26.838,88	26.856,94	24 042,1	24 859,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.633,50	4.673,59	4.621,58	3 557,2	3 851,9
J	Informasi dan Komunikasi	14.288,25	15.217,78	16.359,56	16 985,8	18 081,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	38.187,04	41.040,00	41.964,70	29 308,7	29 697,4
L	Real Estat	73.679,99	78.246,47	79.275,91	63 077,1	63 676,2
M,N	Jasa Perusahaan	768,30	831,90	826,76	620,5	636,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	80.090,05	81.703,02	85.602,48	60 942,6	62 889,1
P	Jasa Pendidikan	163.855,75	174.909,88	184.575,28	146 758,9	151 627,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22.349,00	24.204,11	27.018,66	22 339,9	22 679,7
R,S,T,U	Jasa Lainnya	14.880,76	15.759,34	15.598,81	12 603,7	13 305,0
	Kabupaten Buton Tengah	1.799.687	975533,47	2.169.779,51	1 759 936,08	1.827.898,61

Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.16.

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buton Tengah (persen), 2018-2022**

	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.37	2.73	0.73	2	5.43
B	Pertambangan dan Penggalian	3.22	5.8	53.74	1.89	4.92
C	Industri Pengolahan	-0.71	4.86	-3.1	3.23	1.59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.24	5.05	1.26	7.91	5.91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.14	4.03	2.49	0.32	0.12
F	Konstruksi	8.53	8.85	-1.28	9.59	-0.11
G	Perdagangan Besar dan Eceran;	8.36	7.22	-3.71	0.46	6.22
H	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.15	7.64	-1.9	3.8	3.4
I	Transportasi dan Pergudangan	7.07	-1.37	-3.54	4.59	8.28
J	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.5	6.25	7.98	4.15	6.45
K	Informasi dan Komunikasi	0.42	5.61	2.72	3.45	1.33
L	Real Estate	4.38	5.18	1.05	0.39	0.95
M,N	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.1	4.78	-3.48	1.65	2.52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.89	0.31	1.82	-0.01	3.19
P	Jasa Pendidikan	6.18	5.18	4.31	3.89	3.32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.11	6.21	9.51	7.83	1.52
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.09	4.88	-3.62	-0.16	5.56
	Kabupaten Buton Tengah	5.83	4.9	3.04	3.12	3.86

Sumber :KabupatenButon Tengah Dalam Angka Tahun 2023

2.2.1.2. PDRB Perkapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Mulai tahun 2011, Susenas dilaksanakan secara triwulan, yaitu Triwulan I dilaksanakan bulan Maret, Triwulan II bulan Juni, Triwulan III bulan September dan Triwulan IV dilaksanakan bulan Desember.

Data pengeluaran dan konsumsi penduduk menurut kelompok barang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Triwulan I-2015, yang mencakup semua provinsi di Indonesia. Data konsumsi/pengeluaran yang dikumpulkan pada Susenas Triwulan I-2014 dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan. Untuk konsumsi bukan makanan, pada umumnya yang dikumpulkan hanya data nilainya, kecuali untuk beberapa jenis pengeluaran tertentu, seperti penggunaan listrik, air, gas dan bahan bakar minyak (BBM) yang juga dikumpulkan kuantitasnya.

PDRB Perkapita pada Kondisi Kinerja Awal RPJMD sebesar 1593269,7 pada tahun 2017 targetnya yaitu sebesar 16.000 dengan realisasi 1975533,47 dan persentase sebesar 12347,09%, selanjutnya pada tahun 2018 targetnya sebanyak 17.000 dengan realisasi 2169779,51 dan persentase sebesar 12763,41%, untuk tahun 2019 targetnya sebanyak 18.000 dengan realisasi 3370242,14 dan persentase sebesar 18723,57%, dan untuk tahun 2020 targetnya sebanyak 19.000 dengan realisasi 2463473,5 dan persentase sebesar 12965,65%, kemudian untuk tahun 2021 targetnya sebanyak 2000 namun realisasinya belum ada sehingga persentasenya belum diperoleh.

2.2.1.3. Indeks Gini

Gini Rasio merupakan koefisien untuk menunjukkan derajat ketidakmerataan /ketimpangan secara menyeluruh yang didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tenggara yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,394. Angka ini naik 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,390 dan meningkat 0,006 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

sebesar 0,388. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,402, turun dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,411 dan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,403. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,353, naik dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,347 dan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,348.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persenter bawah adalah sebesar 16,31 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,11 persen yang berarti tergolong kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 18,04 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Indeks gini Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2018 adalah sebesar 0,51 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat diketahui bahwa indeks gini Kabupaten Buton Tengah lebih kecil dibandingkan dengan indeks gini Provinsi.

Tabel 2.17.
Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2020 - 2022

Wilayah	2020	2021	2022
Buton	0.465	0.337	0.320
Muna	0.402	0.331	0.330
Konawe	0.335	0.330	0.330
Kolaka	0.320	0.383	0.310
Konawe Selatan	0.316	0.366	0.370
Bombana	0.339	0.361	0.370
Wakatobi	0.336	0.335	0.350
Kolaka Utara	0.354	0.356	0.380
Buton Utara	0.376	0.370	0.350
Konawe Utara	0.348	0.399	0.370
Kolaka Timur	0.312	0.320	0.300
Konawe Kepulauan	0.331	0.324	0.350
Muna Barat	0.369	0.332	0.320
Buton Tengah	0.285	0.314	0.36
Buton Selatan	0.367	0.324	0.290
Kota Kendari	0.374	0.362	0.390



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Kota Baubau	0.444	0.443	0.430
Sulawesi Tenggara	0.389	0.390	0.390

Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023

2.2.1.4. Indeks Kemiskinan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Secara ekonomi kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya.

Selanjutnya standar kehidupan ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi, dan distribusi serta letak geografisnya.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan SDGs yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga lembaga swadaya masyarakat.

1) Perkembangan Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton Tengah menunjukkan angka yang fluktuatif pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Pada tahun 2018 tercatat angka kemiskinan penduduk Kabupaten Buton Tengah sebesar 14,88 persen atau masih terdapat sebesar 13,72 ribu jiwa penduduk miskin di Kabupaten Buton Tengah. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 18,35 persen atau berkurang sebanyak 3,01 ribu jiwa penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian pada tahun 2019 jumlahnya naik lalu sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi sejumlah 14,40 ribu jiwa atau sekitar 15,32 persen penduduk miskin dari seluruh penduduk di Buton Tengah. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, program-program pemerintah yang dapat menahan laju peningkatan angka kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, perlu ditingkatkan.

Tabel 2.18

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017-2022

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2017	2.21	0.56
2018	1.23	0.25
2019	1.64	0.34
2020	1.91	0.38
2021	1.91	0.38
2022	1.81	0.34

Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023

Bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton Tengah masih selalu lebih tinggi



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

dari tahun 2017 hingga 2022. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara sebanyak 14,9 persen, menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 15,77 persen. Pola kenaikan dan penurunan persentase penduduk miskin di Buton Tengah dan Sulawesi Tenggara memiliki arah yang sama pada tahun 2017, 2018, 2020 dan 2022.

2) Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Buton Tengah mengalami peningkatan selama periode Maret 2019-Maret 2022. Pada tahun 2019 garis kemiskinan di Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp 251.702,-. Kemudian terus meningkat hingga di tahun 2022 menjadi Rp 275.058,-.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2022, nilai P1 Kabupaten Buton Tengah sebesar 1,81. Nilai ini diharapkan semakin turun. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mendekat. Dengan nilai P1 yang semakin kecil menunjukkan beban penduduk miskin untuk dapat terangkat dari kondisi kemiskinan semakin mudah. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan dapat membebaskan penduduk dengan kondisi miskin yang tidak “terlalu dalam”

Tabel 2.19.

Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan, Maret 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	251.702	264.699	273.354	275.058



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Indikator	2019	2020	2021	2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	1,64	1,91	1.91	1.81
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,34	0,38	0.38	0.34

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. P2 pada tahun 2022 sebesar 0,34. Diharapkan nilai ini semakin kecil yang berarti bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin mengecil. Perbaikan ketimpangan pendapatan harus terus dilakukan karena masih ada kelompok penduduk miskin menerima pendapatan yang cukup rendah sehingga tidak mampu mengangkat taraf ekonominya. Disaat yang sama, besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan juga mengalami peningkatan.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar Hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Capaian kemajuan pembangunan manusia relatif meningkat. Angka IPM Kabupaten Buton Tengah pada 2019 sebesar 62,56 mengalami peningkatan menjadi 64,37 pada tahun 2020.

Jika dilihat dari komponen IPM pada periode tahun 2019-2022, secara rata-rata, komponen RLS mengalami peningkatan yang paling besar (0,47 persen), diikuti pengeluaran perkapita disesuaikan (2,11 persen), HLS (0,24 persen), dan yang terkecil adalah AHH (0,23 persen) IPM Kabupaten Buton Tengah tahun 2022 termasuk dalam kategori sedang dan menjadi ranking ke empat belas di Sultra. Oleh karenanya, masih diperlukan kebijakan dan program pemerintah yang dapat segera meningkatkan kualitas aspek kehidupan penduduk Kabupaten Buton Tengah.

Tabel 2.20.

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia		
	2020	2021	2022
Buton	65.98	66.32	67.23
Muna	69.02	69.17	69.61
Konawe	71.35	71.48	72.04
Kolaka	73.45	73.56	73.98
Konawe Selatan	68.20	68.58	69.36
Bombana	66.05	66.25	66.81
Wakatobi	69.48	69.87	70.85
Kolaka Utara	69.31	69.50	70.39
Buton Utara	67.87	68.08	69.00
Konawe Utara	69.86	70.23	71.10
Kolaka Timur	67.02	67.76	68.73
Konawe Kepulauan	65.41	65.73	66.69
Muna Barat	65.08	65.48	66.21
Buton Tengah	64.37	64.55	65.29
Buton Selatan	64.93	64.99	65.44
Kota Kendari	83.53	84.15	84.51



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Kota Baubau	75.90	76.26	76.67
Sulawesi Tenggara	71.45	71.66	72.23

Sumber: Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023

2.2.2.2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan Ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Tujuan pembangunan pendidikan diantaranya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya akses anak usia sekolah terhadap layanan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan berbagai kebijakan tersebut diharapkan angka putus sekolah menurun. Dengan turunnya angka putus sekolah, secara tidak langsung berdampak pada semakin tingginya harapan lama sekolah bagi penduduk usia tujuh tahun keatas. Secara tidak langsung, ada hubungan keterkaitan antara harapan lama sekolah, angka putus sekolah dan kondisi pendidikan saat ini.

Gambarannya adalah sebagai berikut, jika kebijakan bidang pendidikan kondusif dan mendorong penduduk untuk tetap bersekolah, maka angka putus sekolah akan turun. Jika angka putus sekolah turun, berarti harapan lama sekolah naik. Walaupun mungkin kenaikan itu tidak langsung terlihat pada waktu yang bersamaan. Artinya, dampak terhadap harapan lama sekolah akan terlihat beberapa tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang tidak terjadi secara instan dan tiba-tiba.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Dari tahun ke tahun, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Buton Tengah terus merangkak naik. Pada tahun 2016, angka harapan lama sekolah sebesar 12,31 kemudian meningkat menjadi 12,32 pada tahun 2017, 12,35 pada tahun 2018, 12,7 pada tahun 2019, dan naik menjadi 13,00 pada tahun 2020. Angka 13,00 pada tahun 2020 ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1. Kenaikan HLS ini menunjukkan sedikit perbaikan kondisi pendidikan di wilayah Buton Tengah. Namun meskipun mengalami sedikit peningkatan, HLS Kabupaten Buton Tengah masih berada di bawah HLS Sulawesi Tenggara yang menunjukkan angka sebesar 13,00 di tahun 2020, tahun 2021 meningkat menjadi 13,12 dan ditahun 2022 menjadi 13,18.

Ukuran lain mengenai pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

RLS di Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2022 tercatat 7,33 tahun. Ini berarti hingga tahun 2022, secara rata-rata penduduk Kabupaten Buton Tengah usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas 1). dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Buton Tengah yang berusia 25 tahun ke atas putus sekolah di kelas 2 SMP. RLS tahun 2022 ini sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 7,31 tahun. Meski naik, RLS Kabupaten Buton Tengah masih berada di bawah RLS Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Hal ini berarti kondisi pendidikan di Kabupaten Buton Tengah masih tertinggal dibandingkan beberapa kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sesungguhnya, angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah beberapa tahun yang lalu, karena ini merupakan outcome dari proses pendidikan.

Karena RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun keatas, artinya penduduk yang



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

saat ini diperkirakan telah menyelesaikan proses pendidikannya. Sedangkan kondisi pendidikan saat ini akan berpengaruh pada angka HLS saat ini dan secara tidak langsung berpengaruh pada angka RLS beberapa tahun kedepan.

Tabel 2.21.

Harapan Lama sekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2020	2021	2022
Buton	13.75	13.76	13.87
Muna	13.79	13.80	14.01
Konawe	13.00	13.01	13.03
Kolaka	12.81	12.83	13.02
Konawe Selatan	12.36	12.37	12.59
Bombana	11.84	11.85	11.89
Wakatobi	13.50	13.51	13.51
Kolaka Utara	12.11	12.15	12.16
Buton Utara	12.76	12.92	12.99
Konawe Utara	12.83	13.08	13.11
Kolaka Timur	12.41	12.69	12.69
Konawe Kepulauan	12.06	12.32	12.53
Muna Barat	12.50	12.51	12.61
Buton Tengah	13.00	13.12	13.18
Buton Selatan	13.23	13.24	13.25
Kota Kendari	16.62	16.89	16.90
Kota Baubau	15.16	15.17	15.18
Sulawesi Tenggara	13.65	13.68	13.69

Sumber: Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023

2.2.2.3. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang ditandai dengan sertifikat/ijazah. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pada tahun 2020, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SD ke atas tahun 2020 mencapai 17,64 persen. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMP ke atas tahun 2020 hanya sebesar 18,86 persen. Kemudian persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMA ke atas tahun 2020 hanya sebesar 31,56 persen. Hampir sepertiga penduduk Buton Tengah pada tahun 2020 tidak memiliki ijazah SD. Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa pendidikan masih belum menjadi prioritas bagi penduduk Kabupaten Buton Tengah.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki mempunyai pendidikan yang lebih baik daripada penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari persentase penduduk perempuan berumur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah lebih besar dibandingkan persentase penduduk laki-laki. Persentase penduduk Laki-laki yang masih bersekolah di SD/sederajat dan SMA/sederajat juga lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Kemudian sekitar 39,19 persen penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas mampu menamatkan pendidikan hingga ke sekolah menengah atas, terpaut jauh dengan persentase penduduk perempuan yang tercatat sebesar 24,80 persen.

Tabel 2.22.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki, Tahun 2020

Ijazah/ STTB yang Dimiliki	Laki-Laki	Perempuan	Buton Tengah
Tidak punya ijazah SD	26,75	36,53	31,93
SD/sederajat	14,29	20,62	17,64
SMP/ sederajat	19,77	18,06	18,86
SMA/ sederajat	39,19	24,8	31,56

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021

2.2.2.4. Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. APS untuk menilai pencapaian MDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Pada tahun 2020, 95,87 persen penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Buton Tengah sudah mengenyam pendidikan. Angka ini lebih rendah daripada angka Sulawesi Tenggara yang tercatat sebesar 99,1 persen. Pada kelompok usia 13-15 tahun, penduduk yang telah mengenyam pendidikan lebih besar yaitu sebesar 96,56 persen dan lebih tinggi daripada rata-rata penduduk Sulawesi Tenggara pada kelompok umur yang sama yaitu sebesar 94,98 persen. Sedangkan pada kelompok usia 16-18 tahun penduduk yang belum bersekolah lebih kecil bila dibandingkan dengan kelompok umur 7-15 tahun yaitu sebesar 93,26 persen, namun jauh lebih tinggi daripada rata-rata untuk Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 74,5 persen. Untuk Kelompok umur 13-18 tahun bila dibandingkan dengan APS Provinsi Sulawesi Tenggara, APS Kabupaten Buton Tengah selama tiga tahun terakhir sudah berada di atas rata-rata APS Sulawesi Tenggara.

APS yang belum seratus persen ini dikarenakan masih kurang fasilitas pendidikan sekolah terutama menengah hingga ke pelosok desa. Bila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, APS penduduk laki-laki pada pada setiap kelompok umur lebih rendah daripada APS penduduk perempuan. APS yang telah bernilai seratus persen adalah untuk penduduk perempuan kelompok umur 16-18 tahun. Artinya, seluruh penduduk perempuan kabupaten Buton Tengah dengan umur 16-18 tahun sedang atau telah bersekolah



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.23.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Formal menurut Jenis Kelamin, 2019-2020

Indikator Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Buton Tengah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
APS Formal						
7-12 tahun	89,44	92,55	94,42	98,66	91,97	95,87
13-15 tahun	96,7	91,2	98,61	99,86	97,82	96,56
16-18 tahun	96,13	89,54	91,66	100	94,1	93,26
APM Formal						
SD/MI	89,44	92,18	94,42	92,44	91,97	92,32
SMP/MTs	79,64	86,17	93,62	89,76	87,84	88,39
MA/SMK/MA	80,57	77,75	88,25	94,9	84,05	83,85

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021

Jika dibandingkan dengan APS, Angka Partisipasi Murni di setiap jenjang berada di bawah 93 persen, dengan APM yang tertinggi adalah jenjang SD/MI yaitu 92,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya masyarakat berpartisipasi dan sadar akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan untuk anak-anak mereka dengan tepat waktu.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, untuk APM perempuan jenjang SMA/SMK/MA sudah 95 persen. Artinya 95 persen anak-anak perempuan SMA/SMK/MA telah bersekolah dengan tepat waktu sesuai umur jenjang SMA/SMK/MA. Jika nilai tersebut dibandingkan dengan APM SD/MI nilainya lebih rendah yaitu 92,44 persen dan untuk SMP/Mts sebesar 89,76 persen.

Jika dilihat APM untuk laki-laki, tercatat angkanya lebih rendah dibanding perempuan untuk seluruh jenjang baik SD, SMP, atau SMA. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, APM SD dan SMP mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 92,18 persen untuk SD/MI dan SMP/MTs sebesar 86,17 persen. Sedangkan untuk APM SMA/SMK/MA mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 77,57 persen.



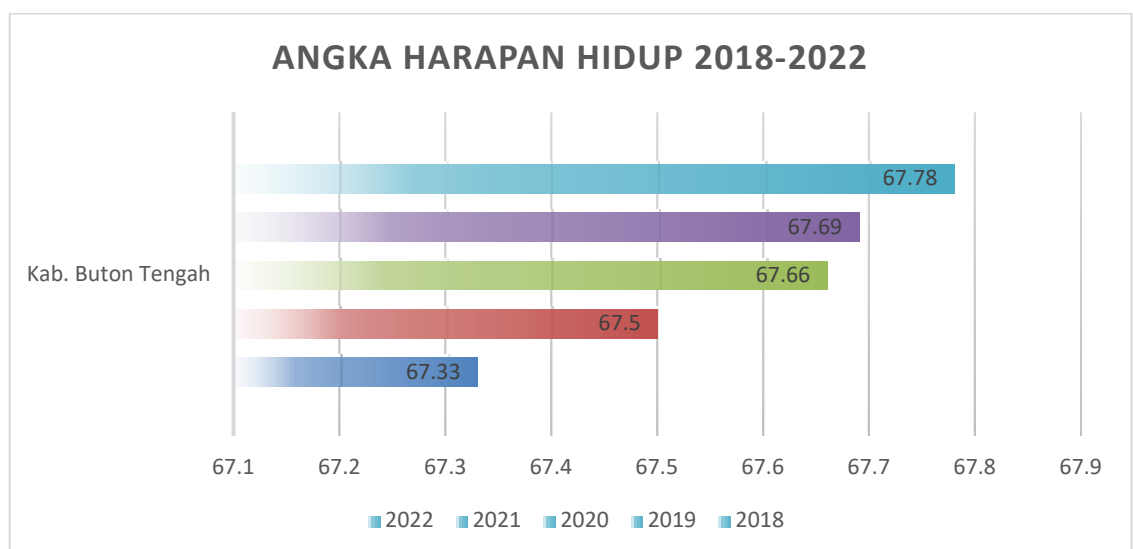
2.2.2.5. Angka Harapan Hidup

Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari usia harapan hidup penduduknya. Pada tahun 2020 angka harapan hidup di Kabupaten Buton Tengah tercatat 67,66 tahun yang berarti seorang bayi yang baru lahir akan bertahan hidup sampai dengan usia 67 hingga 68 tahun. Angka harapan hidup di Kabupaten Buton Tengah memperlihatkan adanya peningkatan 67, 69 pada tahun pada 2021, naik menjadi 67,78 tahun pada 2022. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesehatan makro penduduk Kabupaten Buton Tengah.

Namun angka harapan hidup penduduk Kabupaten Buton Tengah masih tergolong lebih rendah jika dibanding angka harapan hidup rata-rata di Sulawesi Tenggara. Hal ini digambarkan dengan angka harapan hidup di Sulawesi Tenggara yang mencapai 71,22 pada tahun 2020 sedangkan Kabupaten Buton Tengah hanya 67,66. Kondisi ini hendaknya dapat ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta penambahan fasilitas-fasilitas kesehatan hingga tingkat desa. Angka harapan hidup Kembali meningkat menjadi 71,37 di Sulawesi Tenggara dan 67,78 di Kabupaten Buton Tengah di tahun 2022.

Grafik 2.4.

Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Buton Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022



Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan persentase penduduk yang mengalami gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Angka kesakitan tahun 2021 penduduk Buton Tengah sebesar 28,45 persen. Menurut jenis kelaminnya, angka kesakitan penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan angka kesakitan penduduk perempuan yaitu 44,78 persen untuk laki-laki dan 14,06 persen untuk perempuan. Artinya, laki-laki lebih rentan terkena penyakit dibandingkan laki-laki. Kondisi ini bisa saja terjadi dikarenakan pola hidup dan aktifitas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Umumnya laki-laki melakukan kegiatan yang lebih berat dan lebih sering berada di lingkungan yang kurang sehat dibandingkan dengan perempuan.

Pada tahun 2021, berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah, jumlah kasus penyakit yang terbanyak yang terjadi di Kabupaten Buton Tengah adalah penyakit tekanan darah tinggi (Hipertensi) sebanyak 3.931 kasus. Kemudian disusul oleh penyakit saluran pernapasan akut (ISPA) sebanyak 3.661 kasus, gastritis sebanyak 1.271 kasus, febris sebanyak 1.159 kasus, dan Dermatitis sebanyak 1.159 kasus. Sedangkan penyakit lain masih berada di bawah seribu kasus.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.24.

Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin, 2018-2021

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan (%)			
	2018	2019	2020	2021
Laki-Laki	22,19	8,68	NA	44,78
Perempuan	7,26	9,44	NA	14,06

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022

Pada tahun 2021, persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merokok sebesar 17,45 persen. Jika dilihat dari pendidikan terakhir, penduduk dengan pendidikan terakhir SMP ke atas memiliki persentase yang lebih tinggi daripada yang memiliki pendidikan tertinggi SD ke bawah yaitu 18,44 persen untuk SMP ke atas dan 16,43 persen untuk SD ke bawah.

2.2.2.6. Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas, dan kemampuan tenaga kerja, serta perlindungan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan sampai saat ini masih merupakan permasalahan dan isu yang kompleks serta terus berkembang, sehingga tidak hanya menjadi masalah daerah namun telah menjadi masalah nasional bahkan regional, dan internasional. Masalah ketenagakerjaan harus membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terkait, baik pemerintah, pengusaha, pekerja itu sendiri dan pihak lainnya.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk 15 tahun keatas (tenaga kerja) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja di Buton Tengah adalah 61.106 jiwa yang terdiri dari 39.943 angkatan kerja atau sekitar 64,37 persen dan sisanya sebanyak 21.163 bukan angkatan kerja atau sekitar 34,63 persen. Ditinjau dari jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki lebih sedikit daripada penduduk usia kerja perempuan namun jumlah angkatan kerjanya lebih banyak daripada perempuan. Dari total penduduk usia kerja laki-laki, 71,44 persennya terjun ke dunia kerja sementara perempuan hanya sebesar 55,19 persen dari penduduk usia kerjanya. Hal ini karena 44,18 persennya tergolong dalam bukan angkatan kerja dan 31,63 persen perempuan usia kerja hanya mengurus rumah tangga tanpa ada pekerjaan lainnya.

Tabel 2.25.

Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin,
Tahun 2020-2022

Kegiatan Utama	2020			2021			2022		
	Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Angkatan Kerja	21.397	18.546	43.702	21.483	18.194	39.677	21.868	20.608	42.476
Bekerja	19.917	18.339	38.256	20.675	17.507	38.182	21.107	20.252	41.359



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

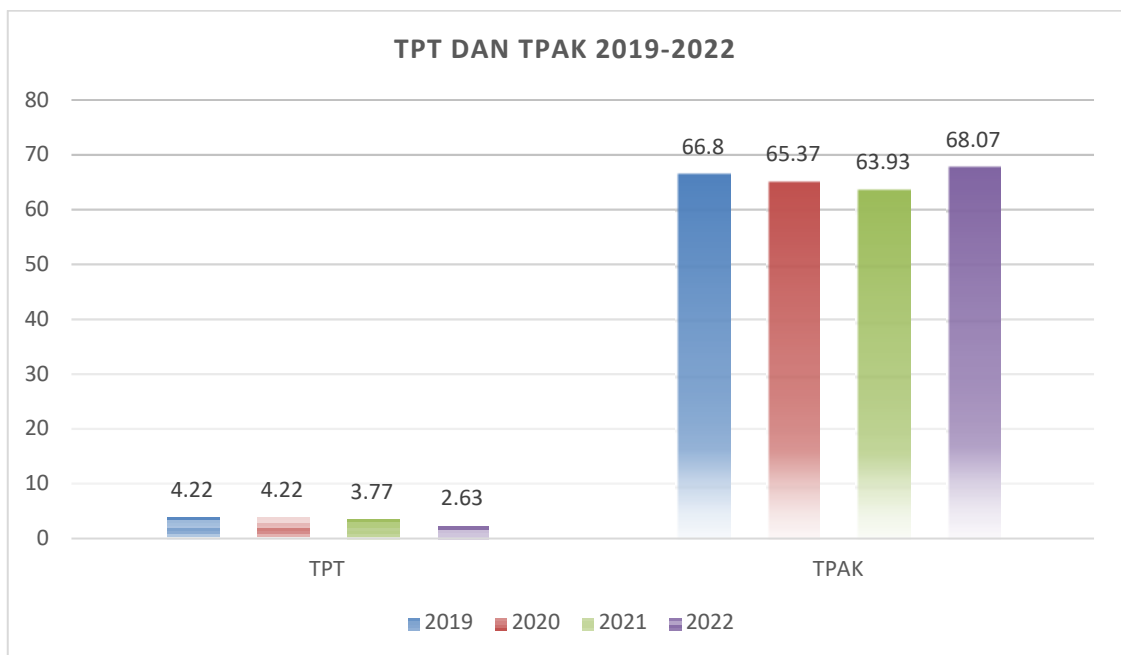
Pengangguran Terbuka	1.480	207	5.446	808	687	1.495	761	356	1.117
Bukan Angkatan Kerja	6.483	14.680	17.404	7 220	15 171	22 391	6.640	13.288	19.928
Sekolah	2.446	3.000	5.446	3.044	1.784	4.828	3.552	2.630	6.182
Mengurus Rumah Tangga	1 390	10 511	11 901	1.933	12.100	14.033	1.155	10.164	11.319
Lainnya	2.647	1.169	3.816	2 243	1 287	3 530	1.933	494	2.427
Jumlah	27.880	33.226	61.106	28.703	33.365	62.068	28.508	33.896	62.404
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76,75	55,82	71,52	74,85	54,53	63,93	76,71	60,8	68,07
Tingkat Pengangguran	6,92	1,12	4,22	3,76	3,78	3,77	3,48	1,73	2,63

Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja disuatu daerah. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Semakin tinggi nilai TPAK nya semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja didalam pasar kerja.

Grafik 2.5.

Perkembangan TPT dan TPAK Kabupaten Buton Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2019-2022



Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka 2023



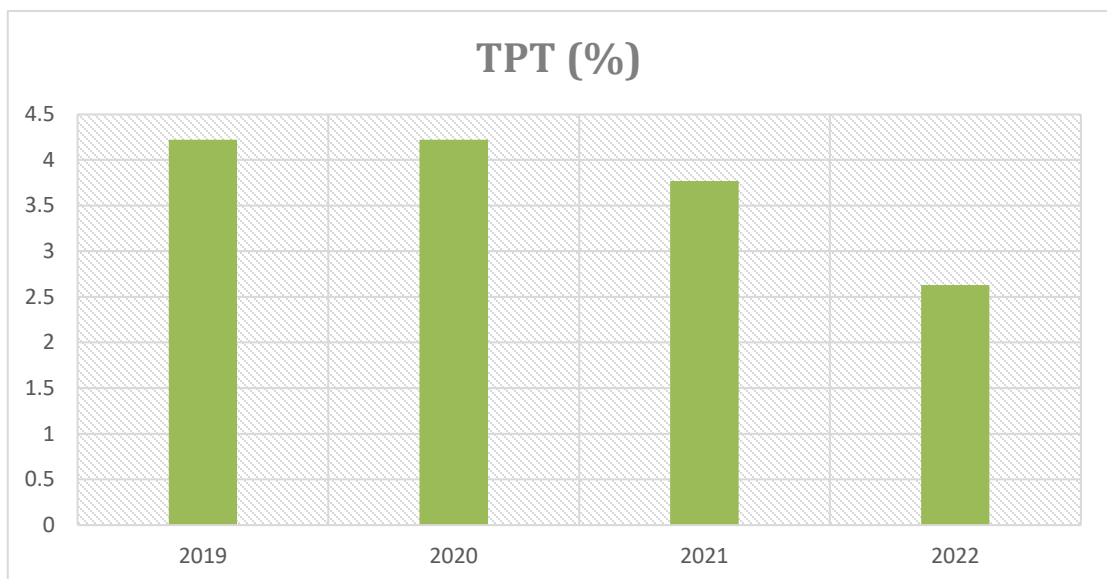
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tahun 2022 TPAK Buton Tengah mengalami kenaikan menjadi 68,07 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 63,93 persen. Artinya, terdapat 68,07 persen penduduk usia kerja yang bekerja secara aktif. Kenaikan TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Bila dibandingkan dengan rata-rata TPAK di Sulawesi Tenggara, TPAK Kabupaten Buton Tengah tahun 2022 tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap TPAK Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 sebesar 68,82%

Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi berharap mendapat pekerjaan, dan kegiatannya terdiri dari mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) atau karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Grafik 2.6.

Perkembangan TPT Kabupaten Buton Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2019-2022



Sumber : Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan rasio jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Buton Tengah pada 2019 sebesar 4.22 persen. Kemudian pada tahun 2021 TPT Kabupaten Buton Tengah turun menjadi 4,22 persen. Kemudian turun lagi pada tahun 2022 menjadi sebesar 2.63 persen. Bila dibandingkan dengan TPT Sulawesi Tenggara pada 2019 dan 2020, TPT Kabupaten Buton Tengah lebih tinggi daripada TPT Sulawesi Tenggara. Namun kemudian pada tahun 2022 TPT Buton Tengah lebih rendah dari Sulawesi Tenggara yang tercatat sebesar 3,36 persen..

2) Status Pekerjaan Utama

Pada 2020, kebanyakan pekerja merupakan pekerja yang tergolong berusaha sendiri yaitu sebanyak 13.281 jiwa. Kemudian, 7.758 penduduk usia 15 keatas berstatus sebagai buruh/karyawan dan 5.629 orang lagi merupakan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Proporsi pekerja yang berusaha sendiri maupun pekerja keluarga yang cukup tinggi tersebut bisa terjadi karena sebagian besar penduduk Kabupaten Buton Tengah bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yang menjalankan usaha secara mandiri dan tidak membutuhkan pekerja cukup banyak selain pekerja keluarga. Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu lebih banyak daripada penduduk perempuan yang bekerja yaitu dengan rasio sekitar lima laki-laki dibandingkan tiga perempuan.

Tabel 2.26.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Tengah, Tahun 2020

Status Pekerjaan Utama	2020			2021			2022		
	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P		L	P		L	P	
Berusaha Sendiri	5.519	7.762	13.281	5.264	7.744	13.008	9.660	8.488	18.148



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Berusaha dibantu buruh tidak tetap	3.901	2.322	6.223	3.707	2.229	5.936	3.222	2.444	5.666
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1.533	494	2.027	1.524	125	1.649	207	-	207
Buruh/Karyawan/Pegawai	5.377	2.381	7.758	5.736	2.311	8.047	5.874	4.559	10.433
Pekerja bebas (Pertanian)	274	1.337	1.611	461	1.177	1.638	1.167	2.547	3.714
Pekerja keluarga/tak dibayar	1.586	4.043	5.629	2.049	3.784	5.833	977	2.214	3.191
Jumlah	19.917	18.339	38.256	20.675	17.507	38.182	21.107	20.252	41.359

Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023

3) Tingkat Pendidikan Penduduk Bekerja

Harapan setiap individu adalah mudah mendapatkan pekerjaan layak, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada makin tinggi harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Selain itu semakin tinggi tingkat pendidikan semakin baik pula kemampuan dan kualitas yang dimiliki seorang tenaga kerja.

Namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Tidak sedikit juga dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi pengangguran.

Secara umum penduduk bekerja di Kabupaten Buton Tengah masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah (termasuk yang tidak pernah sekolah dan yang tidak tamat SD). Dari tahun ke tahun tercatat lebih dari separuh penduduk bekerja merupakan lulusan SD /MI angka partisipasi murni yaitu sebesar 95,17 persen pada tahun 2021, dan 98,08 persen di tahun 2022. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan SD/MI tergolong tinggi di banding SMP dan SMA / sederajat. APK SD/MI tahun 2021 103,24 persen dan pada tahun 105,66 pada tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Fokus kesejahteraan sosial dilihat dari urusan kebudayaan, meliputi; jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian. Jumlah grup kesenian dan gedung kesenian pada tahun 2015 per 10.000 penduduk adalah 0.074%.

Fokus kesejahteraan sosial dilihat dari urusan kepemudaan dan olahraga, meliputi; Jumlah klub olahraga dan Jumlah gedung olah raga. Jumlah klub olahraga pada tahun 2015 per 10.000 penduduk adalah 0.65%. Sedangkan, selama ini Kabupaten Buton Tengah belum memiliki gedung olahraga yang terbangun.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK), merupakan indikator capaian ketersediaan pelayanan pendidikan yang dihitung berdasarkan jumlah seluruh peserta didik pada jenjang tertentu atas jumlah penduduk pada range jenjang tertentu. APK sesungguhnya menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang Pendidikan di Kabupaten Buton Tengah. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target utamanya pada jenjang PAUD akan dilakukan dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat. Berikut APK dan APM di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 menurut jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.27

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Buton Tengah
, Tahun 2020 dan 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Jenjang Pendidikan	APM			APK		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
SD/MI	92,32	95,17	98,08	102,54	103,24	105,66
SMP/MTs	88,39	88,07	88,24	99,14	103,57	104,8
SMA/SMK/MA	83,85	83,71	83,76	95,1	92,99	94,94

Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Angka Partisipasi Kasar per jenjang usia sekolah yaitu, usia SD, usia SMP/Sederajat, dan Usia SMA/Sederajat. Di Kabupaten Buton Tengah, APK pada tingkat SD pada tahun 2021 telah mencapai angka 103,24% dan meningkat 105,66% di tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi Kasar SD/Sederajat di Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2022 terdapat penduduk yang mengenyam/menamatkan bangku SD/Sederajat sudah cukup baik. Angka Partisipasi Kasar pada usia pendidikan menengah pertama setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, APK pada jenjang usia pendidikan menengah pertama pada usia 13-15 tahun mencapai angka 104.8%. Kondisi ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk pada tingkat SMP/ Sederajat di Kabupaten Buton Tengah sangat tinggi dan terdapat siswa yang bersekolah melampaui usia 15 tahun. Sedangkan pada tingkat partisipasi kasar penduduk Kabupaten Buton Tengah pada tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat pada tahun 2022 mencapai angka 94,94 %.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM), menunjukkan capaian ketersediaan pelayanan pendidikan yang dihitung berdasarkan Jumlah peserta didik pada range usia dan jenjang tertentu atas jumlah penduduk pada range jenjang tertentu. Berdasarkan table 29 tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi jumlah penduduk pada usia tertentu baik itu usia sekolah dasar (7-12 tahun), sekolah menengah pertama (13-15 tahun) maupun sekolah menengah atas (16-



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

18 tahun) belum bersekolah tepat waktu. APM pada tahun 2022 pada tingkat usia sekolah dasar hanya mencapai 98.08%, sedangkan pada tingkat menengah pertama mencapai 88.24% dan pada tingkat menengah atas mencapai 83.76%.

Untuk meningkatkan capaian di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyediakan fasilitas Pendidikan yang tersebar di seluruh wilayahnya. Pada tahun 2021, jumlah sarana dan prasarana yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan pada jenjang SD sampai SMA baik dibawah naungan Kemendiknas maupun Kementerian Agama sebanyak 189 sekolah, jumlah guru berstatus PNS maupun Non PNS sebanyak 2.644 orang dengan jumlah siswa 27.456 orang

Tabel 2.28

Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022/2023

No	Wilayah	SD			SMP/MTs			SMA/SMK		
		Jml SD	Jml Guru	Jml Siswa	Jml SMP	Jml Guru	Jml Siswa	Jml SMA	Jml Guru	Jml Siswa
1	Kec.Talaga Raya	10	101	1805	8	81	805	3	61	679
2	Kec. Mawasangka	27	291	4356	14	252	2075	10	189	1860
3	Kec. Mawasangka Tengah	11	128	1678	7	96	809	4	101	716
4	Kec. Mawasangka Timur	8	78	671	4	37	359	3	37	294
5	Kec. Lakudo	24	277	3518	12	234	1739	9	196	1770
6	Kec. Gu	20	215	2685	8	147	1260	6	156	1174
7	Kec. Sangia Wambulu	8	81	674	3	35	321	2	30	281
Total		108	1.171	15.387	55	877	7364	37	770	6774

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Tengah dan Kementerian Agama

Tabel 2.29

Perkembangan Rasio Murid-Guru, 2017-2021

Tahun	Rasio Murid-Guru		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
[1]	[2]	[3]	[4]
2017	18	11	12
2018	17	9	11
2019	14	9	9



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2020	15	9	9
2021	13	8	10

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Tengah

Selama kurun waktu 2017 hingga 2021, Rasio Murid-Guru pada jenjang SD terus mengalami penurunan yaitu hingga pada posisi rasio 13 untuk tahun 2021. Untuk jenjang SMP menunjukkan pula angka yang menurun. Tercatat 11 di tahun 2017 kemudian menjadi 9 di tahun 2018 dan stagnan hingga tahun 2020 kemudian menurun menjadi 8 di tahun 2021. Artinya, di tahun 2021 rata-rata seorang guru SMP/MTs mendidik 8 orang murid. Untuk jenjang SMA pada tahun 2018 Rasio Murid-Guru SMA tercatat turun menjadi 11 lalu turun kembali menjadi 9 di tahun 2019 dan stagnan hingga 2020, namun kemudian naik menjadi 10 pada tahun 2021.

Dari kurun waktu lima tahun terakhir, dapat dilihat bahwa rasio guru- muridnya semakin menurun. Artinya semakin efektif pula aktivitas belajar mengajar di Kabupaten Buton Tengah.

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah menjadi semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan, Imunitas Balita, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya.

Tabel 2.30. Persentase Baduta (Usia 0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI menurut Jenis Kelamin, 2018-2021

Jenis Kelamin	Anak Usia 0-23 Bulan yang Pernah Diberi ASI(%)			
	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Laki-Laki	99,31	98,92	99,24	94,46
Perempuan	97,66	100,00	98,91	100,00
Buton Tengah	98,83	99,33	99,07	97,28

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022

Tabel 2.30 menunjukkan bahwa dari Bayi di Bawah Dua Tahun (Baduta) di Kabupaten Buton Tengah yang pernah mendapatkan ASI ada sebanyak 97,28 persen. Hal ini berarti belum seluruh bayi mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Baduta laki-laki yang pernah diberi ASI lebih rendah dibandingkan Baduta perempuan. Baduta perempuan seluruhnya pernah diberi ASI.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.31 Persentase Balita (Usia 0-59 Bulan) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Karakteristik, 2021

Jenis Kelamin	Memiliki Kartu Imunisasi	Mendapat Imunisasi Lengkap
[1]	[2]	[3]
Laki-Laki	76,95	43,32
Perempuan	80,47	46,56
Buton Tengah	78,69	44,92

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022

Berdasarkan hasil Susenas 2021, balita yang memiliki kartu imunisasi masih berada pada angka 78,7 persen. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase balita perempuan yang memiliki kartu imunisasi lebih tinggi daripada persentase balita laki-laki yaitu 77 persen untuk balita laki-laki dan 80 persen untuk balita perempuan. Sedangkan balita yang mendapat imunisasi lengkap tidak sampai separuhnya yaitu sebesar 44,92 persen. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase balita perempuan yang mendapat imunisasi lengkap lebih tinggi daripada persentase balita laki-laki yaitu 43,32 persen untuk balita laki-laki dan 46,56 persen untuk balita perempuan.

Tabel 2.32

Persentase Balita (Usia 0-59 Bulan) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin, 2021

Jenis Imunisasi	Laki-Laki	Perempuan	Buton Tengah
[1]	[2]	[3]	[4]
BCG	77,37	73,05	75,23
DPT	76,16	72,29	74,25
Polio	77,02	72,80	74,94
Campak/MMR	69,41	70,12	69,76



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Hepatitis B	75,81	71,25	73,55
-------------	-------	-------	--------------

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara keseluruhan persentase balita perempuan yang pernah mendapat imunisasi lebih rendah daripada persentase balita laki-laki dan selisihnya cukup jauh. Misalnya untuk imunisasi BCG, persentase balita perempuan sebesar 73,05 persen sedangkan persentase balita laki-laki hanya sebesar 77,37 persen. Hanya imunisasi campak/MMR yang memiliki persentase lebih kecil untuk laki-laki yaitu 69,41 persen sedangkan perempuan 70,12 persen.

Tabel 2.33 Fasilitas Kesehatan Per Kecamatan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021

Kecamatan	Rumah Sakit			Poliklinik			Puskesmas			Pustu			Apotik		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Talaga.Raya	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	3	-	-	-
Mawasangka	-	-	-	-	-	-	3	3	3	5	5	5	-	1	-
Mawasangka Tengah	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	3	2	-	-	-
Mawasangka Timur	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	-	-	-
Lakudo	-	-	-	-	-	-	3	3	3	6	5	6	1	1	1
Gu	1	1	1	2	2	1	2	2	3	3	3	1	3	3	3
Sangia.wambulu	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
ButonTengah	1	1	1	2	2	1	13	13	14	23	23	20	4	5	4

Sumber: Kabupaten Buton Tengah dalam angka 2022

Berdasarkan tabel diatas jumlah fasilitas layanan kesehatan pada tahun 2022 berkurang pada pelayanan poliklinik, pustu dan apotik. Meskipun terjadi pengurangan jumlah tempat pelayanan namun disisi lain aktifitas – aktifitas



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat semakin massif digalakkan. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.34

Jumlah Posyandu dan Polindes berdasarkan Kecamatan
Di Kabupaten Buton Tengah

Kecamatan	Jumlah Posyandu		Polindes	
	2021	2022	2021	2022
Talaga Raya	10	10	-	0
Mawasangka	36	33	5	5
Mawasangka Tengah	18	18	-	0
Mawasangka Timur	13	13	3	3
Lakudo	27	27	7	6
Gu	24	24	1	4
Sangia Wambulu	10	10	1	4
Buton Tengah	138	135	17	22

Sumber : Kabupaten Buton dalam Angka 2023

Tabel 2.35

Jumlah Tenaga Kesehatan Per Kecamatan Di Kabupaten Buton Tengah 2022

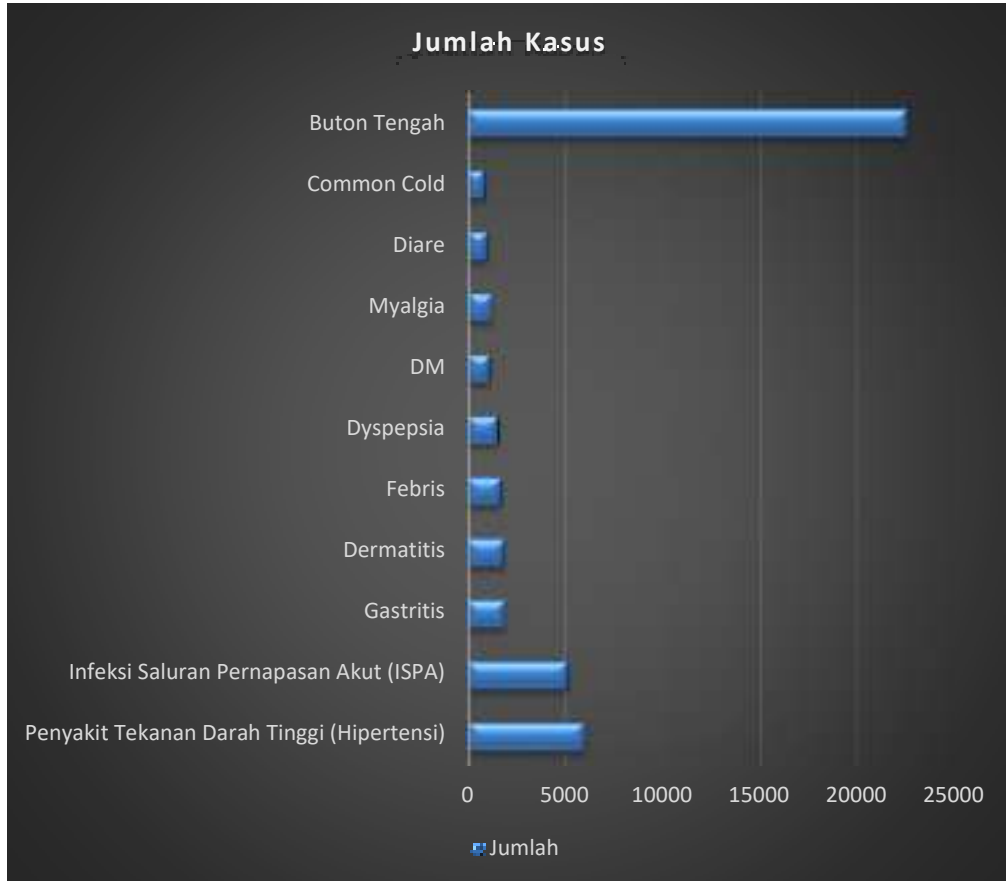
Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Talaga Raya	2	17	26	3	3
Mawasangka	4	62	64	7	9
Mawasangka Tengah	3	30	22	4	5
Mawasangka Timur	2	14	19	1	1
Lakudo	5	47	56	5	7
Gu	5	50	46	3	6
Sangia Wambulu	1	29	14	1	2
Buton Tengah	22	249	247	24	33

Sumber : Kabupaten Buton Tengah dalam Angka 2023



Grafik 2.7.

Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak Di Kab. Buton Tengah 2023



sumber : Kabupaten Buton Tengah dalam Angka 2023

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

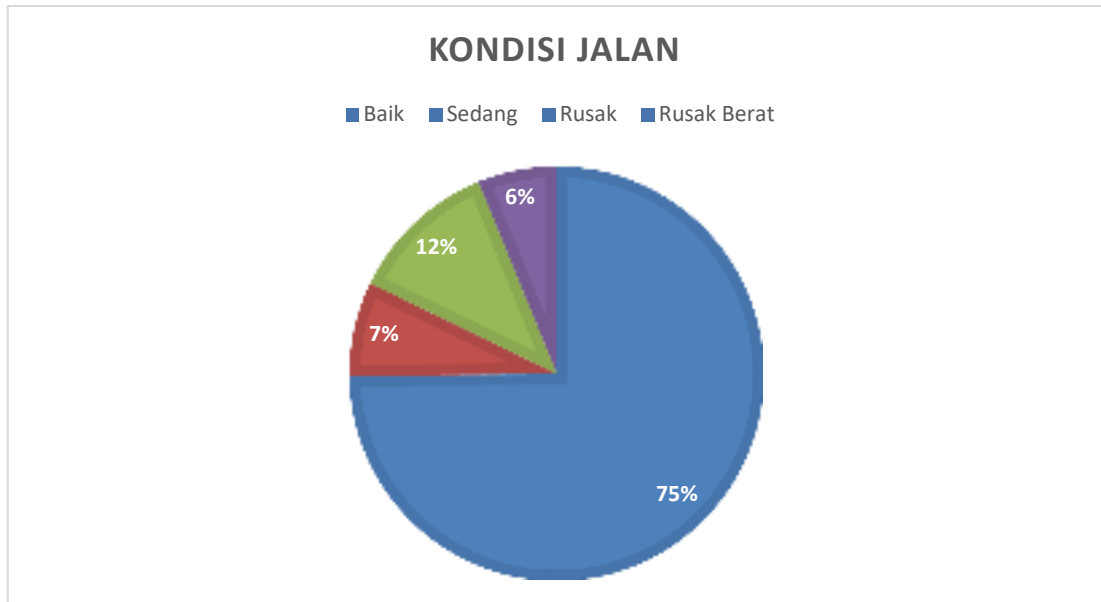
Sarana jalan di Kabupaten Buton Tengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sepanjang 284,96 km. Rasio panjang jalan dengan kondisi jalan baik mencapai 63 %, kondisi sedang 25 %, rusak ringan 10% dan rusak berat hanya sebesar 2 %.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Grafik 2.8

Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Buton Tengah
2022



Sumber: Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka 2023

Tabel 2.36.

Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya (km) di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022

Kecamatan	Pemerintah yang Berwenang Mengelola			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Talaga Raya	-	-	8,64	-
Mawasangka	-	-	81,75	-
Mawasangka Tengah	-	-	38,10	-
Mawasangka Timur	-	-	31,56	-
Lakudo	-	-	66,12	-
Gu	-	-	43,85	-
Sangia Wambulu	-	-	14,94	-

Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.37

Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan
Kabupaten Buton Tengah 2022

Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan			
	Aspal	Tidak Diaspal	Lainnya	Jumlah
Talaga Raya	5.04	3.6	-	8.64
Mawasangka	53.46	28.29	-	81.75
Mawasangka Tengah	23.1	15	-	38.1
Mawasangka Timur	27.46	2.8	1.3	31.56
Lakudo	55.9	8.92	1.3	66.12
Gu	31.78	10	2.07	43.85
Sangia Wambulu	14.94	0	-	14.94
Buton Tengah	211.68	68.61	4.67	284.97

Sumber: Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka 2023

Berdasarkan data RTRW Kabupaten Buton Tengah, bahwa terdapat beberapa potensi air baku permukaan di Kabupaten Buton Tengah yaitu sungai dan danau. Di Kabupaten Buton Tengah tidak terdapat banyak sungai, karena geologinya yang berasal dari Formasi Wapulaka. Namun diperkirakan banyak sungai-sungai bawah tanah yang dibuktikan sangat banyaknya gua yang berisi air pada daerah karts. Sungai terbesar di wilayah ini adalah Sungai Mawasangka yang terdapat pada perbatasan dengan wilayah Kab. Muna Barat. Aliran sungai ini dimanfaatkan pula untuk keperluan irigasi yang mengairi sawah di desa terapung kecamatan mawasangka. Sungai - sungai sedang dan kecil tersebar di setiap kecamatan. Sedangkan danau yang terdapat di Kabupaten Buton Tengah satu-satunya hanya di wilayah Kecamatan Mawasangka Timur yaitu Danau Pasibungi, dengan luas sekitar 73,6 ha. Danau tersebut terbentuk di wilayah dataran tanpa ada hubungannya dengan sungai, sehingga sifatnya asin, sehingga air di Danau pasibungi tidak bisa secara langsung di manfaatkan sebagai sumber air baku untuk keperluan air minum bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Mawasangka Timur.

Terkait pelayanan air minum, dari jumlah pelanggan air minum PDAM tahun 2021 sebanyak 12.459 Pelanggan dengan penggunaan air



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

sebanyak 744.497 m³. Cakupan persentase rumah tangga yang terlayani air minum setiap tahun semakin meningkat, namun dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan air minum tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pengelolaan pelayanannya

Tabel 2.38

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga tahun 2021

Jenis Sumber Air Minum	Kabupaten Buton Tengah	Provinsi Sulawesi Tenggara
Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	23.03	36.7
Leding	58.36	10.83
Sumur Bor/Pompa	0	14.79
Sumur Terlindung	9.52	16.7
Sumur Tak Terlindung	0.12	2.27
Mata Air Terlindung/ Mata Air Tak Terlindung	7.84	15.27
Air Permukaan	0	1.29
Air Hujan	1.13	2.15
Lainnya	0	0
Jumlah	100	100

Sumber : Sumber/Source : Susenas Maret 2021

Dalam hal kepemilikan bangunan, 83,15 persen bangunan merupakan bangunan milik sendiri. Sementara 16,85 persen bangunan yang ada di Kabupaten Buton Tengah bukan milik sendiri. Perhitungan ini memasukkan bangunan seperti rumah dinas dan rumah adat. Dalam hal kepemilikan bangunan, 83,15 persen bangunan merupakan bangunan milik sendiri. Sementara 16,85 persen bangunan yang ada di Kabupaten Buton Tengah bukan milik sendiri. Perhitungan ini memasukkan bangunan seperti rumah dinas dan rumah adat.

Tabel 2.39

Karakteristik Status Kepemilikan Bangunan Kabupaten Buton Tengah 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Karakteristik	Status Kepemilikan Bangunan		Jumlah
	Milik Sendiri	Bukan Milik	
1	2	3	4
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	82.83	17.17	100.00
Perempuan	84.75	15.25	100.00
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	87.79	1261	100.00
40 Persen Tengah	83.02	16.98	100.00
20 Persen Teratas	79.03	20.97	100.00
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD ke bawah	89.73	10.27	100.00
SMP ke atas	71.97	28.03	100.00
Buton Tengah	83.15	16.85	100.00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Buton Tengah 2022

Tabel 2.40

Jumlah Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Buton Tengah

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga		
	Jamban Sendiri	Jamban Bersama/Um	Tidak Ada
Gu	1.47	53	66
Sangia Wambulu	37	8	14
Lakudo	1.51	19	1.096
Mawasangka	1.19	23	1.994
Mawasangka Timur	38	13	31
Mawasangka Tengah	74	18	61
Talaga Raya	49	8	50
TOTAL	6.17	1.455	5.338

Sumber: Bappeda, diolah Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017

. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Secara umum, untuk menilai kinerja urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat dari cakupan rumah layak huni dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buton



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tengah. Rutilahu adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Dalam kurun waktu RPD 2023-2026 kinerja penanganan rumah tidak layak huni di kabupaten Buton Tengah sebagai berikut

Tabel 2.41

Proyeksi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Buton Tengah
Tahun 2019 - 2022

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah RTLH (Unit)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lakudo	3	1,300	1,270	851	808	766	723
2	Gu	4	1,415	1,387	1,324	1,258	1,192	1,125
3	Mawasangka	5	2,612	2,542	2,429	2,308	2,186	2,065
4	Mawasangka	2	1,145	1,131	327	311	294	278
5	Mawasangka Timur	1	1,001	990	378	359	340	321
6	Sangia Wambulu	1	912	904	409	389	368	348
7	Talaga Raya	2	1,203	1,176	772	733	695	656

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor 600/87.a/IV/2018 tentang lokasi penetapan Kawasan Kumuh di Kabupaten Buton Tengah ditetapkan luas areal Kawasan kumuh sebesar 67,27 Ha dengan kecamatan yang terluas memiliki Kawasan perkumuhan yaitu Kecamatan Gu seluas 20,91 Ha. Sedangkan luas Kawasan kumuh yang terkecil yaitu Kecamatan Sangia wambulu dengan luas 2,98 Ha. Untuk kecamatan lainnya luas Kawasan kumuh sebagai berikut yaitu Kecamatan Talaga Raya; 18,17 Ha, Kecamatan Lakudo; 7,74 Ha, Kecamatan Mawasangka; 12,94 Ha, Kecamatan Mawasangka Timur; 4,97 Ha

Direncanakan pada tahun 2017 - 2022 dilakukan perbaikan 4.072 unit Rutilahu dengan berbagai sumber pembiayaan pembangunannya. Direncanakan pada tahun 2017 - 2022 dilakukan perbaikan 4.072 unit Rutilahu dengan berbagai sumber pembiayaan pembangunannya.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.42

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Rumah 2019 (Unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Persentase RLH (%)	Persentase RTLH (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Lakudo	3,924	3,073	8	78.31%	21.69%
2	Gu	4,785	3,461	1,324	72.33%	27.67%
3	Mawasangka	x5,712	3,283	2,429	57.48%	42.52%
4	Mawasangka	2,500	2,173	3	86.92%	13.08%
5	Mawasangka	1,602	1,224	3	76.40%	23.60%
6	Sangia	1,410	1,001	4	70.99%	29.01%
7	Talaga Raya	2,	1,963	7	71.77%	28.23%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019

2.3.1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Hasil kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan dioptimalkannya sistem keamanan lingkungan secara mandiri melalui pengaktifan system keamanan lingkungan, pembinaan yang dilakukan oleh Polsek maupun Pos Polisi meskipun masih terdapat beberapa kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Gambaran kinerja pelayanan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 2.43

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal Yang Paling Sering Terjadi

Aparat Keamanan	Aparat Pemerintah	Tokoh Masyarakat	Tokoh Agama	Lainnya	Tidak ada Inisiator



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

4	0	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Sumber: Pendataan Potensi Desa 2018

Tabel 2.44

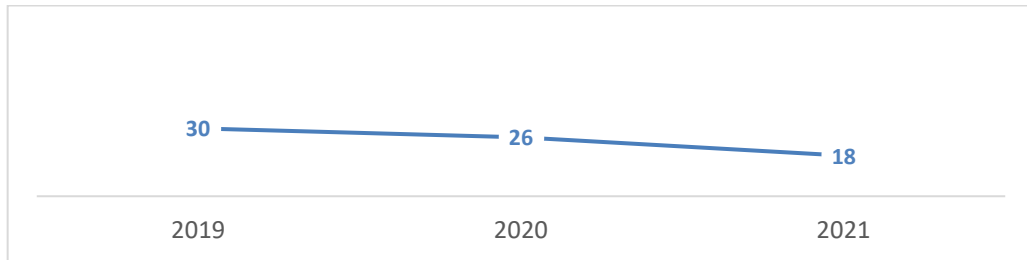
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Perkelahian Massal Yang Terjadi Selama Setahun Terakhir

Antar Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat Antar Desa/Kelurahan	Kelompok Masyarakat dengan Aparat Keamanan	Kelompok Masyarakat dengan Aparat Pemerintah	Pelajar/Mahasiswa	Antar Suku
3	1	0	0	0	0

Sumber: Pendataan Potensi Desa 2018

Grafik 2.9.

Jumlah Tindak Pidana Di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 – 2021



Sumber: Kabupaten Buton tengah Dalam angka Tahun 2022

Masalah lainnya juga yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah adalah masalah bencana dengan ditimbulkannya

kerugian akibat bencana yang terjadi terutama kerugian material. Untuk itu perlu upaya pemerintah untuk lebih mengoptimalkan sistem peringatan dini terhadap bencana yang diterapkan di masyarakat. Dengan dioptimalkannya sistem peringatan dini terhadap bencana melalui berbagai macam kegiatan di masyarakat, diharapkan akan semakin meminimalkan dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana di Kabupaten Buton Tengah

2.3.1.6. Urusan Sosial

Sampai pada tahun 2015, Kabupaten Buton Tengah belum memiliki sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Buton Tengah, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 798 orang, sedangkan jumlah anak terlantar sebanyak 8.674 orang, sedangkan jumlah lanjut usia sebanyak 8.235 orang dan lanjut usia terlantar sebanyak 7.263 orang. Jumlah Penerima data keluarga penerima manfaat (KPM) dan program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 sebanyak 1.267 PKM dan pada tahun 2017 sebanyak 3.159 PKM.

Tabel 2.45

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buton Tengah Tahun Tahun 2016

No.	Nama Kecamatan	Jenis Kecacatan				Jumlah
		Tuna Netra	Tuna Rungu	Cacat Tubuh	Cacat Mental	
1	Kec. Sangia Wambulu	18	29	21	13	81
2	Kec. Gu	24	19	20	24	87
3	Kec. Lakudo	23	59	103	197	382
4	Kec. Mawasangka Timur	11	45	4	7	67
5	Kec. Mawasangka Tengah	13	21	17	24	75
6	Kec. Mawasangka	9	17	30	19	75
7	Kec. Talaga Raya	5	6	13	7	31
Jumlah		103	196	208	291	798

Sumber data : Dinas Sosial Kab. Buton Tengah

Tabel 2.46

Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Buton Tengah Tahun Tahun 2016

No.	Kecamatan	Anak Terlantar (Orang)	Lanjut Usia (Orang)	Lanjut Usia Terlantar (Orang)
1	Kec. Gu	0	1,597	1,425
2	Kec. Sangia Wambulu	734	407	329
3	Kec. Lakudo	0	2,276	2,061
4	Kec. Mawasangka	3,472	2,230	2,002
5	Kec. Mawasangka Timur	2,010	472	383



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

No.	Kecamatan	Anak Terlantar (Orang)	Lanjut Usia (Orang)	Lanjut Usia Terlantar (Orang)
6	Kec. Mawasangka Tengah	668	443	355
7	Kec. Talaga Raya	1,790	810	708
Jumlah		8,674	8,235	7,263

Sumber data : Dinas Sosial Kab. Buton Tengah

Tabel 2.47

Jumlah Program Keluarga Harapan Kabupaten Buton Tengah Pada Tahun 2017

No.	Kecamatan	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Kec. Gu	186	429
2	Kec. Sangia Wambulu	455	702
3	Kec. Lakudo	283	693
4	Kec. Mawasangka	-	431
5	Kec. Mawasangka Timur	121	231
6	Kec. Mawasangka Tengah	87	327
7	Kec. Talaga Raya	135	346
Jumlah		1.267	3.159

Sumber data : Dinas Sosial Kab. Buton Tengah

2.3.2. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

2.3.2.1. Urusan Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak

meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja di Buton Tengah adalah 61.106 jiwa yang terdiri dari 39.943 angkatan kerja atau sekitar 64,37 % dan sisanya sebanyak 21.163 bukan angkatan kerja atau sekitar 34,63 %. Ditinjau dari jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki lebih sedikit daripada penduduk usia kerja perempuan namun jumlah angkatan kerjanya lebih banyak daripada perempuan. Dari total penduduk usia kerja laki-laki, 71, 44% terjun ke dunia kerja sementara perempuan hanya sebesar 55,19 % dari penduduk usia kerjanya. Hal ini karena 44,18 % tergolong dalam bukan angkatan kerja dan 31,63 % perempuan usia kerja hanya mengurus rumah tangga tanpa ada pekerjaan lainnya.

Tabel 2.48.

**Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas dan Jenis Kelamin,
Tahun 2020**

Kegiatan Utama	Laki-laki		Perempuan		Buton Tengah	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Angkatan Kerja	21.397	76,75	18.546	55,82	39.943	65,37
Bekerja	19.917	71,44	18.339	55,19	38.256	62,61
Pengangguran	1.480	5,31	207	0,62	1.687	2,76
Bukan Angkatan Kerja	6.483	23,25	14.680	44,18	21.163	34,63
Sekolah	2.446	8,77	3.000	9,03	5.446	8,91
Mengurus Rumah Tangga	1.390	76,75	10.511	31,63	11.901	65,37
Lainnya	2.647	9,49	1.169	3,52	3.816	6,24
Jumlah	27.880	100	33.226	100	61.106	100
T P A K	76,75		55,82		65,37	
T P T	6,92		1,12		4,22	

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja disuatu daerah. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Semakin tinggi nilai TPAK nya semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja didalam pasar kerja.

2.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran kinerja pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Buton Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut: Data angka jumlah partisipasi perempuan Pegawai Negeri Sipil di Dinas/Instansi Pemerintahan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1.076 orang dibandingkan dengan jumlah PNS Laki – laki sebanyak 1.915 orang.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah tahun 2020 sebanyak 25 orang. Dengan komposisi: Fraksi Partai PDI-P sebanyak 8 orang, Partai Nasdem dan PAN masing-masing sebanyak 4 orang, Partai PKB dan PKS masing-masing 2 orang, Partai Gerindra, PPP, Demokrat, Golkar, dan PBB masing-masing sebanyak 1 orang. Dari Jumlah Anggota DPR sebanyak 25 Orang keterwakilan dan partisipasi perempuan hanya 6 orang yang berasal dari Partai PDI Perjuangan sebanyak 3 Orang, Partai Nasdem 1 orang, Partai PAN 1 orang dan Partai Golkar sebanyak 1 Orang.

Jumlah KDRT di Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2020 adalah 4 kasus dengan rasio 0,0124%. Meskipun angka secara keseluruhan relatif kecil namun berdasarkan data perkecamatan, jumlah kasus terbanyak ternyata terjadi di Kecamatan Mawasangka Timur yaitu sebanyak 3 kasus dengan rasio 0,128. Angka ini cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yang pada umumnya tidak terdapat kasus KDRT. Berdasarkan data dari Polres Bau-Bau, hanya terdapat 4 kasus KDRT yang terjadi dari 32.236 rumah tangga di Kabupaten Buton Tengah. Hal ini mengindikasikan peran positif pemerintah dalam menekan angka KDRT di awal pemerintahan.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.49 IDG, IPG, Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Keterlibatan Perempuan diparlemen Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	Indeks Pembangunan Gender(%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional(%)	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen(%))
2018	70.08	71,43	40,68	12.00
2019	80.20	80,15	24,00	12.00
2020	81.29	80,57	59,03	24.00
2021	80.73	81,48	48,44	24.00
2022	80.51	83,01	61,99	24.00

Sumber : BPS Profinsi Sulawesi Tenggara

2.3.2.3. Urusan Pangan

Hasil perhitungan IKP 2021 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. indeks ketahanan pangan wilayah Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2021 sebesar 73,83 %

ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

2.3.2.4. Urusan Pertanahan

2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Gambaran Kinerja Pelayanan Urusan Lingkungan Hidupn Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan lahan kabupaten buton tengah menurut kecamatan tahun 2021, penggunaan lahan terbesar berada kecamatan Mawasangka sebesar 26.955 Hektar. Sedangkan

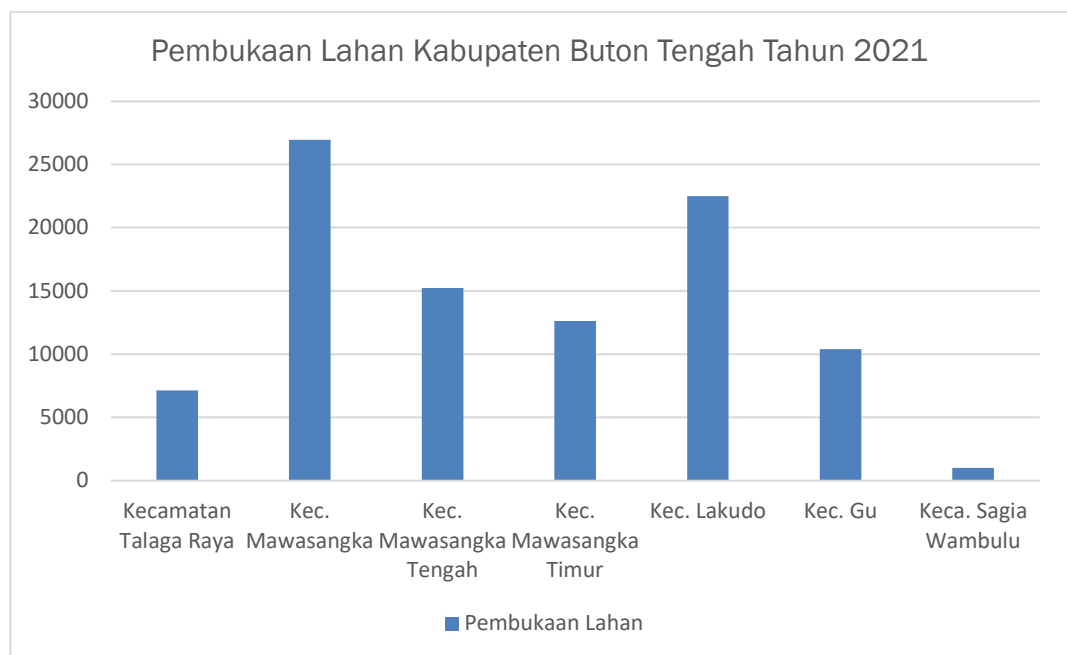


PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

lahan terkecil yaitu pada kecamatan Sangia Wambulu sebesar 1.000 Hektar. Selisih yang cukup besar antara kecamatan Mawasangka dengan Sangia Wambulu sejalan dengan besarnya luas wilayah masing-masing kecamatan.

Grafik 2.10 Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah (Hektar), 2021



Sumber : Sumber Statistik Pembukaan Lahan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022

2.3.2.6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran kinerja pelayanan urusan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan penduduk dibedakan berdasarkan jenis kelamin; dan persebaran penduduk/geografis di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.50

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	Presentase Penduduk	Kepadatan Per Km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Talaga Raya	13 597	2,70	11,44	151,9	103,46
Mawasangka	29 940	1,83	25,18	130,7	97,82
Mawasangka Tengah	13 280	2,38	11,17	108,9	100,54
Mawasangka Timur	6 287	1,47	5,29	67,3	92,44
Lakudo	27 430	1,71	23,07	134,3	100,75
Gu	22 398	2,16	18,84	240,6	101,42
Sangia Wambulu	5 972	0,78	5,02	1010,5	99,47
Buton Tengah	118 904	1,95	100,00	142,0	99,89

Sumber : Sumber: Kabupaten Buton Tengah dalam Angka, 2023

Jumlah penduduk dan jenis kelamin sebagaimana yang tergambar pada table di bawah. Data tersebut menjelaskan rasio jenis kelamin tertinggi ada di kecamatan Talaga Raya dengan nilai rasio 103,46 . Sedangkan kecamatan yang terendah rasio berdasarkan jenis kelamin adalah Mawasangka Timur dengan nilai rasio 92,44.

2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku dan melekat selamanya pada setiap penduduk dari lahir hingga setelah meninggal dunia. NIK penduduk yang meninggal dunia tidak dapat dialihkan atau dipakai lagi oleh orang lain, sehingga NIK menjadi nomor identitas



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

tunggal yang berperan sebagai kunci akses setiap penduduk untuk mendapatkan berbagai layanan publik.

Di Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2021, penduduk yang sudah memiliki NIK sebanyak 99,76 persen untuk kelompok umur 5 tahun ke atas, dan 99,74 persen untuk kelompok umur 17 tahun ke atas. Bila ditinjau dari jenis kelamin, kepemilikan NIK penduduk perempuan lebih kecil jika dibandingkan penduduk laki-laki, untuk kelompok umur 5 tahun ke atas dan lebih besar untuk kelompok umur 17 tahun ke atas. Dengan angka yang mendekati seratus persen menandakan kesadaran masyarakat akan kepemilikan NIK sudah cukup besar dan perlu ditingkatkan sedikit lagi agar semua penduduk di kabupaten Buton Tengah terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Kelompok dengan persentase tertinggi yang memiliki NIK adalah penduduk laki-laki kelompok umur 5 tahun ke atas dan penduduk perempuan berumur 17 tahun ke atas yaitu sebanyak 99,76 persen.

Tabel 2.51

Jumlah Penduduk yang telah memiliki E-KTP Kabupaten Buton Tengah
Tahun 2021

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	
	5 Tahun ke Atas	17 Tahun ke Atas
[1]	[2]	[3]
Laki-Laki	99,76	99,68
Perempuan	99,75	99,76
Buton Tengah	99,76	99,74

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah

- Menurut status perkawinan, sebagian besar penduduk Kabupaten Buton Tengah berumur 10 tahun keatas berstatus kawin, yaitu 54,77 persen. Kemudian berstatus belum kawin sebanyak 37,33 persen, dan sisanya sebanyak 7,90 persen penduduk Buton Tengah pada tahun 2021 berstatus cerai. Dilihat dari jenis kelaminnya, penduduk laki-laki Kabupaten Buton Tengah usia 10 tahun keatas masih berstatus belum



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

kawin sebanyak 43,16 persen, lebih tinggi dibanding persentase penduduk perempuan belum kawin. Kemudian penduduk laki-laki berstatus kawin sebanyak 54,95 persen. Sedangkan penduduk perempuan Kabupaten Buton Tengah usia 10 tahun keatas yang masih berstatus belum kawin sebanyak 32,38 persen, berstatus kawin sebanyak 54,60 persen, dan sisanya berstatus cerai yaitu sebanyak 13,02 persen. Persentase perempuan berstatus cerai naik dibanding tahun 2020 yang sebesar 9 persen. Persentase laki-laki belum kawin dan kawin lebih banyak dibandingkan persentase perempuan.

Tabel 2.52

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2021

Jenis Kelamin	Status Perkawinan		
	Belum Kawin	Kawin	Cerai
[1]	[2]	[3]	[4]
Laki-Laki	43,16	54,95	NA
Perempuan	32,38	54,60	13,02
Buton Tengah	37,33	54,77	7,90

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022

- Di Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2021, penduduk berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran sebanyak 92,25 persen. Jika dilihat dari jenis kelaminnya, penduduk laki-laki berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran sebanyak 91,59 persen dan penduduk perempuan sebanyak 92,92 persen. Jika dilihat dari pendidikan tertingginya, penduduk 0-17 tahun dengan pendidikan tertinggi SD yang memiliki akta kelahiran sebanyak 90,86 persen, lebih rendah dibanding yang berpendidikan SMP ke atas yaitu sebanyak 94,00 persen.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.53

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun Yang Memiliki akta Kelahiran menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi, 2021

Karakteristik	Memiliki Akta Kelahiran
[1]	[2]
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	91,59
Perempuan	92,92
Pendidikan Tertinggi	
SD ke bawah	90,86
SMP ke atas	94,00
Buton Tengah	92,25

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022

2.3.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.54 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Talaga Raya	6 914	6 683	13 597	103,46
Mawasangka	14 805	15 135	29 940	97,82
Mawasangka Tengah	6 658	6 622	13 280	100,54
Mawasangka Timur	3 020	3 267	6 287	92,44
Lakudo	13 766	13 664	27 430	100,75
Gu	11 278	11 120	22 398	101,42
Sangia Wambulu	2 978	2 994	5 972	99,47
Buton Tengah	59 419	59 485	118 904	99,89

Sumber : Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2023

2.3.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah menganjurkan program Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat Kabupaten Buton Tengah. Secara umum, indikator



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

sasaran atas gambaran kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat dilihat dari meningkatnya peserta KB aktif.

Tabel 2.55

Jumlah Pasangan Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif			
			IUD	MOW	MOP	KONDOM
1	Talaga Raya	1.846	-	0	0	0
2	Mawasangka	4.409	14	0	0	375
3	Mawasangka Tengah	1.810	3	11	17	139
4	Mawasangka Timur	818	0	2	0	79
5	Lakudo	3.735	7	10	2	145
6	Gu	3.067	16	25	1	5
7	Sangiawambulu	1.143	0	2	0	43
Buton Tengah		16.828	40	50	20	786

Sumber: Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka, 2020

2.3.2.9. Urusan Perhubungan

Dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, beberapa indicator yang digunakan untuk melihat kinerja pelayanan urusan perhubungan Kabupaten Buton Tengah sebagai berikut :

Adapun jumlah kunjungan kapal pada tahun 2018-2020 sebanyak 9467 kali, adapun jumlah penumpang yang turun sebanyak 185.268 orang, sedangkan jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 180.352 orang. Aktifitas bongkar muat di pelabuhan atau dermaga Kabupaten Buton Tengah.

Tabel 2.56

Kunjungan Kapal, Arus Barang, dan Penumpang menurut Kabupaten Buton Tengah 2018-2020

Tahun	Kunjungan Kapal	Penumpang		Barang (ton)	
		Turun	Berangka	Bongkar	Mua



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2018-2020	9467	185.268	180.352	232.344	4.014.819.211
-----------	------	---------	---------	---------	---------------

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara. 2020

Jumlah kendaraan di Kabupaten Buton Tengah, mobil penumpang berjumlah 45 unit. Kecamatan terbanyak yang memiliki mobil penumpang adalah kecamatan Mawasangka dengan 24 unit.

Tabel 2.57

Jumlah Angkutan Umum yang terdaftar pada Dinas Perhubungan
Menurut

No	Kecamatan	Mobil Penumpang
1	Talaga Raya	0
2	Mawasangka	24
3	Mawasangka Tengah	0
4	Mawasangka Timur	0
5	Lakudo	15
6	Gu	6
7	Sangia Wambulu	0
Buton Tengah		45

Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka, 2022

2.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Jika dilihat dari jumlah anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas, maka sebanyak 87,81 persen penduduk di Kabupaten Buton Tengah telah menggunakan telepon seluler (HP)/nirkabel atau computer (PC),/desktop, laptop/notebook, tablet. Sedangkan sisanya belum menggunakan. Hampir seluruh penduduk kuintil pengeluaran 40 persen teratas dan 20 persen teratas menggunakannya. Dengan yang terbanyak adalah kelompok penduduk kuintil 20 persen teratas yaitu sebanyak 97,63 persen. Ini membuktikan bahwa semakin banyak pengeluaran ART, penggunaan teleponnya semakin tinggi.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, laki-laki yang menggunakan telepon seluler/komputer/ laptop sebanyak 87,83 persen hampir sebanding dengan perempuan yaitu sebanyak 87,80 persen. Sedangkan jika dilihat dari pendidikan tertingginya, ART yang memiliki pendidikan tertinggi SMP ke atas hampir seluruhnya menggunakan yaitu sebesar 99,17 persen. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula penggunaan teknologi. Pada tahun 2019, persentase ART Kabupaten Buton Tengah yang telah memiliki telepon seluler/nirkabel sebanyak 51,14 persen. Polanya hampir sama

dengan ART yang menggunakan telepon seluler/komputer/laptop, yaitu semakin tinggi kuintil pengeluaran maka semakin tinggi yang memiliki dan jika dilihat dari pendidikannya maka yang SMP ke atas lebih tinggi. Sedangkan persentase ART yang mengakses internet melebihi seperempat penduduk (29,63 persen).

Tabel 2.58.

Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun Ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi, Buton Tengah Tahun 2020

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler, Komputer, Laptop	Mengakses Internet	Menggunakan Telepon Seluler, Komputer, Laptop	Mengakses Internet	Menggunakan Telepon Seluler, Komputer, Laptop	Mengakses Internet
	2020		2021		2022	
Jenis Kelamin						
Laki-laki	87,83	24,02	79,18	44,77	87,62	58,52
Perempuan	87,8	36,13	71,15	48,29	86,69	53,56
Kuintil Pengeluaran						
40 Persen Terbawah	75,42	14,45	76,58	46,46	80,87	50,69
40 Persen Tengah	94,13	34,41	76,83	42,02	89,45	60,82
20 Persen Teratas	97,63	47,92	82,98	49,55	94,84	50,69
Pendidikan Tertinggi						
SD ke bawah	77,93	7,22	77,76	38,18	84,76	50,79



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler, Komputer, Laptop	Mengakses Internet	Menggunakan Telepon Seluler, Komputer, Laptop	Mengakses Internet	Menggunakan Telepon Seluler, Komputer, Laptop	Mengakses Internet
	2020		2021		2022	
SMP ke atas	99,17	55,36	78.45	55.18	91.46	70.53
Buton Tengah	87,81	29,63	78.05	45.29	87.19	57.94

Sumber : Statistik Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023

Table 2.59 Banyaknya Desa1/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler, 2021

Kabupaten/Kota	2021			
	4G/LTE	3G/H/H+/EVDO	2,5G/E/GPRS	Tidak Ada
Buton Tengah	63	9	5	-
Sulawesi Tenggara	1 717	330	84	100

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

2.3.2.11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambaran kinerja pelayanan urusan koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Buton Tengah tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.60

Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, Tahun 2018-2021

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021
1	Talaga Raya	2	2	3	3
2	Mawasangka	4	4	5	5
3	Mawasangka Tengah	2	2	2	2
4	Mawasangka Timur	-	-	-	-
5	Lakudo	5	5	4	4
6	Gu	4	4	4	4
7	Sangia Wambulu	-	-	-	-
Buton Tengah		17	17	18	18

Sumber : Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2.3.2.12. Urusan Penanaman Modal

Berdasarkan data investasi dari BPS Kabupaten Sulawesi Tenggara selama rentang tahun 2017-2019 belum ada investor PMDN/PMA di Kabupaten Buton Tengah. Adapun jumlah PMA di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 adalah Rp 2.574.029.207.812,- dan PMDN adalah Rp. 974.707.543.

Tabel 2.61

Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016 - 2019

Tahun	PMDN (Rp)	PMA (\$)
2017	2.470.217.864.093,00	371.169.808,42
2018	2.573.684.782.266,00	831.068.223,66
2019	1.667.106.616.858,00	719.631.215,00
2020 (Trw 1 dan 2)	2.574.029.207.812,00	974.707.543,00

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021

2.3.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran Kinerja Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah melakukan pembinaan kegiatan kepemudaan dan olahraga melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka), penyelenggara aubade, penyelenggara upacara bendera, penyelenggara pemuda produktif dan kegiatan pemuda pelopor. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi guna meningkatkan kualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan daerah di Kabupaten Buton Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2. Sampai pada tahun 2022, Sarana dan Prasarana olahraga (GOR) di Kabupaten Buton Tengah belum tersedia di Kabupaten Buton Tengah, selain itu fasilitas olah raga lainnya masih sangat terbatas

2.3.2.14. Urusan Statistik

Gambaran kinerja pelayanan urusan statistik Kabupaten Buton Tengah tahun 2021-2022 meningkat dengan diterbitkannya dokumen/buku statistic sebagai berikut:

- a. Kabupaten Buton Tengah dalam Angka Tahun 2022.
- b. Statistik Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022.
- c. Profil Kabupaten Buton Tengah yang berjudul: Buton Tengah: Negeri Seribu Gua yang berisi selayang pandang, sejarah dan potensi daerah Kabupaten Buton Tengah.
- d. Data statistik pada semua kecamatan yang terdiri dari:
 - Kecamatan Gu Dalam Angka 2022
 - Kecamatan Lakudo Dalam Angka 2022
 - Kecamatan Mawasangka Dalam Angka 2022
 - Kecamatan Mawasangka Tengah Dalam Angka 2022
 - Kecamatan Mawasangka Timur Dalam Angka 2022
 - Kecamatan Sangia Wambulu Dalam Angka 2022
 - Kecamatan Telaga Rauh Dalam Dalam Angka 2022
 - Statistik Daerah Kecamatan Gu 2022
 - Statistik Daerah Kecamatan Lakudo 2022
 - Statistik Daerah Kecamatan Mawasangka 2022
 - Statistik Daerah Kecamatan Mawasangka Tengah 2022
 - Statistik Daerah Kecamatan Mawasangka Timur 2022
 - Statistik Daerah Kecamatan Sangia Wambulu 2022
 - Statistik Daerah Kecamatan Telaga Raya 2022

Kinerja Urusan Statistik diprediksikan hingga tahun 2022 akan meningkat khususnya terjadi perkembangan penyediaan data statistik dan



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

informasi daerah sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan, serta dokumen statistik bagi kalangan dunia usaha dan masyarakat. Manajemen penyimpanan data secara elektronik semakin meningkat seiring dengan penggunaan sistem informasi manajemen di berbagai bidang pembangunan.

Penyediaan data statistik juga mengalami kemajuan, tidak terbatas pada data manual, tapi juga dalam bentuk data digital, sehingga mempermudah proses akan memudahkan kalangan dunia usaha dan masyarakat semakin mudah mengakses data dan informasi tentang pembangunan daerah. Dengan kemajuan tersebut, diperkirakan validitas dan kemutakhiran data semakin meningkat, sehingga dapat menjamin ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas. Jenis dokumen statistik yang tersusun di Kabupaten Buton Tengah diperkirakan juga akan semakin bervariasi, sesuai dengan keperluan pada masing-masing urusan kewenangan daerah.

2.3.2.15. Urusan Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi.

2.3.2.16. Urusan Kebudayaan

Gambaran kinerja pelayanan urusan kebudayaan Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut:

2. Beberapa kekayaan budaya dan peninggalan masa lalu yang saat ini sedang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah adalah Benteng Bombanawili di Kecamatan Lakudo dan Benteng Watulea di kecamatan Gu. Benteng Baruta dan Makam Sangia Wambulu di kecamatan Sangia Wambulu, Benteng Boneoge, Benteng Lakudo, dan Makam Kijula di Kecamatan Lakudo, Benteng



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Wasilomata, Benteng Watumotobe, Benteng Lasaidewa, Baruga Wasiomata, Benteng Matana Sorumba dan Senjata Laras Panjang di Kecamatan Mawasangka, Benteng Lagili dan Benteng Mawasangka Gau di Kecamatan Mawasangka timur dan Benteng Kooe di kecamatan Mawasanga tengah, dan Tugu pemasangan Bendera Merah Putih Pertama di Lombe Kecamatan Gu.

3. Tradisi yang saat ini sedang dikembangkan potensinya adalah Pesta Adat Pekande-kandea di Desa Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu, Tradisi Kariya (pingitan) di Lakudo/Gu dan Tradisi Kamoo-moose di Lakudo, Tradisi Bongkaana Tao (pesta panen) di Mawasangka, serta beberapa tari-tarian yakni Tari Linda, Tari La Naga dan Tari Mangaru.

2.3.2.17. Urusan Perpustakaan

Pada Urusan Perpustakaan perkembangannya ditunjukkan pada selama tahun 2017 hingga 2022 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan semakin meningkat. Saat ini jumlah gedung perpustakaan di Kabupaten Buton Tengah terdapat 2 gedung yaitu di Kecamatan Gu dan Kecamatan Mawasangka.

2.3.2.18. Urusan Kearsipan

Pada urusan Kearsipan yaitu Pengelolaan arsip secara baku dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan. Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Buton Tengah belum dilaksanakan secara terstruktur.

2.3.3. Fokus Urusan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Gambaran kinerja pelayanan urusan perikanan dan kelautan Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

1. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2022 sebanyak 3.628 Rumah Tangga.
2. Hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2022 sebanyak 20.322,42ton. sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 59,156.15 ton. Untuk Tahun 2016 belum tersedia data.
3. Jumlah Rumah Tangga perikanan budi daya di Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2022 terdiri dari budidaya laut sebanyak 1.822 rumah tangga, budidaya tembak sebanyak 62 rumah tangga dan budidaya keramba sebanyak 100 rumah tangga dan rumah tangga dan budidaya kolam sebanyak 1 rumah tangga. Jadi untuk keseluruhan masyarakat budidaya sebanyak 1.985 rumah tangga.
4. Tahun jumlah rumah tangga dengan perikanan tangkap berjumlah 3.628. Mayoritas berada di Kecamatan Mawasangka dengan jumlah petani 930. Jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Mawasangka Tengah 247 rumah tangga.

Tabel 2.62

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Buton Tengah, 2022

Kecamatan	Perairan Laut	Perairan Umum	Jumlah
Talaga Raya	521	-	521
Mawasangka	930	-	930
Mawasangka Tengah	247	-	247
Mawasangka Timur	297	-	297
Lakudo	826	-	826
Gu	543	-	543
Sangi Wambulu	264	-	264
Buton Tengah	3 628	-	3 628

Sumber: Kabupaten Buton Tengah dalam Angka, 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.63

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Buton Tengah, 2022

Kecamatan	Perairan Laut	Perairan Umum	Jumlah
Talaga Raya	2 537,28	-	2 537,28
Mawasangka	6 401,34	-	6 401,34
Mawasangka Tengah	1 202,89	-	1 202,89
Mawasangka Timur	1 446,39	-	1 446,39
Lakudo	4 804,42	-	4 804,42
Gu	2 644,42	-	2 644,42
Sangi Wambulu	1 285,68	-	1 285,68
Buton Tengah	20 322,42	-	20 322,42

Sumber: Kabupaten Buton Tengah dalam Angka, 2023

Tabel 2.64

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Buton Tengah, 2022

Kecamatan	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Keramba Jaring Apung	Jumlah
Talaga Raya	25	-		3	28
Mawasangka	1 038	62		7	1 107
Mawasangka Tengah	111	-		15	126
Mawasangka Timur	209	-		15	224
Lakudo	206	-	1	56	263
Gu	153	-		-	153
Sangi Wambulu	80	-		4	84
Buton Tengah	1 822	62	1	100	1 985

Sumber: Kabupaten Buton Tengah dalam Angka, 2023

2.3.3.2. Urusan Pariwisata

Gambaran kinerja pelayanan urusan pariwisata Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 terdapat wisatawan dalam negeri sebanyak 26 985 orang sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 45 orang.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2. Pada tahun 2022 jumlah objek wisata yang ada yaitu objek wisata budaya sebanyak 10 lokasi, wisata tahunan sebanyak 7 lokasi, obyek wisata sejarah 4 lokasi, obyek wisata bahari 16 lokasi, obyek wisata alam sebanyak 24 obyek.
3. Jumlah restoran dan rumah makan pada tahun 2019 terdapat 43 restoran dan rumah makan dan mengalami penurunan jumlah pada 2022 menjadi 36 restoran dan rumah makan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.65

Jumlah Rumah Makan/Restoran menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, 2019-2022

Kecamatan	2019	2020	2021	2022
Talaga Raya	3	6	5	5
Mawasangka	12	14	6	6
Mawasangka Tengah	7	8	5	5
Mawasangka Timur	-	-	-	-
Lakudo	9	10	8	8
Gu	12	13	12	12
Sangi Wambulu	-	-	-	-
Buton Tengah	43	51	36	36

Sumber: Kabupaten Buton Tengah dalam Angka, 2023

Tabel 2.66

Jumlah Akomodasi Hotel menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, 2021-2022

Kecamatan	Hotel		Kamar		Tempat Tidur	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Talaga Raya	-	1	-	5	-	5
Mawasangka	1	5	20	34	20	34
Mawasangka Tengah	-	1	-	10	-	10
Mawasangka Timur	-	-	-	-	-	-
Lakudo	2	2	30	30	34	30
Gu	-	3	-	27	-	27
Sangi Wambulu	-	-	-	-	-	-
Buton Tengah	3	12	50	106	54	106

Sumber: Kabupaten Buton Tengah dalam Angka, 2023

2.3.3.3 Urusan Pertanian



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Gambaran kinerja pelayanan urusan pertanian Kabupaten Buton Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Luas panen padi jambu mete dikabupaten Buton Tengah seluas 12.773 Hektar pada tahun 2022 dengan jumlah produksi sebanyak 343.01 ton.
2. Produksi Kelapa/Kopra di Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2022 sebanya 992.92 ton dengan luar area tanaman sebanyak 1.567,5 hektar.
3. tanaman sayuran Kabupaten Buton Tengah khusus untuk bayam sebanyak 34,20 ton, cabai sebanyak 54,70 ton, kacang panjang sebanyak 18,60 ton sedangkan ketimun sebanyak 30,30 ton.
4. Luas areal perkebunan mete Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2020 sebesar 12.864 ha yang tersebar pada tujuh kecamatan dengan kapasitas produksi 2.465,68 ton.

Tabel 2.67

Luas areal tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ha) di Kabupaten Buton Tengah, 2021 dan 2022

Kecamatan	Jambu Mete		Kelapa		Pala	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Talaga Raya	145	145	118	118	-	-
Mawasangka	3 689	3 678	1 068	1 057	75	65
Mawasangka Tengah	1 758	1 736	31	35	-	-
Mawasangka Timur	988	981	36	36	-	-
Lakudo	3 787	3 743	243	246	-	-
Gu	2 425	2 419	81	70	13	-
Sangi Wambulu	72	71	7	5,5	-	-
Buton Tengah	12 864	12 773	1 584	1 567,5	88	65

Sumber: Kabupaten Buton Tengah dalam Angka, 2023

2.3.3.4 Urusan Perdagangan

Gambaran kinerja pelayanan urusan perdagangan Kabupaten Buton Tengah tahun 2017-2020 dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Tengah dimana sektor perdagangan meningkat dari 4,53% pada tahun 2018 menjadi 8,63% pada tahun 2018 pada PDRB atas dasar harga konstan. Dari sisi bangunan pasar umum di



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Kabupaten Buton Tengah jumlah pasar umum sebanyak 26 dengan kecamatan terbanyak di kecamatan Lakudo. Sementara pasar ikan di Kabupaten Buton Tengah berjumlah 2 pasar masing masing tersebar secara merata di Kecamatan Mawasangka dan Lakudo

Tabel 2.68

Jumlah Pasar Dirinci Menurut Jenisnya dan Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, 2020

Kecamatan	Jenis Pasar	
	Pasar Umum	Pasar Ikan
Talaga Raya	4	-
Mawasangka	4	1
Mawasangka Tengah	3	-
Mawasangka Timur	3	-
Lakudo	5	1
Gu	3	-
Sangia Wambulu	4	-
Buton Tengah	26	2

Sumber :Kabupaten Buton Tengah dalam Angka 2020

2.3.3.5 Urusan Perindustrian

Gambaran kinerja pelayanan urusan perdagangan Kabupaten Buton Tengah diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Laju pertumbuhan sektor industri khususnya industri manufacturing mengalami penurunan dimana laju pertumbuhannya pada tahun 2018 sebesar 2,02 menjadi -0,56 persen pada tahun 2019.

2.3.3.6 Urusan Transmigrasi

kinerja pelayanan urusan transmigrasi Kabupaten Buton Tengah merupakan urusan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (Core Competence) yang menjadi kekhasan daerah.

2.3.4 Fokus Unsur Penunjang

2.3.4.1 Urusan Perencanaan

Kondisi daerah Kabupaten Buton Tengah terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja terkait ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Buton Tengah sejak pemekaran sampai dengan saat ini, dalam menyusun RKPD selalu mengacu pada RPJMD Kabupaten Buton sebagai kabupaten induk. Sedangkan Penyusunan RPJPD dan RTRW mulai dilakukan pada tahun 2016. Sedangkan penyusunan RPD direncanakan pada tahun 2023. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buton Tengah sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.69
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tahun 2016 s.d 2018 Kabupaten Buton Tengah

No.	Kecamatan	2023	2024	2025	Keterangan
1	RPJPD	Ada	ada	1 Dokumen	Perda Nomor 6
2	RPD	Ada	ada	1 Dokumen	PerBub Nomor 45
3	RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

Sumber: Bappeda Kabupaten Buton Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2.3.4.2 Urusan Keuangan

Gambaran kinerja pelayanan keuangan daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2018 yaitu belum optimalnya upaya peningkatan potensi pendapatan daerah terutama dari pajak dan retribusi daerah, terutama dari sisi kesadaran wajib pajak, dan keterbatasan SDM pemeriksa pajak.

Masih kurangnya pengelolaan dan tertib keuangan daerah yang ditunjukkan dengan masih sering terlambatnya pelaporan keuangan daerah, belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan keuangan on line, juklak juknis Dana DAK yang selalu terlambat, dan masih banyaknya permintaan pembayaran yang bertumpu di akhir tahun. Pengelolaan aset daerah belum optimal terkait dengan masih rendahnya koordinasi antar OPD dalam penghapusan aset daerah dan masih kurangnya tenaga teknis pengukuran aset menggunakan GIS.

2.3.4.3 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Gambaran kinerja pelayanan kepegawaian daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2017 - 2020 sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2017 sebanyak 1638 orang dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.593 orang.
2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2018 didominasi oleh PNS yang berlatar pendidikan S1 keata dengan jumlah 1042 sedangkan diploma sebanyak 299 orang dan SMA/Sederajat sebanyak 247 orang, untuk PNS dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat sebanyak 2 orang dan SMP/ Sederajat sebanyak 3 orang.

2.3.4.4 Inspektorat

Capaian dalam Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan cukup memuaskan. Dalam 2 (dua) tahun terakhir Kabupaten Buton Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

mendapatkan 2 (dua) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah untuk tahun 2017 dan tahun 2018. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk menjaga capaian opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah perlu dioptimalkannya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2.3.4.5 Unsur Pendukung

Fungsi Unsur Pendukung ditangani oleh perangkat daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Masalah yang dihadapi antara lain belum optimalnya pelaksanaan legislasi daerah.

Yang menjadi catatan penting dari data diatas, salah satunya adalah Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan SAKIP) yang masih berada di kategori C atau jika dinominalkan hanya bernilai 30-50 dari range nilai tertinggi 100 yang dapat dicapai. Hal ini dapat diartikan tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Buton Tengah masih tergolong rendah, dengan nilai akuntabilitas kinerja masih dibawah 70 dapat diindikasikan berpotensi terjadi inefisiensi diatas 30% dari APBD diluar belanja pegawai. Inefisiensi ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain: tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil), ukuran kinerja tidak jelas, tidak ada keterkaitan antara program/kegiatan dengan Sasaran, rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

2.3.4.6 Unsur Kewilayahan

Fungsi Penunjang Kewilayahan ditangani oleh 7 Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

kewilayahan, kecamatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

2.3.4.7 Unsur Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum di daerah lebih menyangkut kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk diantaranya kehidupan berpolitik. Menurunnya penerapan nilai-nilai kebangsaan/nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, dan kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat serta belum optimalnya pengawasan dan pendataan terkait dengan pendidikan ideologi asing, dan organisasi sosial politik masyarakat masih sering menjadi simpul-simpul masalah yang berkembang di masyarakat.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.1.1 Perhubungan

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dilihat dari urusan perhubungan meliputi; rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, dan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun.

Di Kabupaten Buton Tengah, Panjang jalan kualitas baik adalah 7,59%, sedang 26,96% dan rusak ringan sebesar 15,56%. Sedangkan dalam kondisi rusak berat adalah 50,01%. Total panjang jalan adalah 284,96 km. Untuk jumlah orang dan barang pada tahun 2020 masing-masing adalah 3500 orang dan 5000. Sedangkan berdasarkan tempat pengangkutan, jumlah orang dan barang di dermaga masing-masing adalah 1500 orang dan 2000 barang. Untuk jumlah orang dan barang yang terangkut melalui terminal masing-masing adalah 2000 orang dan 3000 barang

2.4.1.2 Penataan Ruang

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dilihat dari urusan penataan ruang meliputi; ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan (masing-masing luas wilayah tersebut dibandingkan dengan luas wilayah total kabupaten). Sampai dengan tahun 2018, Kabupaten Buton Tengah belum memiliki RTRW yang menjadi perda. Sehingga data realisasi RTRW belum dapat diperoleh.

2.4.1.3 Lingkungan Hidup

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dilihat dari urusan lingkungan hidup adalah prosentase sanitasi rumah tangga (RT) dan prosentase penggunaan air bersih. Sanitasi perumahan juga merupakan aspek yang penting dalam menciptakan kesehatan dan kenyamanan penghuninya. Sebesar 60,82% rumah tangga telah memiliki fasilitas Buang Air Besar (BAB) yang dimiliki sendiri sedangkan sisanya masih menggunakan fasilitas umum maupun fasilitas bersama. Sebesar 98,90% juga telah menggunakan jenis kloset leher angsa, sedangkan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki digunakan oleh 61,83% rumah tangga di Kabupaten Buton Tengah. Persentase pengguna tempat pembuangan akhir berupa tangki/SPAL menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk meminimalkan dampak limbah terhadap kesehatan dan lingkungan.

Khusus untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum di Kabupaten Buton Tengah masih bergantung pada pemenuhan pelayanan air bersih oleh PDAM. PDAM Kabupaten Buton yang saat ini hanya mampu melayani sebagian masyarakat, yakni yang bermukim di kawasan perkotaan, sedangkan masyarakat yang berdomisili di pedesaan masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan airnya dari sumur dan mata air yang ada.

Hasil pendataan SP Lahan dapat menampilkan penggunaan lahan berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Gambar 4.1 dimana dapat diamati bahwa distribusi penggunaan lahan terbesar berada kecamatan Mawasangka sebesar 26.955 Hektar. Sedangkan lahan terkecil yaitu pada kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Sangia Wambulu sebesar 1.000 Hektar. Selisih yang cukup besar antara kecamatan Mawasangka dengan Sangia Wambulu sejalan dengan besarnya luas wilayah masing-masing kecamatan.

Table 2.70 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Dan Sumber Utama Pencemaran Lingkungan Hidup Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Sumber Pencemaran Air			Sumber Pencemaran Tanah			Sumber Pencemaran		
	Rumah Tangga/ Domestik	Pabrik	Lainnya	Rumah Tangga Domestik	Pabrik	Lainnya	Rumah Tangga Domestik	Pabrik	Lainnya
Buton	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muna	7	0	0	0	0	0	0	0	11
Konawe	9	12	0	0	3	0	0	23	8
Kolaka	6	8	0	0	5	0	3	7	1
Konawe Selatan	5	17	0	0	6	0	1	30	1
Bombana	3	5	0	0	4	0	1	18	0
Wakatobi	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Kolaka Utara	12	3	0	0	3	0	0	9	0
Buton Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konawe Utara	11	27	0	0	2	0	0	34	0
Kolaka Timur	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Konawe Kepulauan	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Muna Barat	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Buton Tengah	1	0	0	0	0	0	2	0	1
Buton Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Kota Kendari	8	1	0	0	0	0	0	1	2
Kota Baubau	1	0	0	0	0	0	2	1	3
PROVINSI	66	74	0	0	23	0	9	125	28

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Grafik 2.11 Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah (Hektar), 2021



Sumber : Statistik Penggunaan Lahan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022

2.4.1.4 Fokus Iklim Investasi

Fokus iklim investasi dapat dilihat dari segi; angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah & macam pajak & redistribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, dan prosentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Berbagai segi tersebut dikelompokkan dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Pada hakekatnya rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan analisis perencanaan daerah, sebagai gambaran umum perekonomian Kabupaten Buton Tengah dalam merencanakan pembangunan daerah guna menciptakan pertumbuhan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan. Kebijakan Ekonomi daerah diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Untuk itu, diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1. Kondisi Perekonomian

3.1.1.1. Kondisi Perekonomian Indonesia

Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% di 2021. Sedangkan perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4% di 2022 atau turun -0,5 percentage points dibandingkan WEO Oktober 2021 dan 3,8% di 2023. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain kemunculan varian Omicron, kenaikan harga energi dan disrupsi suplai yang mendorong lonjakan inflasi, serta adanya kebijakan pengetatan regulasi pada sektor perumahan di Tiongkok.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Moderasi terjadi secara luas pada ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) Tiongkok, serta Eropa. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan turun dari 5,6% di 2021, menuju 4,0% di 2022, dan 2,6% di 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan Tiongkok adalah 8,1%, 4,8% dan 5,2%, sedangkan di Eropa sebesar 5,2%, 3,9%, dan 2,5%. Arah normalisasi kebijakan moneter serta berlanjutnya disrupsi suplai diperkirakan menjadi kontributor utama melambatnya pertumbuhan ekonomi AS. Perlambatan yang terjadi pada perekonomian Tiongkok diperkirakan merupakan dampak adanya disrupsi pada sektor perumahan serta kebijakan zero Covid-19 yang mempengaruhi mobilitas. Di Eropa, perkembangan Covid-19 dan gangguan suplai juga berpotensi mempengaruhi perekonomian ke depan di wilayah tersebut.

Proyeksi pertumbuhan negara-negara ekonomi baru (emerging markets) utama beragam di 2021 hingga 2023. India diproyeksikan tumbuh tinggi sebesar 9,0% di 2021 dan 9,0% di 2022, dan kemudian mengalami moderasi menjadi 7,1% di 2023. Prospek perekonomian India diperkirakan membaik seiring pertumbuhan kredit yang diperkirakan akan berpengaruh positif pada tingkat investasi dan konsumsi. Sedangkan di Kawasan ASEAN-5, pertumbuhan ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat. Dalam periode 2021-2023, Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3%, 5,6%, dan 6,0%, sedangkan Malaysia 3,5%, 5,7%, dan 5,7%. Dalam periode yang sama, pertumbuhan PDB Thailand akan berada pada 1,3%, 4,1%, 4,7%, sedangkan Filipina 4,6%, 6,3%, dan 4,9%. Untuk tahun 2021, Kementerian Keuangan lebih optimis dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kisaran 3,5%-4%, dengan mempertimbangkan kondisi terkini dari pergerakan mobilitas dan indikator-indikator di sisi konsumsi dan produksi yang terus menunjukkan penguatan. Outlook pertumbuhan PDB Indonesia pada Triwulan IV/2021 berada pada angka yang lebih optimis yaitu 5,1%, sesuai dengan kondisi terkini yang menunjukkan pemulihan yang kuat.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di Tahun 2022 dan berlanjut ke 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting.

Beberapa risiko yang perlu diwaspadai ke depan antara lain potensi kemunculan varian baru Covid-19, isu disrupsi suplai dan volatilitas harga energi yang memberi ketidakpastian pada tingkat inflasi, risiko pada stabilitas keuangan emerging markets. Selain itu, normalisasi kebijakan moneter negara maju dengan menaikkan suku bunga, tensi geopolitik yang masih tinggi, dan isu perubahan iklim juga menjadi risiko-risiko yang perlu diwaspadai ke depan.

Dalam laporan WEO Januari 2022, IMF memberikan beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim.

Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 8,23 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami kontraksi terdalam sebesar 24,23 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 28,39 persen.

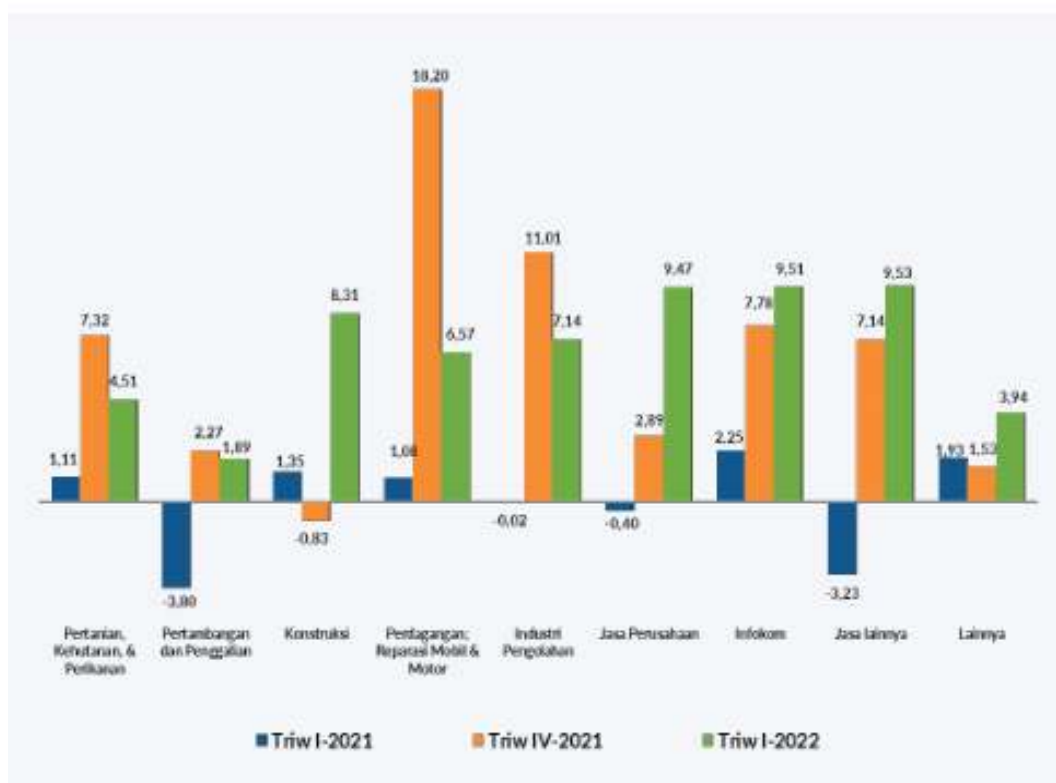
Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi paling dominan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 24,78 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontribusi paling dominan terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 52,32 persen.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Struktur PDRB Sulawesi Tenggara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 24,78 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,05 persen; Konstruksi sebesar 13,35 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,63 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Tenggara mencapai 69,81 persen.



Grafik 3.1

Pertumbuhan PDRB beberapa Lapangan Usaha

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara 2022

Dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi Nasional dan Propinsi Sulawesi Tenggara dimana kebijakan ekonomi tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Buton Tengah sehingga perlu dilakukan



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah disusun berdasarkan kerangka ekonomi nasional, propinsi dan regional serta perkembangan ekonomi tahun sebelumnya serta tantangan yang dihadapi sebagai daerah otonom baru maka capaian indikator ekonomi makro Kabupaten Buton Tengah.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Kabupaten Buton Tengah

Gambaran statistik atas kondisi perekonomian Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2023 dapat digunakan untuk menganalisis dinamika faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap penentuan proyeksi kerangka perekonomian daerah tahun 2024 sebagai tahun rencana dalam penyusunan RKPD. Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan. Pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan Tema, Prioritas dan Sasaran Program / Kegiatan yang telah ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Tabel 3.1.

Tabel Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Buton Tengah Tahun

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	2.169.779,51	2.370.242,14	2.428.673,50	2.536.097,61	2.794.153,98
PDRB Kabupaten Buton Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut	2.169.779,51	2.370.242,14	2.463.473,50	2.536.097,61	2.794.153,98



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran (Juta Rupiah)					
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,83	6,26	3,04	3,12	3,86
Gini Rasio	0,508	0,371	0,285	0,314	0,360
Penduduk	92.165	93.091	114.773	116.599	118.904
Angka Kemiskinan	14,88	15,77	15,32	15,80	14,90
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,45	4,22	4,22	3,77	2,63
Indeks Pembangunan Manusia	63,46	64,66	64,37	64,55	65,29

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas harga konstan. Pada Tahun 2022 perekonomian Kabupaten Buton Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 persen. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2022), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Tengah cenderung stabil pada angka 3 persen, meskipun seluruh dunia mengalami pandemi covid-19 yang sangat berdampak pada kegiatan perekonomian, dimana menyebabkan terjadinya kontraksi pada pertumbuhan ekonomi. Namun di dikabupaten buton tengah, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat setiap tahunnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu. Perekonomian Kabupaten Buton Tengah tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencapai Rp. 2.794.153,98. Nilai PDRB per kapita digunakan sebagai indikasi tingkat



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yang diperoleh dari hasil bagi antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2022 PDRB per kapita Kabupaten Buton Tengah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 2.463.473,50. Perekonomian Kabupaten Buton Tengah mulai menggeliat tumbuh di tahun 2022 dapat dilihat juga dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami peningkatan 1,14 % dari tahun 2021 menjadi 2,63%.

Tabel 3.2

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buton Tengah

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40.78	41.13	39.29	38.67	38.98
2	Pertambangan dan Penggalian	5.51	5.42	8.08	8.11	8.74
3	Industri Pengolahan	5.25	5.17	5.06	5.18	5.02
4	Pengadaaan Listrik dan Gas	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.45	0.43	0.44	0.42	0.40
6	Konstruksi	15.07	15.59	15.12	16.03	15.50
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Rep. Mobil dan Motor	12.75	12.65	12.09	11.74	12.12
8	Transportasi dan Pergudangan	1.13	1.13	1.11	1.11	1.13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19
10	Informasi dan Komunikasi	0.66	0.64	0.67	0.67	0.65



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.76	1.73	1.73	1.81	1.80
12	Real Estate	3.40	3.30	3.26	3.14	2.97
13	Jasa Perusahaan	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.69	3.45	3.52	3.42	3.24
15	Jasa Pendidikan	7.55	7.38	7.60	7.64	7.49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.03	1.02	1.11	1.16	1.08
17	Jasa Lainnya	0.69	0.66	0.64	0.62	0.62
	PDRB Lapangan Usaha	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Struktur perekonomian Kabupaten Buton Tengah menurut lapangan usaha tahun 2022 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama. Ketiga lapangan usaha tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,98 %; Konstruksi dengan kontribusi sebesar 15,50 % ; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 12,12%. Lapangan usaha lainnya yang peranannya diatas 5 persen lainnya adalah Pertambangan dan penggalian sebesar 8,74%, Industri Pengolahan sebesar 5,02% serta Jasa Pendidikan sebesar 7,49%, Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta jasa dengan kontribusi yang relatif kecil, yaitu di bawah 5 persen.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.3.1. Kebijakan Ekonomi Kabupaten Buton Tengah

Berdasarkan data kondisi ekonomi-ekonomi Kabupaten Buton Tengah tahun 2022, maka diketahui bahwa pertumbuhan Ekonomi kabupaten Buton Tengah pada tahun 2022 sebesar 3,86 % yang mengalami peningkatan jika



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang terkontrasi sebesar 0,74%. Jika dikaitkan dengan rencana perekonomian dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2023-2026 maka dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan pengangguran	Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan melalui penyediaan safety net penduduk miskin dan penanganan kemiskinan terpadu pada seluruh tingkatan pemerintahan (kabupaten-kecamatan-desa)	Penyediaan safety net penduduk miskin dengan Sistem Jaminan Sosial bidang Kesehatan, Beasiswa
		Mewujudkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa	Pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa dengan dukungan pembentukan BUMDES
	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengerahan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatkan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dan optimalisasi pemanfaatan PSKS	Peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dengan meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan meningkatkan kualitas penanganan PMKS



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Menurunnya tingkat pengangguran	Penciptaan pasar kerja yang fleksibel, hubungan kerja yang harmonis disertai perlindungan tenaga kerja yang memadai	Peningkatan peran dan kualitas stakeholders dalam perlindungan tenaga kerja
			Peningkatan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja
			Perbaikan sistem pengawasan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri
		Peningkatan peluang usaha yang memiliki daya saing tinggi dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya	Peningkatan peluang berusaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar
			Peningkatan produktivitas kerja melalui pembenahan management sistem tenaga kerja.
		Peningkatan pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri	Peningkatan ketrampilan tenaga kerja berdasarkan bidang keahlian Pengadaan pelatihan melalui BLK



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			(Balai Latihan Kerja).
Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata	Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	Peningkatan aktifitas perdagangan yang mampu memberikan dukungan terhadap pengembangan perekonomian wilayah	Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun kabupaten/kota
			Penguatan usaha dan lembaga perdagangan, perlindungan terhadap konsumen, meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi
		Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, melalui kelancaran distribusi barang dan jasa yang efektif dan efisien	Pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah
			Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan aktivitas usaha



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan aktivitas usaha	Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun kabupaten/kota
			Peningkatan standarisasi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
			Peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama regional dan Internasional
	Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	Peningkatan promosi wisata untuk menunjang terciptanya jaringan antar obyek wisata secara regional maupun nasional	Peningkatan promosi wisata terpadu pada objek wisata unggulan dan objek wisata potensial.
			Peningkatan informasi tentang festival budaya pada berbagai promosi wisata dan berbagai pintu masuk wisata
			Peningkatan komunikasi antarperangkat yang bergerak di bidang kepariwisataan khususnya yang



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			menangani promosi wisata
		Penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan	Penetapan obyek wisata yang memiliki nilai spesifik dan unik yang layak dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan
			Pengembangan atraksi wisata unggulan dan atraksi wisata potensial dengan pengadaan dan keikutsertaan pada event nasional dan Internasional
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)	Pengembangan industri kecil, menengah dan koperasi sebagai basis pengembangan industri regional dan penyerapan tenaga kerja	Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan desa kerajinan yang potensial untuk menghasilkan produk unggulan
			Pengembangan kerjasama dengan industri terkait dan industri Penunjang



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan akses pengusaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi terhadap modal, faktor produksi, informasi, teknologi dan Pasar
	Meningkatnya nilai investasi		Penjaminan kepastian usaha dan kepastian hukum dalam berusaha
			Penciptaan kemudahan usaha dan investasi melalui berbagai deregulasi dan sistem insentif
	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian	Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura
			Peningkatan produksi ternak
			Peningkatan produksi tanaman perkebunan
		Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perkebunan dan peternakan berbasis koordinasi	Peningkatan koordinasi penyuluhan



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		kelembagaan penyuluhan	
	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan	Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan dengan mengendalikan sistem stok bahan pangan, menyediakan sarpras pendukungnya & memperbaiki pola konsumsi pangan

Perekonomian domestik diharapkan terus membaik secara bertahap. Searah dengan perekonomian Nasional, perekonomian Kabupaten Buton Tengah juga terus menunjukkan perbaikan. Perkembangan yang positif dari leading sector Kabupaten Buton Tengah turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Buton Tengah. Sementara kondisi perekonomian Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2024 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan, pendidikan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

3.2. Kinerja Keuangan dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kewajiban yang strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2024 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utama fokus pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan pada pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Arah kebijakan pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatuhan dan kewajaran, efisiensi dan efektif. Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan memuat tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (rill) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

3.2.1. Kinerja Keuangan Tahun 2018-2023

Pengelolaan kinerja keuangan daerah Kabupaten Buton Tengah dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan pada waktu yang telah lalu. Dari analisis kinerja tahun 2018-2023 serta pertimbangan kondisi rill yang terjadi baik di pusat maupun daerah maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan. Selama kurun tahun 2018–2023, Kabupaten Buton Tengah menunjukkan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP).

Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca keuangan daerah. APBD



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

3.3. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja Operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer) maupun pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (Pendapatan asli Daerah, Pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan yang sah).

Pelaksanaan APBD Kabupaten Buton Tengah selama Kurun Tahun 2018–2023 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama periode tersebut naik sebesar 1,30%. Sedangkan pertumbuhan rata-rata belanja daerah mencapai 3.58%, dengan capaian pertumbuhan pembiayaan daerah naik sebesar 3.88%.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 3.4

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 – 2022 dan APBD Tahun 2023

Uraian	Realisasi Tahun (Rp.)					APBD 2023 (Rp.)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
PENDAPATAN DAERAH	628,191,921,971	617,489,792,811	641,453,209,987	673,601,202,380	693,146,437,875	677,082,041,033	1.30%
BELANJA DAERAH	628,937,231,843	628,394,446,726	606,508,364,189	619,271,993,567	683,589,515,468	763,867,363,106	3.58%
PEMBIAYAAN	70,390,805,270	67,645,936,161	41,747,881,278	73,192,501,264	122,523,376,742	86,785,322,073	3.88%

Sumber: LRA Kabupaten Buton Tengah 2018-2022, APBD Kab. Buton Tengah Tahun 2023. Diolah.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 3.5.

Rincian Laporan Realisasi Anggaran 2018-2022, dan APBD Tahun 2023

Uraian	Realisasi Tahun (Rp.)					APBD 2023 (Rp.)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
PENDAPATAN DAERAH	628,191,921,971	617,489,792,811	641,453,209,987	673,601,202,380	693,146,437,875	677,082,041,033	1.30%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	31,410,141,972	17,860,313,658	19,976,866,694	18,331,421,019	18,703,075,955	16,032,992,268	-8.16%
Pendapatan Pajak Daerah	3,159,214,879	3,558,348,112	3,424,519,743	4,014,410,617	5,038,664,646	5,000,000,000	9.71%
Pendapatan Retribusi Daerah	120,358,500	2,370,612,778	3,066,699,503	3,819,736,236	3,534,672,822	3,046,000,000	405.13%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,601,934	1,161,811,899	1,794,717,263	2,431,789,253	2,986,992,268	2,986,992,268	31.42%
Lain-lain PAD yang Sah	28,124,966,659	10,769,540,869	11,690,930,185	8,065,484,913	7,142,746,219	5,000,000,000	-13.70%
PENDAPATAN TRANSFER	596,301,950,722	582,160,769,101	578,373,492,579	627,806,791,376	669,457,751,343	654,146,648,765	1.62%
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	531,962,479,359	484,366,352,656	468,501,759,428	533,770,256,985	596,247,121,702	569,503,517,896	1.18%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16,048,825,649	19,011,089,145	29,378,875,891	76,983,724,843	125,388,122,049	48,363,637,000	33.56%
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	358,696,369,000	374,679,501,000	342,875,036,000	339,470,931,000	335,874,571,202	355,344,063,000	-0.16%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	157,217,284,710	90,675,762,511	96,247,847,537	70,908,541,506	73,652,450,118	91,224,996,000	9.55%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				46,407,059,636	61,331,978,333	74,570,821,896	20.23%
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	54,296,303,999	85,436,837,999	96,755,061,000	76,484,495,000	56,391,811,000	54,801,209,000	0.15%
Dana Insentif Daerah	-	22,869,254,000	31,818,600,000	10,791,779,000	2,197,552,000	-	0.00%



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Uraian	Realisasi Tahun (Rp.)					APBD 2023 (Rp.)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Dana Desa	54,296,303,999	62,567,583,999	64,936,461,000	65,692,716,000	54,194,259,000	54,801,209,000	0.15%
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	10,043,167,364	12,357,578,446	13,116,672,151	17,552,039,391	16,818,818,641	29,841,921,869	32.86%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10,043,167,364	12,357,578,446	13,116,672,151	17,552,039,391	16,818,818,641	29,841,921,869	32.86%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	479,829,277	17,468,710,052	43,102,850,714	27,462,989,985	4,985,610,577	6,902,400,000	-12.10%
Pendapatan Hibah	-	17,189,298,443	43,082,340,000	22,411,367,000	-	-	0.00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	479,829,277	279,411,609	20,510,714	5,051,622,985	4,985,610,577	6,902,400,000	12.21%
BELANJA DAERAH	628,937,231,843	628,394,446,726	606,508,364,189	619,271,993,567	683,589,515,468	763,867,363,106	3.58%
BELANJA OPERASI	311,447,552,440	344,197,203,592	332,758,713,678	332,964,533,505	403,651,173,345	449,652,259,714	7.40%
Belanja Pegawai	178,873,742,778	188,711,994,450	201,195,525,561	192,450,298,712	201,667,516,645	234,077,352,723	5.14%
Belanja Barang dan Jasa	130,077,609,662	152,021,009,142	126,877,352,285	134,832,601,031	192,690,200,438	205,984,143,785	9.73%
Belanja Hibah	2,496,200,000	3,464,200,000	4,685,835,832	5,681,633,762	7,293,456,262	9,590,763,206	47.37%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	2,000,000,000	-	0.00%
BELANJA MODAL	226,067,358,353	182,356,409,414	167,114,692,654	183,421,774,269	187,130,784,492	217,060,208,707	-0.66%
Belanja Tanah	2,381,468,700	6,821,807,079	1,109,364,410	10,011,200	220,943,600	100,000,000	-15.97%
Belanja Peralatan dan Mesin	21,475,695,539	28,981,420,229	28,922,482,090	18,141,766,764	25,955,724,579	30,771,168,749	7.21%
Belanja Gedung dan Bangunan	35,635,327,946	29,852,301,529	44,324,111,648	74,255,962,713	72,372,896,832	103,667,187,500	31.82%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	163,451,024,738	113,990,664,405	91,804,134,206	89,325,790,142	84,670,123,224	78,681,852,458	-8.64%



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Uraian	Realisasi Tahun (Rp.)					APBD 2023 (Rp.)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Belanja Aset Tetap Lainnya	3,123,841,430	2,710,216,172	954,600,300	1,688,243,450	3,911,096,257	3,840,000,000	3.82%
BELANJA TAK TERDUGA	-	300,000,000	6,519,898,597	368,182,373	-	1,982,915,685	0.00%
Belanja Tak Terduga	-	300,000,000	6,519,898,597	368,182,373	-	1,982,915,685	0.00%
BELANJA TRANSFER	91,422,321,050	101,540,833,720	100,115,059,260	102,517,503,420	92,807,557,631	95,171,979,000	0.68%
Belanja Bantuan Keuangan	91,422,321,050	101,540,833,720	100,115,059,260	102,517,503,420	92,807,557,631	95,171,979,000	0.68%
PEMBIAYAAN	70,390,805,270	67,645,936,161	41,747,881,278	73,192,501,264	122,523,376,742	86,785,322,073	3.88%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72,390,805,270	69,645,936,161	56,747,881,278	76,692,501,264	127,523,376,742	86,785,322,073	3.31%
Penggunaan SiLPA	72,390,805,270	69,645,936,161	56,747,881,278	76,692,501,264	127,523,376,742	86,785,322,073	3.31%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,000,000,000	2,000,000,000	15,000,000,000	3,500,000,000	5,000,000,000	-	-16.67%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2,000,000,000	2,000,000,000	15,000,000,000	3,500,000,000	5,000,000,000	-	-16.67%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (57 + 67)	69,645,495,398	56,741,282,246	76,692,727,076	127,521,710,077	132,080,299,149	-	-16.67%

Sumber: LRA Kabupaten Buton Tengah 2018-2022, APBD Kab. Buton Tengah Tahun 2023. Diolah.

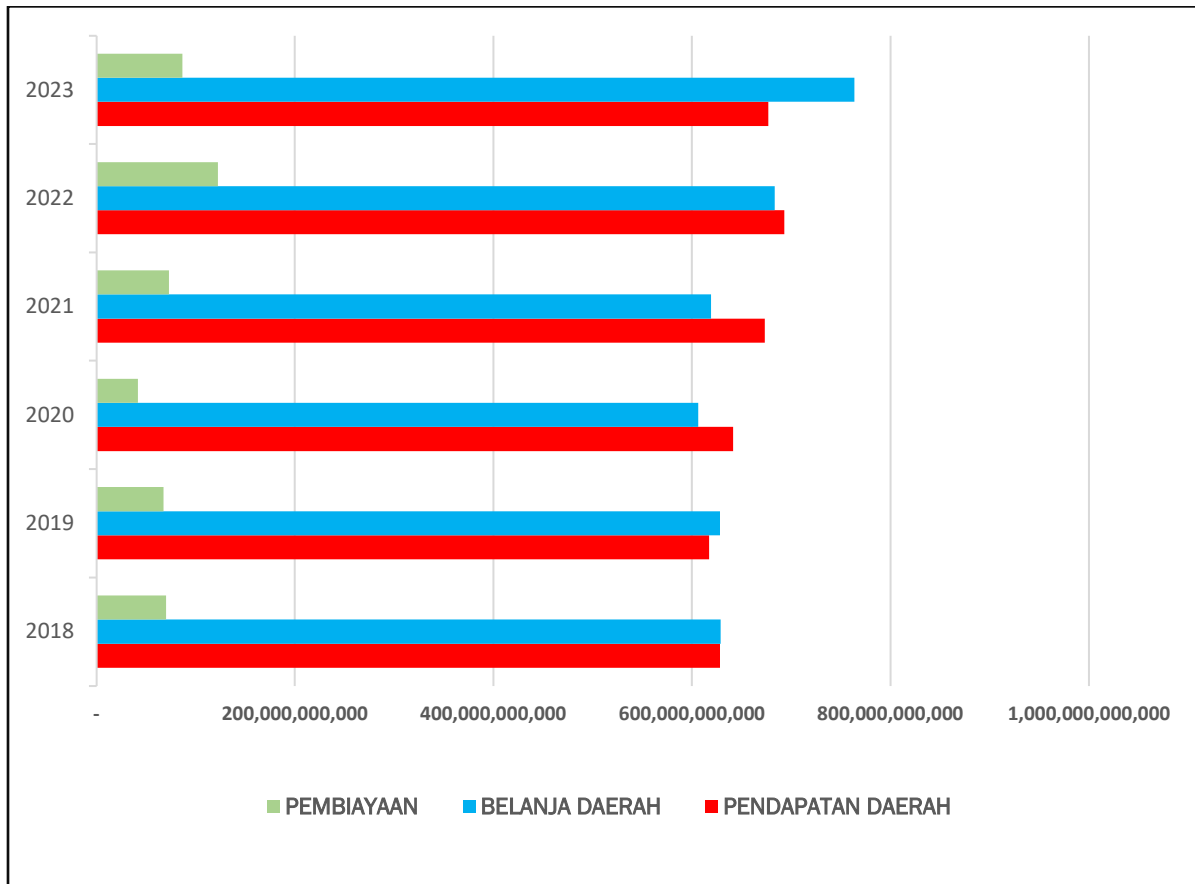


PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Grafik 3.2..

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022 dan APBD Tahun 2023



Sumber: LRA Kabupaten Buton Tengah 2018-2022, APBD Kab. Buton Tengah Tahun 2023. Diolah.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kewajiban yang strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2024 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utama fokus pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan pada pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Arah kebijakan pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatuhan dan kewajiban, efisiensi dan efektif.

Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan memuat tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (rill) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi, guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah, sedangkan dari pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah dan selanjutnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

Tabel 3.6

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018-2022, dan APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023

URAIAN	REALISASI TAHUN (Rp.)					APBD 2023 (Rp.)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
PENDAPATAN DAERAH	628,191,921,971	617,489,792,811	641,453,209,987	673,601,202,380	693,146,437,875	677,082,041,033	1.30%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	31,410,141,972	17,860,313,658	19,976,866,694	18,331,421,019	18,703,075,955	16,032,992,268	-8.16%
Pendapatan Pajak Daerah	3,159,214,879	3,558,348,112	3,424,519,743	4,014,410,617	5,038,664,646	5,000,000,000	9.71%
Pendapatan Retribusi Daerah	120,358,500	2,370,612,778	3,066,699,503	3,819,736,236	3,534,672,822	3,046,000,000	405.13%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	5,601,934	1,161,811,899	1,794,717,263	2,431,789,253	2,986,992,268	2,986,992,268	31.42%



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

URAIAN	REALISASI TAHUN (RP.)					APBD 2023 (Rp.)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Daerah yang Dipisahkan							
Lain-lain PAD yang Sah	28,124,966,659	10,769,540,869	11,690,930,185	8,065,484,913	7,142,746,219	5,000,000,000	-13.70%
PENDAPATAN TRANSFER	596,301,950,722	582,160,769,101	578,373,492,579	627,806,791,376	669,457,751,343	654,146,648,765	1.62%
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	531,962,479,359	484,366,352,656	468,501,759,428	533,770,256,985	596,247,121,702	569,503,517,896	1.18%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16,048,825,649	19,011,089,145	29,378,875,891	76,983,724,843	125,388,122,049	48,363,637,000	33.56%
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	358,696,369,000	374,679,501,000	342,875,036,000	339,470,931,000	335,874,571,202	355,344,063,000	-0.16%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				70,908,541,506	73,652,450,118	91,224,996,000	9.55%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	157,217,284,710	90,675,762,511	96,247,847,537	46,407,059,636	61,331,978,333	74,570,821,896	20.23%
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	54,296,303,999	85,436,837,999	96,755,061,000	76,484,495,000	56,391,811,000	54,801,209,000	0.15%
Dana Insentif Daerah	-	22,869,254,000	31,818,600,000	10,791,779,000	2,197,552,000	-	0.00%
Dana Desa	54,296,303,999	62,567,583,999	64,936,461,000	65,692,716,000	54,194,259,000	54,801,209,000	0.15%
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	10,043,167,364	12,357,578,446	13,116,672,151	17,552,039,391	16,818,818,641	29,841,921,869	32.86%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10,043,167,364	12,357,578,446	13,116,672,151	17,552,039,391	16,818,818,641	29,841,921,869	32.86%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	479,829,277	17,468,710,052	43,102,850,714	27,462,989,985	4,985,610,577	6,902,400,000	-12.10%
Pendapatan Hibah	-	17,189,298,443	43,082,340,000	22,411,367,000	-	-	0.00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	479,829,277	279,411,609	20,510,714	5,051,622,985	4,985,610,577	6,902,400,000	12.21%

Sumber : LRA Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018-2022, APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023, Diolah.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Potensi obyek pajak dan obyek retribusi belum sepenuhnya bisa dikembangkan dengan optimal;
- b. Belum sepenuhnya Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan yang memberikan kontribusi secara optimal;
- c. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. Belum optimalnya pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah berdasarkan fungsi pengelola data, fungsi pelayanan, fungsi penagihan untuk mendorong agar wajib Pajak/wajib Retribusi mematuhi kewajibanya.
- e. Tarif Pajak maupun Retribusi sebagian belum sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian baik nasional maupun regional;
- f. Sistem pengawasan Pemungutan Pajak dan Retribusi belum optimal sehingga perlu ditingkatkannya sistem pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak;
- g. Sistem administrasi pencatatan penerimaan/ pembayaran daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi belum seluruhnya bisa diterapkan pada pemungutan pajak dan retribusi daerah.;
- h. Masih terdapat potensi pendapatan pada obyek Pajak Bumi dan bangunan (PBB) terutama dari adanya komponen bangunan yang belum masuk dalam perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- i. Tata cara pemungutan retribusi belum tertata sesuai dengan jenis dan karakteristiknya;
- j. Masih terdapat beberapa jenis retribusi yang pemungutannya belum efektif dan efisien;
- k. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengatasi permasalahan dan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah yang memadai dengan semakin meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun, serta semakin meningkatnya proporsi PAD terhadap Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, maka pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

- a. Perencanaan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan data potensi dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi serta kondisi perekonomian nasional dan regional.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah melalui sosialisasi serta komunikasi yang efektif dengan wajib pajak/ retribusi;
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis antara Perangkat Daerah pengelola pendapatan;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia untuk mendorong tata kelola pelayanan Pajak dan Retribusi;
- e. Optimalisasi penerimaan pendapatan baik Pajak dan Retribusi antara lain dengan penyesuaian tarif dan penggalian potensi obyek baru;
- f. Penegakan disiplin pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan meningkatkan pengawasan yang melibatkan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan yang terdiri dari Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sistem dan penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan untuk memudahkan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak/retribusi;
- h. Melaksanakan kajian secara menyeluruh terhadap tata cara pemungutan yang sudah ada selanjutnya dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis dan karakteristiknya;
- i. Perlu dilakukan evaluasi dan kajian terhadap tata cara Pemungutan Retribusi yang masih belum efektif dengan melibatkan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
- j. Melakukan pembinaan terhadap BUMD agar meningkatkan dan memperbaiki manajemen sehingga lebih efektif dalam pengelolaannya serta mengefektifkan pengawasan.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 3.7

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2024 (Rp.)
PENDAPATAN DAERAH	632,907,412,543
PENDAPATAN ASLI DAERAH	14,032,992,268
Pendapatan Pajak Daerah	5,000,000,000
Pendapatan Retribusi Daerah	3,046,000,000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,986,992,268
Lain-lain PAD yang Sah	3,000,000,000
PENDAPATAN TRANSFER	611,818,420,275
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	538,185,601,000
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	48,363,637,000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	340,591,095,000
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	70,858,668,000
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	78,372,201,000
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	52,662,872,330
Dana Insentif Daerah	-
Dana Desa	52,662,872,330
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	20,969,946,945
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20,969,946,945
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7,056,000,000
Pendapatan Hibah	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	7,056,000,000

Sumber : RPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2026, 2023.

3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pada tahun 2022 pendapatan daerah mulai menunjukkan kenaikan yang didukung diantaranya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dimana



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

hal ini juga sejalan dengan meningkatnya jumlah realisasi belanja di tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021 yaitu dari Rp. 619.271.993.567,00 menjadi Rp. 683.589.515.468,00 Peningkatan realisasi terjadi pada seluruh komponen baik belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga maupun belanja Transfer.

Tabel 3.8

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2022, dan APBD Tahun 2023

URAIAN	REALISASI TAHUN (RP.)					APBD 2023 (Rp.)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
BELANJA DAERAH	628,937,231,843	628,394,446,726	606,508,364,189	619,271,993,567	693,146,437,874	63,867,363,106	3.58%
BELANJA OPERASI	311,447,552,440	344,197,203,592	332,758,713,678	332,964,533,505	403,651,173,345	449,652,259,714	7.40%
Belanja Pegawai	178,873,742,778	188,711,994,450	201,195,525,561	192,450,298,712	201,667,516,645	234,077,352,723	5.14%
Belanja Barang dan Jasa	130,077,609,662	152,021,009,142	126,877,352,285	134,832,601,031	192,690,200,438	205,984,143,785	9.73%
Belanja Hibah	2,496,200,000	3,464,200,000	4,685,835,832	5,681,633,762	7,293,456,262	9,590,763,206	47.37%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	2,000,000,000	-	0.00%
BELANJA MODAL	226,067,358,353	182,356,409,414	167,114,692,654	183,421,774,269	187,130,784,492	217,060,208,707	-0.66%
Belanja Tanah	2,381,468,700	6,821,807,079	1,109,364,410	10,011,200	220,943,600	100,000,000	-15.97%
Belanja Peralatan dan Mesin	21,475,695,539	28,981,420,229	28,922,482,090	18,141,766,764	25,955,724,579	30,771,168,749	7.21%
Belanja Gedung dan Bangunan	35,635,327,946	29,852,301,529	44,324,111,648	74,255,962,713	72,372,896,832	103,667,187,500	31.82%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	163,451,024,738	113,990,664,405	91,804,134,206	89,325,790,142	84,670,123,224	78,681,852,458	-8.64%
Belanja Aset Tetap Lainnya	3,123,841,430	2,710,216,172	954,600,300	1,688,243,450	3,911,096,257	3,840,000,000	3.82%
BELANJA TAK TERDUGA	-	300,000,000	6,519,898,597	368,182,373	-	1,982,915,685	0.00%
Belanja Tak Terduga	-	300,000,000	6,519,898,597	368,182,373	-	1,982,915,685	0.00%
BELANJA TRANSFER	91,422,321,050	101,540,833,720	100,115,059,260	102,517,503,420	92,807,557,631	95,171,979,000	0.68%
Belanja Bantuan Keuangan	91,422,321,050	101,540,833,720	100,115,059,260	102,517,503,420	92,807,557,631	95,171,979,000	0.68%

Sumber : LRA Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018-2022, APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023, Diolah.

Arah Kebijakan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Alokasi belanja langsung dioptimalkan pada belanja modal dan belanja barang dan jasa untuk menstimulasi pertumbuhan sektor riil. Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah kota semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal dan berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah untuk mendanai Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah selain Urusan Wajib Pelayanan Dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks Organisasi Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Penggunaannya, belanja daerah diupayakan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program- program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Buton Tengah. Disamping itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan pada penyelarasan sasaran program yang sesuai dengan urusan dan kewenangan terkait secara tepat kegiatan dan tepat anggaran,



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing OPD melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing OPD. Setiap item belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tengah tahun 2023 – 2026 antara lain :

1. Alokasi belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
2. Alokasi belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD.
3. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah dilakukan sinkronisasi prioritas pembangunan nasional yang diamanatkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024;\
4. Mengakomodir usulan-usulan masyarakat hasil dari penjaringan musrenbang serta hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Buton Tengah.
5. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan dan pembangunan infrastruktur Kabupaten.
 - b. Dana alokasi umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan - kebutuhan pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - c. Dana alokasi khusus (DAK) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan fisik,sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pemerintah daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari pusat maupun propinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Pengalokasian anggaran Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, yaitu sebesar 60 persen pada tahun 2024 dari total kebutuhan.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang melalui Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bantuan Operasional Sekolah dan rekening Badan Layanan Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah. Belanja daerah meliputi semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tahun 2024 pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bunga dan belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis belanja meliputi pemberian kompensasi kepada pegawai ASN berdasarkan kemampuan/prestasi, beban kerja, dan kondisi kerja pegawai dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Operasi dilakukan secara cermat melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD). Pemberian hibah dilakukan kepada organisasi kemasyarakatan maupun partai politik yang memenuhi persyaratan serta peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2. Belanja Modal

Belanja modal mencakup setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Modal dilakukan melalui koodinasi dengan PD terkait untuk meningkatkan akurasi penganggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

3. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan daruriantaranya keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Tabel 3.9

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2024 (Rp.)
BELANJA DAERAH	641,308,833,587
BELANJA OPERASI	415,143,421,610
Belanja Pegawai	214,077,352,723
Belanja Barang dan Jasa	154,527,168,887
Belanja Hibah	46,538,900,000
Belanja Bantuan Sosial	-
BELANJA MODAL	135,789,527,752
Belanja Tanah	100,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin	25,269,392,794
Belanja Gedung dan Bangunan	27,898,282,500
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	78,681,852,458
Belanja Aset Tetap Lainnya	3,840,000,000
BELANJA TAK TERDUGA	1,564,816,245
Belanja Tak Terduga	1,564,816,245
BELANJA TRANSFER	88,811,067,980
Belanja Bantuan Keuangan	88,811,067,980

Sumber : RPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2026, 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

3.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Tabel 3.10.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018-2022, dan APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023.

URAIAN	REALISASI TAHUN (RP.)					APBD 2023 (Rp.)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
PEMBIAYAAN	70,390,805,270	67,645,936,161	41,747,881,278	73,192,501,264	122,523,376,742	86,785,322,073	3.88%
PENERIMAAN							
PEMBIAYAAN	72,390,805,270	69,645,936,161	56,747,881,278	76,692,501,264	127,523,376,742	86,785,322,073	3.31%
Penggunaan SiLPA	72,390,805,270	69,645,936,161	56,747,881,278	76,692,501,264	127,523,376,742	86,785,322,073	3.31%
PENGELUARAN							
PEMBIAYAAN	2,000,000,000	2,000,000,000	15,000,000,000	3,500,000,000	5,000,000,000	-	-16.67%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2,000,000,000	2,000,000,000	15,000,000,000	3,500,000,000	5,000,000,000	-	-16.67%

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Arah kebijakan pembiayaan Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2024 diarahkan penerimaan dan pengeluaran daerah. Untuk penerimaan daerah, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sedangkan untuk pengeluaran daerah fokus pada penyertaan modal serta pembayaran cicilan pokok utang yang sudah jatuh tempo. Gambaran proyeksi pembiayaan daerah tahun 2024 ditampilkan pada tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 3.11.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2024 (Rp.)
PEMBIAYAAN	8,401,421,044
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8,401,421,044
Penggunaan SiLPA	8,401,421,044
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-

Sumber : RPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2026, 2023.

3.5. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kerangka pendanaan keuangan daerah untuk tahun 2024 kedepan memaparkan hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan alokasi prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.12

Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah
Tahun 2024

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2024 (Rp.)
PENDAPATAN DAERAH	632,907,412,543
PENDAPATAN ASLI DAERAH	14,032,992,268
Pendapatan Pajak Daerah	5,000,000,000
Pendapatan Retribusi Daerah	3,046,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2024 (Rp.)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,986,992,268
Lain-lain PAD yang Sah	3,000,000,000
PENDAPATAN TRANSFER	611,818,420,275
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	538,185,601,000
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	48,363,637,000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	340,591,095,000
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	70,858,668,000
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	78,372,201,000
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	52,662,872,330
Dana Insentif Daerah	-
Dana Desa	52,662,872,330
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	20,969,946,945
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20,969,946,945
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7,056,000,000
Pendapatan Hibah	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	7,056,000,000
BELANJA DAERAH	641,308,833,587
BELANJA OPERASI	415,143,421,610
Belanja Pegawai	214,077,352,723
Belanja Barang dan Jasa	154,527,168,887
Belanja Hibah	46,538,900,000
Belanja Bantuan Sosial	-
BELANJA MODAL	135,789,527,752
Belanja Tanah	100,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin	25,269,392,794
Belanja Gedung dan Bangunan	27,898,282,500



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2024 (Rp.)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	78,681,852,458
Belanja Aset Tetap Lainnya	3,840,000,000
BELANJA TAK TERDUGA	1,564,816,245
Belanja Tak Terduga	1,564,816,245
BELANJA TRANSFER	88,811,067,980
Belanja Bantuan Keuangan	88,811,067,980
PEMBIAYAAN	8,401,421,044
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8,401,421,044
Penggunaan SiLPA	8,401,421,044
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-

Sumber: Bappeda Kab Buton Tengah 2023

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa proyeksi pendapatan dan belanja mengalami defisit sehingga kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 untuk menutup besarnya defisit belanja daerah disamping mengakomodir kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

- a. Prioritas I,** dialokasikan untuk membiayai operasional wajib dan mengikat diantaranya pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20%, alokasi belanja kesehatan sebesar 10%, pemenuhan belanja pengawasan 1% serta pemenuhan belanja peningkatan sumber daya aparatur sebesar 0,16%. Selain itu, belanja yang menjadi prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana.
- Prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- b. Prioritas II,** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan OPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.
- c. Prioritas III,** merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja Operasional seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.
- Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai profit center yang dimiliki pemerintah daerah, perlu diberikan sesuai dengan rencana



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

pengembangan usaha masing-masing BUMD yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah (RKPD) tahun 2024 senantiasa diselaraskan dengan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tengah tahun 2023-2026. Sebagaimana RKPD tahun 2023, dalam dokumen ini juga tidak terdapat visi dan misi kepala daerah. Hal ini dikarenakan, Kabupaten Buton Tengah termasuk salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang masa jabatan Bupatinya telah berakhir pada tahun 2022 dan akan mengikuti pemilu serentak tahun 2024. Oleh karena itu, sejak Mei 2022 sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Buton Tengah akan dipimpin oleh Penjabat Bupati. Dalam melaksanakan tugas, selain berpedoman pada RPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2026, Penjabat Bupati Buton Tengah juga bertanggungjawab terhadap tugas-tugas lain yang telah diamanatkan dalam peraturan yang telah ditetapkan sehingga, dalam bab ini, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buton Tengah akan diselaraskan pula dengan tugas-tugas Penjabat Bupati Buton Tengah. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buton Tengah tahun 2024, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran tahapan terakhir RPJPD Kabupaten Buton Tengah 2005-2025, yang kemudian Sasaran - sasaran pokok ini dijabarkan kedalam sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah 2023-2026 serta memperhatikan isu-isu nasional dan global. Tujuan dan sasaran serta target indikator Rencana Pembangunan Kabupaten Buton Tengah tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
1.1 Menyediakan infrastruktur wilayah untuk membuka isolasi daerah dan mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan	Jumlah wilayah terhubung secara memadai (dengan kriteria akses jalan, akses pelabuhan dan akses jaringan telekomunikasi)	%	100%
1.1.1 Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk mendukung lalu lintas orang, barang dan jasa	Panjang Jalan Mantap Kewenangan Kabupaten	%	90%
1.1.2 Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah	Jumlah pelabuhan yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai	%	100%
1.1.3 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	Persentase layanan jaringan irigasi yang dibangun	%	73,75%
1.1.4 Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	65%
1.1.5 Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana	Desa tangguh bencana	%	25%
2.1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	65,30 %
2.1.1 Meningkatnya akses, pemerataan serta kualitas pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	Lama sekolah	13.78
2.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Umur	67,99 Umur
2.1.3 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	%	81.83%
2.1.4 Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif	%	100%
2.1.5 Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2.91%
2.2 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase Penanganan Konflik Umat Beragama	%	100%
2.2.1 Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama	Persentase Penanganan Konflik Umat Beragama	%	100%
2.2.2 Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persentase Ketersediaan Gedung Kesenian	%	43%
3.1 Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan pengangguran	Angka Kemiskinan	%	15,30 %
3.1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Angka Kemiskinan	%	15,50%
3.1.2 Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penerahan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	100%
3.1.3 Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,93%
3.2 Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata	Nilai Tukar Petani	%	100,86 %
	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,40 %



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
3.2.1 Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,80%
3.2.2 Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	%	35.000
3.2.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)	Persentase koperasi dan UKM dalam pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi	%	35%
3.2.4 Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan nilai investasi	%	9,79%
3.2.5 Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian	Produksi Peternakan	%	100%
	Produksi Tanaman Pangan	%	100%
3.2.6 Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	Persentase Kecukupan Pangan Daerah	%	100%
4.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC Nilai
4.1.1 Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	45%
	Indeks akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai	CC Nilai
4.1.2 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	Nilai	WTP Nilai
5.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	%	13,07 %
5.1.1 Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata Ruang wilayah	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai dengan Tata Ruang Wilayah	%	75%
5.1.2 Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	13,07%
6.1 Meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat dari pengembangan sektor kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan	%	98,99 %
6.1.1 Meningkatnya peranan sector kelautan dan perikanan dalam perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	1,98%

Sumber : RPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024

4.2. Prioritas Pembangunan Dan Program Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah disusun berdasarkan isu strategis yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2026, serta memperhatikan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah, selaras dengan prioritas daerah tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

daerah yang merupakan program-program strategi yang akan di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tahun 2024.

4.2.1. Isu Startegis Pembangunan Kabupaten Buton Tengah

Isu strategi pembangunan Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam RPK Kabupaten Buton Tengah tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1) Produktivitas dan Nilai Tambah Produk-Produk Unggulan Pertanian serta Penggunaan Sumber Daya Pertanian

Kegiatan usaha pertanian dalam arti luas memberikan sumbangan terbesar PDRB Kabupaten Buton Tengah. Namun, produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian masih perlu ditingkatkan, baik untuk tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Kabupaten Buton Tengah sangat berpotensi untuk dikembangkan jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah.

Potensi kegiatan ekonomi di sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya di Kabupaten Buton Tengah cukup besar. Ini terlihat dari sumbangannya terhadap jumlah produksi perikanan Kabupaten Buton saat masih tergabung dalam satu kabupaten. Jumlah produksi perikanan tangkap wilayah Kabupaten Buton Tengah menyumbang 38,98% dari total PDRB Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pembukaan lahan tambak sebagai upaya pemanfaatan potensi lahan tidur pesisir. Jika ditinjau dari jenis peralatan penangkapan ikan, yang dominan adalah alat pancing, disusul jaring insang, dan perangkap. Salah satu potensi sumber daya perairan yang menjadi peluang besar untuk dikembangkan adalah Rumput laut jenis Cottonii dan Spinosum, meskipun masih banyak komoditi lainnya yang menunjang untuk dikembangkan. Tujuh Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Buton Tengah, memiliki garis pantai yang menjadi dasar dalam melihat daerah ini berpeluang untuk mengembangkan rumput laut, mulai dari metode pembibitan, proses budidaya dan pemasaran rumput laut, agar lebih produktif dengan kualitas kekeringan terjaga.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan hasil analisis citra (Bappeda Buton, 2008) hampir seluruh wilayah pesisir Buton Tengah memiliki terumbu karang. Olehnya itu, tidak heran pemerintah pusat menjadikan beberapa wilayah di Kabupaten Buton Tengah sebagai bagian dari wilayah pelaksanaan program Coremap II. Terumbu karang di wilayah Kabupaten Buton Tengah tersebar di seluruh kecamatan dengan intensitas yang tinggi terdapat di empat kecamatan yakni Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Talaga Raya, intensitas sedang di Kecamatan Lakudo dan intensitas kurang di Kecamatan Gu dan Sangia Wambulu. Keberadaan terumbu karang ini jika terus dijaga dan dipelihara dengan baik akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi peningkatan perikanan dan dapat pula dijadikan sebagai daya tarik wisata.

Terhadap berbagai produksi hasil pertanian (dalam arti luas) di Kabupaten Buton Tengah belum banyak dilakukan pengolahan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi, upaya-upaya yang dilakukan di bidang pertanian ini lebih banyak mengarah pada peningkatan produktivitas (on farm). Sedangkan upaya off farm masih rendah, oleh karena itu nilai tambah atas produk-produk pertanian ini masih relatif rendah. Pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya pertanian di Kabupaten Buton Tengah belum optimal. Kabupaten Buton Tengah memiliki kondisi lahan yang tergolong sebagai lahan kering, tanah kapur dan kritis membutuhkan penanganan dalam pemenuhan pangan daerah.

2) Infrastruktur dan dukungan stakeholder dalam kegiatan penanaman modal daerah,

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan disuatu wilayah, keberadaan infrastruktur yang memadai adalah menjadi satu keniscayaan. Ketersediaan berbagai infrastruktur adalah menjadi suatu yang penting untuk kelayakan investasi. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan menekan ekonomi biaya tinggi dalam investasi yang akan dilakukan baik oleh sektor pemerintah, sektor masyarakat maupun sektor swasta. Dari sisi masyarakat, ketersediaan infrastruktur akan memudahkan bagi masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

untuk mengembangkan produk-produk lokal sehingga akan memberi efek berantai dalam berbagai sisi pembangunan.

Prasarana jalan di Kabupaten Buton Tengah terbagi menjadi jalan kabupaten dan jalan provinsi. Kondisi dan panjang jalan kabupaten dapat dijelaskan sebagai berikut: tahun 2023 panjang jalan 499.629 km, dengan kondisi jalan baik 38.1%, rusak sedang 2,45%, rusak ringan 0.937% dan jalan rusak berat 58,513%. Pada tahun 2022, Dukungan stakeholder dalam kegiatan penanaman modal belum berjalan secara optimal. Stakeholder dalam penanaman modal antara lain pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta perbankan. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah melakukan langkah-langkah meningkatkan investasi dunia usaha dan berkembangnya sektor riil, tetapi sampai dengan saat ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini dimungkinkan karena Kabupaten Buton Tengah merupakan Kabupaten yang baru mekar pada tahun 2014. Sehingga, belum banyak kebijakan yang mendukung iklim usaha yang kondusif. Diperlukan berbagai kebijakan, antara lain meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah mendukung kebijakan pemerintah yang pro investasi dan mendorong berkembangnya sektor riil. Kebijakan tersebut adalah penciptaan kondisi sosial dan politik yang kondusif bagi investor baik melalui fasilitasi pelayanan perijinan secara terpadu, kepastian hukum, promosi investasi, intermediasi perbankan, ketenagakerjaan, penyediaan infrastruktur yang memadai dan kebijakan tata ruang yang konsisten.

3) Pengelolaan sumberdaya lokal dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, selain sering mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut dan berbagai bentukan ruang terbuka lainnya. Kedua



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

hal ini umumnya merugikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Di lain pihak, kemajuan alat dan penambahan jalur transportasi dan sistem utilitas, sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan. Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan RTH sebagai suatu teknik bioengineering dan bentukan biofilter yang relatif lebih murah, aman, sehat, dan nyaman.

Kabupaten Buton Tengah masih memiliki banyak ruang terbuka hijau yang didominasi oleh hutan kering dan semak/belukar. Kabupaten Buton Tengah saat ini juga banyak terdapat sumber mata air yang terancam mati, jika kondisi lingkungan seperti sekarang ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya usaha penyelamatan dengan cara konservasi lingkungan di sekitar sumber mata air. Hal ini dikarenakan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum di Kabupaten Buton Tengah masih bergantung pada pemenuhan pelayanan air bersih oleh PDAM. PDAM Kabupaten Buton yang saat ini hanya mampu melayani sebagian masyarakat, yakni yang bermukim di kawasan perkotaan, sedangkan masyarakat yang berdomisili di pedesaan masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan airnya dari sumur dan mata air yang ada. Pemkab Buton Tengah hanya mengelola sumber air yang ada di sungai untuk keperluan irigasi. Diperkirakan dalam jangka waktu 10 hingga 15 tahun sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Buton Tengah akan mati. Matinya sumber mata air itu, tidak lepas dari ulah manusia, seperti melakukan penggundulan pohon yang ada di sekitar sumber mata air. Padahal seperti diketahui, pohon menjadi penyimpan utama air.

4) Profesionalisme aparatur pemerintah daerah, tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (good governance) dan E-Government

Meski sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Kabupaten Buton Tengah bertekad melakukan peningkatan kualitas pembangunan serta kualitas



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sampai pada tingkat desa. Hal demikian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah dewasa ini semakin menguat, sehingga harus dikelola secara sinergis, konsisten, simultan, dan berkesinambunga. Sebagai langkah awal, Kabupaten Buton Tengah melakukan pembenahan aparatur dengan melakukan pemenuhan jumlah tenaga yang melayani masyarakat. Saat ini, program utama adalah pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan pendidikan yang ditugaskan melayani masyarakat sampai pada tingkat desa.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah ada, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah adalah dengan mengikutkan aparat pada pelatihan atau bimtek yang berhubungan dengan bidang-bidang pada setiap SKPD, melakukan peningkatan kursus atau pendidikan jenjang karir, lanjut studi pada S1/S2 bagi staf yang memenuhi syarat.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang berlangsung sejak tahun 2000, pengembangan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan tertib hukum di daerah, peningkatan pelayanan publik dan demokratisasi di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan umum mengacu pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan mendasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik belum dilaksanakan secara optimal. Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan citra pemerintah yang semakin baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju terwujudnya good governance baik di tingkat Kabupaten Buton Tengah, kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.

Dimasa yang akan datang tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan berbasis informasi teknologi (IT) dalam bentuk electronicgovernemnet (e-government) menjadi harapan semua pihak, tetapi kondisi saat ini di Kabupaten Buton Tengah e-government masih belum membudaya dikalangan aparat maupun masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

5) Kualitas hidup masyarakat yang memadai (kemudahan akses pelayanan publik dan jaminan keamanan)

Pemerataan dan perluasan akses memperoleh kesempatan pendidikan diukur melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Transisi (AT).

6) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah ditunjukkan oleh tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Buton Tengah. Secara umum penduduk bekerja di Kabupaten Buton Tengah masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah (termasuk yang tidak pernah sekolah dan yang tidak tamat SD).

7) Lapangan kerja, upah kerja dan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kemiskinan

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja di Buton Tengah adalah 61.106 jiwa yang terdiri dari 39.943 angkatan kerja atau sekitar 64,37 persen dan sisanya sebanyak 21.163 bukan angkatan kerja atau sekitar 34,63 persen. Tahun 2020 TPAK Buton Tengah mengalami penurunan menjadi 65,37 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 66,8 persen. Artinya, terdapat 65,37 persen penduduk usia kerja yang bekerja secara aktif. Penurunan TPAK merupakan indikasi menurunnya kecenderungan penduduk untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Bila dibandingkan dengan rata-rata TPAK di Sulawesi Tenggara, TPAK Kabupaten Buton Tengah masih lebih rendah setiap tahunnya dengan angka sebesar 69,83 persen pada tahun 2020.

4.2.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 mengambil tema ***“Akselarasi Ekonomi Melalui Penguatan Infrastruktur, Tata Kelola Pemerintahan, SDA dan SDM Produktif, dan Lapangan Pekerjaan.*** Dengan memperhatikan kebijakan nasional terkait penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

dan transisi energy, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan ini didukung oleh beberapa major project diantaranya adalah :

1. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
2. Reformasi Pendidikan Keterampilan (Pelatiha dan Pendidikan vokasi untuk industri 4.0)
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
4. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
5. Akselerasi pengembangan energy terbarukan dan konservasi energy.
6. Pengelolaan terpadu UMKM.
7. Kawasan industry prioritas dan smelter.
8. 10 destinasi pariwisata prioritas.
9. Kawasan sentra produk pangan (food estate).
10. Transformasi digital.

Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, RKP 2024 tetap merujuk pada tujuh prioritas nasional yaitu:

PN. 1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;

PN. 2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;

PN. 3 SDM berkualitas dan berdaya saing;

PN. 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

PN. 5 Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;

PN. 6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;

PN. 7 Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Adapun sasaran pembangunan Nasional diukur kedalam beberapa indicator yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2.

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	Nilai	5,3-5,7



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

No	Indikator	Satuan	Target 2024
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,0-5,7
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,5-7,5
4	Rasion Gini	Nilai	0,374 – 0,3777
5	Indkes Pembangunan Manusia	Nilai	73,99 – 74,02
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kacar	Persen	27,22
	Indikator Lainnya		
7	Nilai Tukar Petani	Nilai	105-108
8	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	103-105

Sumber : Kick Off RKP Tahun 2024

4.2.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024-2026. Selain memuat tujuan dan sasaran pembangunan, juga membahas isu-isu pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu tiga tahun mendatang. Isu-isu strategis pembangunan tersebut adalah:

- Penanggulangan kemiskinan;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- Optimalisasi Pelaksanaan SPM;
- Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Produktivitas Kerja;
- Pembangunan Berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Optimalisasi pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk tahun 2024 pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara diarahkan pada Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

dan Kompetitif, yang kemudian dijabarkan kedalam beberapa prioritas daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia yang Ungul dan Kompetitif dengan fokus pada:
 - a) Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan menengah.
 - b) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional dan tetap fokus pada permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas daerah, seperti Penanganan Stunting.
2. Kesejahteraan Manusia yang Lebih Baik dengan Fokus pada:
 - a) Mengurangi beban pengeluaran dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan.
 - b) Meningkatkan kapasitas sektor riil dan menciptakan iklim usaha kondusif.
 - c) Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat.
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan dengan focus pada:
 - a) Mendorong transformasi ekonomi pada Sektor Pariwisata, Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian dan hilirisasi pertambangan serta Program padat karya untuk menyerap tenaga kerja.
 - b) Peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan focus:
 - a) Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan SPBE (SIPD, SDI, dll).
 - b) Optimalisasi inovasi daerah.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara diatas merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah Tahun 2024 sebagaimana dijabarkan pada table berikut:

Tabel 4.3.

Target Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	Nilai	6,0 – 6,5



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

No	Indikator	Satuan	Target 2024
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,75 – 3,00
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	73,00 – 73.30
4	Rasio Gini	Nilai	0,366 – 0,375
5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,00 – 73,30

Sumber : RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 – 2026

4.2.4. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024, DPRD Kabupaten Buton Tengah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka tahunan sebagaimana terlampir dalam lampiran dokumen RKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024.

4.2.5. Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Tengah

RKPD Kabupaten Buton Tengah tahun 2024 merupakan dokumen operasional tahun kedua dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2023-2026, sehingga dalam proses penyusunannya harus berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah termuat dalam Perubahan RPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 – 2026.

Berdasarkan Analisis kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) dalam Perubahan RPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 – 2026, maka



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

tantangan dihadapi Kabupaten Buton Tengah pada Tahun 2023 serta memperhatikan arahan Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2024 yang bersifat sangat penting dan mendesak sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
2. Produktivitas dan Nilai Tambah Produk-Produk Unggulan Pertanian serta Penggunaan Sumber Daya Pertanian
3. Infrastruktur dan dukungan stakeholder dalam kegiatan penanaman modal daerah,
4. Pengelolaan sumberdaya lokal dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata
5. Profesionalisme aparatur pemerintah daerah, tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (good governance) dan E-Government
6. Kualitas hidup masyarakat yang memadai (kemudahan akses pelayanan publik dan jaminan keamanan)
7. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
8. Lapangan kerja, upah kerja dan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kemiskinan

Berdasarkan Isu-isu strategis daerah tersebut diatas, maka rumusan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk-Produk Unggulan Pertanian dan Perikanan serta Penggunaan Sumber Daya Pertanian
- b. Peningkatan Infrastruktur dan dukungan stakeholder dalam kegiatan penanaman modal daerah,
- c. Peningkatan Pengelolaan sumberdaya lokal dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata
- d. Peningkatan Profesionalisme aparatur pemerintah daerah, tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (good governance) dan E-Government



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

- e. Peningkatan Kualitas hidup masyarakat yang memadai (kemudahan akses pelayanan publik dan jaminan keamanan)
- f. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- g. Peningkatan Lapangan kerja, upah kerja dan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kemiskinan

Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tengah tahun 2024 yang telah dirumuskan diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Persentase Pertumbuhan PDRB diperkirakan meningkat dikisaran 5-6 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan dapat menurun dikisaran angka 5 sampai 5,5 persen;
3. Angka Kemiskinan diharapkan kembali mengalami penurunan diangka 4-4,5 persen;
4. Gini Rasio, diharapkan turun dikisaran angka 0,375-0,350;
5. Indeks Pembangunan Manusia, diharapkan kembali meningkat di angka 84,5-85,5;
6. Inflasi, diharapkan terus mengalami penurunan dikisaran 5.0-4,0 persen;
7. Pendapatan Perkapita diperkirakan akan mengalami peningkatan diangka Rp. 74.969.080.

Jika dibandingkan dengan target-target capaian baik Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Nasional, terdapat beberapa target capaian Kabupaten yang masih berada dibawah atau diatas target Provinsi. Perbandingan target-target capaian tersebut, secara lengkap dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4.

Perbandingan Target Pembangunan Kabupaten Buton Tengah dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Linkgup	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT	Gini Rasio
Pusat	5,3-5,7	73,99- 74,02	6,5 - 7,5	5,0-5,7	0,374 - 0,377



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Linkgup	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT	Gini Rasio
Provinsi Sultra	6,0 - 6,5	73,00- 73,30	6,5 - 7,5	2,75-3,00	0,366- 0,375
Kabupaten Buton Tengah	4,20	67,00	14,50	2,63	0,360

4.2.6. Program Prioritas

Program Prioritas pembangunan Kabupaten Buton Tengah di Tahun 2024, diselaraskan dengan prioritas daerah yang telah di rumuskan serta diharapkan mampu menjawab isu strategis dan permasalahann yang ada. Berikut daftar program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 :

Tabel 4.5.

Program Prioritas Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk-Produk Unggulan Pertanian dan Perikanan serta Penggunaan Sumber Daya Pertanian		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 %
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Capaian Kinerja Penyuluh Pertanian	83 %
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Ternak Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	380.553 Kg 3.288 Ton 13.035 Ton
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Areal Pertanian	9.776 %
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan wilayah yang terkendali dari penyakit hewan ternak	100 %
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap Persentase Produksi	2,5 % 2,5 %



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PRIORITAS DAERAH		INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
		Perikanan Tangkap (Ton)	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produktifitas Perikanan Budidaya	2 %
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Ketaatan Usaha Perikanandalam Kabupaten/Kota terhadapPeraturan Perundang-undangan	100 %
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produktifitas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2 %
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun	4 %
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitasi Pekarangan di Desa rawan Stunting	4 %
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Legalitas keamanan Pangan segar yang diterbitkan	3 Dokumen
Peningkatan Infrastruktur dan dukungan stakeholder dalam kegiatan penanaman modal daerah,			
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	30 %
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 %
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100 %



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PRIORITAS DAERAH		INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pengendalian Penanaman Modal PMDN dan PMA	28 Kegiatan	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin yang terdata dalam sistem informasi penanaman Modal	165 Dokumen	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan sumber daya air	51 %	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dilayani Air Bersih Perpipaan	56 %	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki penanganan limbah yang memadai	64 %	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Yang dibangun	61 %	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	72 %	
Peningkatan Pengelolaan sumberdaya lokal dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	60 %	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Unggulan	60 %	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata Unggulan	16.178 Orang	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	Persentase pengembangan	29 %	



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	bidang ekonomi kreatif	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	70 %
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Penambahan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	662,81 Hektar
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	65 %
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	75 %
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	65 %
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang Tertangani	77 %
Peningkatan Profesionalisme aparatur pemerintah daerah, tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (good governance) dan E-Government		



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Sangia Wambulu Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Sangia Wambulu	100 % 100 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Gu	100 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Lakudo	100 %
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kemandirian pengendalian internal OPD	20 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penurunan temuan pemeriksaan internal pada objek pemeriksaan Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK BPK	50 % 98.75 %
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	82,75 %
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Akurasi updating data kepegawaian Persentase Akurasi	60 % 97.91 %



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PRIORITAS DAERAH		INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
		updating data kepegawaian	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kemandirian OPD dalam pengelolaan keuangan daerah	88 %
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang tercatat dalam penguasaan pemerintah daerah	99 %
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Pelaksanaan Program RPD kedalam RKPD	100 %
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan Kaidah yang berlaku	100 %
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	100 %
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan peraturan DPRD yang ditetapkan	92 %
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Dengan Kebijakan penataan Desa Persentase Desa Dengan Kebijakan Penataan Desaa	5 % 5 %
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase rata-rata desa dengan status berkembang Persentase rata-rata desa dengan status berkembang	100 % 100 %
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Kinerja Pemerintahan yang terpublikasikan	82,5 %



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PRIORITAS DAERAH		INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang memanfaatkan Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	86 %	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	45 %	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	38 %	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan peraturan DPRD yang ditetapkan	92 %	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Pemenuhan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	
Peningkatan Kualitas hidup masyarakat yang memadai (kemudahan akses pelayanan publik dan jaminan keamanan)			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang diselesaikan	100 %	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	66 %	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Masyarakat yang terpapar paham Radikalisme dan/atau Terorisme	100 %	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam hari besar nasional	6 %	



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemuda (dibawah 30 Tahun) yang terlibat aktif dalam Partai Politik	50 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Terdaftar yang Berpartisipasi dalam pembangunan	75 %
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase rata-rata Penyalagunaan Narkotika per-Kelurahan/Desa	100 %
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase bencana yang ditangani	100 %
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100 %
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang wajib memiliki identitas Kependudukan Persentase penduduk yang memiliki identitas kependudukan	100 % 75 %
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	63 % 100 %
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen data profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)		



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD APK SD APK SMP	100 % 100 % 100 %
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah penduduk usia 10 tahun keatas yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan	4500 ORANG
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang terdampak krisis kesehatan akibat bencana/potensi bencana dan/atau beresiko pada situasi KLB	100 %
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	42 %
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pedagang sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi ketentuan perizinan usaha	100 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 %
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	70.2 % 70,2 %



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 % 100 %
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kualitas keluarga Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga	28 KK 21 KK
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen 1 Dokumen
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak Jumlah Desa/Kelurahan yang Layak Anak	3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus anak korban kekerasan yang ditangani secara komprehensif Persentase kasus Anak Korban Kekerasan yang ditangani Secara komprehensif	100 % 100 %
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 % 100 %
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate Total Fertility Rate (TFR)/ Angka kelahiran total per WUS usia 15-49 tahun	2.21 % 2,21 %
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasespsi Modern (modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	34,54 % 34.45 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga beresiko stunting Persentase keluarga berisiko stunting	48% % 46 %



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PRIORITAS DAERAH		INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100 %	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	60 %	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin dalam DTKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	42 %	
Peningkatan Lapangan kerja, upah kerja dan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kemiskinan			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	13 %	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencarikerja yang terdaftar mendapat pekerjaan	60 %	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK	20 %	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase Pertumbuhan Koperasi	10,04 %	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang dibina	22 %	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Kategori Sehat	61 %	



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberdayakan	23 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang dibina	4 %
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	1.01 %
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terbangun	3 Paket
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100 %
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pengembangan Komoditi Ekspor	37,5 %
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP bertanda tera sah yang berlaku	29,82 %
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jumlah IKM Yang Dibina	4,9 %
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi Industri Nasional	3 Website
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pemenuhan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Cakupan Terpenuhnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase Penduduk yang terlibat aktif dalam	100 % 100 % 2,20 %



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
	kegiatan keagamaan	

Tabel 4.6.

Keselarasan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional

ISU STRATEGIS KABUPATEN BUTON TENGAH	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH	PRIORITAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PRIORITAS NASIONAL
Produktivitas dan Nilai Tambah Produk-Produk Unggulan Pertanian serta Penggunaan Sumber Daya Pertanian	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk-Produk Unggulan Pertanian dan Perikanan serta Penggunaan Sumber Daya Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
Infrastruktur dan dukungan stakeholder dalam kegiatan penanaman modal daerah,	Peningkatan Infrastruktur dan dukungan stakeholder dalam kegiatan penanaman modal daerah,		
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	SDM berkualitas dan berdaya saing
Lapangan kerja, upah kerja dan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kemiskinan	Peningkatan Lapangan kerja, upah kerja dan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kemiskinan		Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

ISU STRATEGIS KABUPATEN BUTON TENGAH	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH	PRIORITAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PRIORITAS NASIONAL
Kualitas hidup masyarakat yang memadai (kemudahan akses pelayanan publik dan jaminan keamanan)	Peningkatan Kualitas hidup masyarakat yang memadai (kemudahan akses pelayanan publik dan jaminan keamanan)	Kesejahteraan Manusia yang Lebih Baik	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
Pengelolaan sumberdaya lokal dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata	Peningkatan Pengelolaan sumberdaya lokal dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
Profesionalisme aparatur pemerintah daerah, tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (good governance) dan E-Government	Peningkatan Profesionalisme aparatur pemerintah daerah, tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (good governance) dan E-Government	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
		Kesejahteraan Manusia yang Lebih Baik	

Tabel 4.7.

Keterkaitan Sasaran Pembangunan Dengan Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional

SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET	PRIORITAS KABUPATEN BUTON TENGAH	PRIORITAS SULAWESI TENGGARA	PRIORITAS NASIONAL
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian	Produksi Peternakan	100%	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk-Produk Unggulan Pertanian dan Perikanan serta Penggunaan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET	PRIORITAS KABUPATEN BUTON TENGAH	PRIORITAS SULAWESI TENGGARA	PRIORITAS NASIONAL
	Produksi Tanaman Pangan	100%	Sumber Daya Pertanian		
1 Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk mendukung lalu lintas orang, barang dan jasa	Panjang Jalan Mantap Kewenangan Kabupaten	90%	Peningkatan Infrastruktur dan dukungan stakeholder dalam kegiatan penanaman modal daerah,		
Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah	Jumlah pelabuhan yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai	100%			
Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	65%			
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	Persentase layanan jaringan irigasi yang dibangun	73,75%			
Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan nilai investasi	9,79%			
Meningkatnya akses, pemerataan serta kualitas pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	13.78			
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	67,99 Umur	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pembangunan Manusia yang Ungul dan Kompetitif	SDM berkualitas dan berdaya saing
Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.0291			



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET	PRIORITAS KABUPATEN BUTON TENGAH	PRIORITAS SULAWESI TENGGARA	PRIORITAS NASIONAL
Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Angka Kemiskinan	15,50%	Peningkatan Lapangan kerja, upah kerja dan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kemiskinan		Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengerahan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	100%			
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat partisipasi angkatan kerja	63,93%			
Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,80%			
Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)	Persentase koperasi dan UKM dalam pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi	0.35			
Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana	Desa tangguh bencana	25%	Peningkatan Kualitas hidup masyarakat yang memadai (kemudahan akses pelayanan publik dan jaminan keamanan)	Kesejahteraan Manusia yang Lebih Baik	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama	Persentase Penanganan Konflik Umat Beragama	100%			



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET	PRIORITAS KABUPATEN BUTON TENGAH	PRIORITAS SULAWESI TENGGARA	PRIORITAS NASIONAL
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	82%			
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif	100%			
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persentase Ketersediaan Gedung Kesenian	0.43			
Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	35.000			
Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	Persentase Kecukupan Pangan Daerah	100%			
Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata Ruang wilayah	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai dengan Tata Ruang Wilayah	75%			
Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52%			
			Peningkatan Pengelolaan sumberdaya lokal dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET	PRIORITAS KABUPATEN BUTON TENGAH	PRIORITAS SULAWESI TENGGARA	PRIORITAS NASIONAL
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	0.45	Peningkatan Profesionalisme aparatur pemerintah daerah, tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (good governance) dan E-Government	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Indeks akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	CC Nilai			
	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP Nilai			
				Kesejahteraan Manusia yang Lebih Baik	

4.2.7. Inovasi Pembangunan

1. Picket (Pendataan Industri Kecil Dan Menengah Terpadu)

Kekayaan Hayati Daerah Kabupaten Buton Tengah sangat melimpah. Seyogyanya masyarakat yang menempati wilayah Kab. Buton Tengah mempunyai kiat dan cara yang tepat agar kekayaan alam yang melimpah ini dapat di olah dan dimanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk kemaslahatan hidup masyarakat luas yang ada di wilayah Kabupaten Buton Tengah. Sebelum pihak lain memanfaatkan kekayaan alam daerah, alangkah baiknya kita bergegas mewartakan, mengayomi dan memberikan arahan yang tepat kepada pelaku usaha mandiri/kelompok agar dalam proses pemanfaatan sumber daya alam hayati daerah dapat di olah sesuai dengan kearifan lokal guna menciptakan lapangan kerja yang semakin luas serta meningkatkan sarana produksi guna menemukan produk unggulan Daerah secara terstruktur melalui legalisasi usaha mandiri / kelompok dan menggiring



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

pelaku usaha ikut serta dalam program Pemerintah yaitu UMKM dan IKM yang tergabung dalam satu wadah yaitu wadah KOPERASI Daerah.

2. PELAKAT (Pemanfaatanlahan Pekarangan Terpadu)

PELAKAT adalah singkatan dari Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terpadu menjadi Akronim dari kata Plakat pada yang sering digunakan pada berbagai event penting yang bisa menjadi kenangan atau sovenir maupun berupa pengumuman. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam hal ini Dinas Pangan Kabupaten Buton Tengah yang diberi tugas dan fungsi diantaranya adalah bagaimana warga bisa memanfaatkan pekarangan rumahnya menjadi lahan produktif dalam menunjang kecukupan gizi konsumsi keluarga maupun menjadi sumber income keluarga.

Kabupaten Buton Tengah adalah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang umumnya lahan berbatu dan gersang bukan alasan untuk tidak bisa bercocok tanaman maupun menghasilkan produk-produk Pertanian, Peternakan maupun Perikanan. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan tersebut maka dibutuhkan strategi dalam meningkatkan performa Kabupaten Buton Tengah secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk-produk Pertanian, Peternakan maupun Perikanan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan Penerapan Konsep Pelakat menjadi Inovasi daerah untuk menjawab tantangan daerah berbatu karena dengan pelakat ini kita mampu merekayasa alam agar dapat menghasilkan produk Pertanian, Peternakan maupun Perikanan di satu lokasi dengan menghemat tenaga kerja. Dalam Inovasi Pelakat terdapat simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan antara produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Konsep Pelakat dengan lahan berbatu cukup di buatkan bak semen persegi ukuran panjang 10 m , lebar 1,5 m tinggi 60 cm sebagai bak pemeliharaan ikan air tawar skala 500 ekor dapat dipanen dalam waktu 4 bulan. Di atas bak dilapisi papan untuk menempatkan polibag ukuran 30 x 35 m sebanyak 200 polibag sebagai media tanam dengan penyiraman menggunakan air bak/kolam ikan, disamping bak ada kandang ayam/itik/puyuh sebagai penghasil telur/daging



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

yang kotorannya dapat digunakan menjadi pupuk organik bagi tanaman. Dengan dikembangkan konsep pelakat oleh warga Buton Tengah diharapkan menjadi income bagi masyarakat dimanan dapat diperoleh dari hasil sekali panen Pertanian (Sayuran atau Hortikultura), Peternakan unggas (Ayam, Itik dan Puyuh) serta ikan air tawar (Nila, Bawal dan Lelel). Hal ini cukup potensial untuk dikembangkan mengingat Buton Tengah memiliki sumber air yang melimpah, sinar matahari yang cukup dan Sumber Daya Manusia yang terkenal ulet dan pekerja keras.





PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

3. SIM-BERKAH (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian – Berkah)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian – BERKAH (SIM-BERKAH) adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada perangkat daerah maupun kecamatan yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan. SIM-BERKAH menangani pengelolaan data kepegawaian khususnya meliputi: pendataan pegawai, BKD, proses perencanaan dan formasi kepegawaian, penggajian, penilaian angka kredit, mutasi pegawai, dan sistem pelaporan.

Aplikasi SIM-BERKAH pada suatu instansi adalah melakukan penginputan, pengawasan dan monitoring dalam hal data kepegawaian. Data mentah diinput biasanya disiapkan form isian yang harus diisi oleh pegawai suatu instansi dengan baik dan benar. Jika dalam pengisian form dilakukan dengan baik dan benar, operator dapat langsung mengisi database masing-masing pegawai kedalam SIM-BERKAH, dan operator dapat fokus mengisi sesuai dengan form yang diterimanya tanpa mengecek berkas fisik.

Setelah database diinput dengan baik, barulah sistem dapat memproses sesuai dengan kebutuhan instansi yang menggunakan sistem tersebut. Dalam pengolahan kepegawaian SIM-BERKAH dapat menghasilkan berbagai report (laporan) seperti Beban Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), riwayat kenaikan pangkat, data pegawai yang akan naik pangkat, data riwayat jabatan, riwayat diklat teknis maupun fungsional, riwayat penghargaan yang telah diterima pegawai, data pegawai yang telah maupun yang akan pensiun, data riwayat keluarga PNS, dan berbagai report lain yang telah dipersiapkan dengan baik oleh pihak programmer.

Dengan tersedianya berbagai report yang dapat dihasilkan SIM-BERKAH, maka oleh pihak yang berkepentingan dapat mempergunakan aplikasi ini untuk memajemen kepegawaian pada instansinya tersebut sesuai dengan peruntukannya. SIM-BERKAH biasanya dipergunakan oleh pimpinan untuk mempermudah memberikan pelayanan kepegawaian, menata sebaran pegawai pada seluruh instansi, serta mempersiapkan kemungkinan lain yang dibutuhkan oleh pihak atasan seperti analisa kebutuhan PNS pada



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

instansinya, maupun penyusunan para pejabat eselon II, III dan IV yang oleh pihak atasan memiliki kinerja baik dan dapat menerima komunikasi dari atasan dalam menentukan arah pembangunan daerahnya.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan dalam pencapaian visi dan misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah. Rencana kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan hasil dari proses perumusan yang dilaksanakan mulai dari Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten yang menerapkan beberapa pendekatan perencanaan secara kompherensif meliputi pendekatan Politik, Pendekatan Teknokratis, Pendekatan Top Down, Pendekatan Bottom-up yang dituangkan dalam kesepakatan – kesepakatan tentang rumusan rencana program dan kegiatan prioritas masing – masing SKPD yang disertai dengan sasaran dan target capaian kinerja dalam rangka menjawab permasalahan dan pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Secara umum rencana program dan kegiatan prioritas daerah memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 – 2026 serta kapasitas riil keuangan daerah yang tersedia. Dalam hal ini adalah program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra SKPD akan ditampung dalam RKPD dengan Kriteria sebagai berikut :

1. Tidak bisa ditunda pelaksanaannya karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah bisa dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya belum Bisa memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 memberikan gambaran yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Anggaran belanja program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut sumber pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Buton Tengah, APBD Propinsi Sulawesi Tenggara, APBN, Dana Desa, Pendanaan dari Masyarakat dan Sumber – Sumber Pendanaan Lainnya. Program dan Kegiatan Pagu indikatif pada setiap



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

program pembangunan akan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan;
2. Menentukan keluaran/ output setiap kegiatan;
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya;
5. Menghitung alokasi anggaran SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab atau tugas pokok dan fungsi dari OPD yang bersangkutan.

Elemen-elemen utama pada program prioritas pembangunan memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang melaksanakan atau bertanggung jawab. Program yang sudah disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD.

Program dan kegiatan merupakan perangkat teknis yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Berpijak pada peraturan yang ditetapkan pemerintah terkait dengan pelaksanaan pembangunan di daerah, maka program dan kegiatan yang direncanakan terdistribusi kesemua SKPD sesuai dengan penyelenggaraan urusan serta tugas pokok dan fungsi SKPD. Rencana Program dan Kegiatan dalam RKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 dilengkapi dengan indikator dan target kinerja, serta pagu anggaran per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut, seerta Pelaksana secara rinci sebagaimana tercantum lampiran dokumen ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 5.1
Proyeksi Prioritas Belanja Berdasarkan OPD
Tahun Anggaran 2024

No.	OPD	Anggaran OPD Saat Ini
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	177,991,660,212
2	DINAS KESEHATAN	113,542,999,927
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	68,922,818,128
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,987,061,218
5	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3,107,506,001
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,571,642,120
7	DINAS SOSIAL	1,861,795,392
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1,500,017,610
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,040,927,915
10	DINAS PANGAN	2,009,190,920
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,532,645,257
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,059,135,331
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,640,963,207
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6,025,039,008
15	DINAS PERHUBUNGAN	2,019,301,308
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2,105,648,804
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,596,514,563
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2,257,409,370
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1,715,740,742
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	1,170,395,253
21	DINAS PERIKANAN	2,403,818,975
22	DINAS PARIWISATA	2,121,989,451
23	DINAS PERTANIAN	3,524,586,499
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1,594,408,606
25	SEKRETARIAT DAERAH	24,201,332,120
26	SEKRETARIAT DPRD	31,065,162,419
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7,696,159,948
28	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	98,558,487,106
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2,328,922,580
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3,271,589,031
31	INSPEKTORAT	5,334,792,429



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

No.	OPD	Anggaran OPD Saat Ini
32	KECAMATAN LAKUDO	3,423,071,135
33	KECAMATAN MAWASANGKA TIMUR	811,916,325
34	KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH	1,360,271,832
35	KECAMATAN MAWASANGKA	3,394,653,685
36	KECAMATAN TALAGA RAYA	1,614,594,209
37	KECAMATAN GU	2,741,415,095
38	KECAMATAN SANGIAWAMBULU	2,026,487,762
39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	43,176,762,094
TOTAL		641,308,833,587



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah yang juga dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Buton Tengah terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Buton Tengah, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicators) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.
Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel 6.1.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPD	TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
Jumlah wilayah terhubung secara memadai (dengan kriteria akses jalan, akses pelabuhan dan akses jaringan telekomunikasi)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	64.55%	65,06 %	65,30 %	65,55 %	65,79 %	65,79 %
Persentase Penanganan Konflik Umat Beragama	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Angka Kemiskinan	%	15.80%	15,50 %	15,30 %	15,10 %	14,90 %	14,90 %
Nilai Tukar Petani	%	100,82 %	100,84 %	100,86 %	100,88 %	100,90 %	100,90 %
Pertumbuhan Ekonomi	%	3,12 %	3,24 %	3,40 %	3,56 %	3,74 %	3,74 %
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	C Nilai	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	%	12.42%	12.42%	13,07 %	13,72 %	14,42 %	14,42 %
Nilai Tukar Nelayan	%	97.62%	98,60 %	98,99 %	99,48 %	100,46 %	100,46 %
Panjang Jalan Mantap Kewenangan Kabupaten	%	87.80 %	87,80%	90%	90,10%	90,30 %	90,30 %



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPD	TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
Jumlah pelabuhan yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai	%	75%	100%	100%	100%	100%	100.00%
Persentase layanan jaringan irigasi yang dibangun	%	73%	73,50%	73,75%	74,00%	74,50%	74,50%
Persentase Rumah Layak Huni	%	58%	60%	65%	70%	75%	75.00%
Desa tangguh bencana	%	10%	20%	25%	30%	35%	35.00%
Angka Harapan lama sekolah	Lama sekolah	13.12	13.14	13.78	13.8	13.81	13.81
Angka Harapan Hidup	Umur	67,69 Umur	67,90 Umur	67,99 Umur	68,09 Umur	68,18 Umur	68,18 Umur
Indeks Pembangunan Gender	%	80.15%	80.99%	81.83%	82.25%	82.67%	82.67%
Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif	%	35%	100%	100%	100%	100%	100.00%
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%
Persentase Penanganan Konflik Umat Beragama	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Ketersediaan Gedung Kesenian	%	29%	29%	43%	57%	71%	71.00%
Angka Kemiskinan	%	15.32%	15,80%	15,50%	15,30%	15%	15%
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPD	TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	64,93%	63,93%	63,93%	63,93%	64,93%	64,93%
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,65%	12,65%	12,80%	12,90%	13,20%	13,20%
Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	%	Orang	34.103	35.000	35.600	36.200	36.200
Persentase koperasi dan UKM dalam pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi	%	30%	30%	35%	40%	45%	45%
Pertumbuhan nilai investasi	%	9,79%	9,79%	9,79%	9,90%	9,97%	9,97%
Produksi Peternakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Produksi Tanaman Pangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Kecukupan Pangan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	35,45%	35%	45%	50%	60%	60%
Indeks akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai
Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai dengan Tata Ruang Wilayah	%	71%	71%	75%	80%	80%	80,00%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	12,42%	13,07%	13,07%	13,72%	14,00%	14,00%
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	1,78%	1,88%	1,98%	2,08%	2,18%	2,18%



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

6.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKK Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 6.2.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Jumlah rumah Tangga yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan adat	1000 Rumah tangga	1150 Rumah tangga	1200 Rumah tangga	1250 Rumah tangga	1300 Rumah tangga	1300 Rumah tangga
Nilai SAKIP OPD	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai
Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Persentase Balita Stunting	86 /100.000 KH 7,3 /1.000 KH 23,1 %	139 /100.000 KH 6 /1.000 KH 20 %	124 /100.000 KH 5 /1.000 KH 18 %	109 /100.000 KH 4 /1.000 KH 16 %	96 /100.000 KH 3 /1.000 KH 14 %	96 /100.000 KH 3 /1.000 KH 14 %
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang terdampak krisis kesehatan akibat bencana/potensi bencana dan/atau beresiko pada situasi KLB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	66 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Madya Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	28,57 % 100 %	28,57 % 100 %	35,71 % 100 %	42,86 % 100 %	50 % 100 %	50 % 100 %
Nilai SAKIP OPD	C kategori	C kategori	CC kategori	B kategori	B kategori	B kategori



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	87.8 %	90 %	90.1 %	90.2 %	90.3 %	90.3 %
Persentase luas sawah yang dialiri dengan baik	75 %	77 %	78 %	79 %	80 %	80 %
Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang layak	68 %	69 %	72 %	75 %	77 %	77 %
Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai dengan Tata Ruang Wilayah	71 %	80 %	81 %	83 %	85 %	85 %
Nilai sakin OPD	cc nilai	cc nilai	B nilai	B nilai	B nilai	B nilai
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Luas Lahan Bersertifikat	100%	60%	70%	80%	90%	100%
Nilai Sakip OPD	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Persentase Cakupan Penertiban Keamanan dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran	66%	66%	66%	66%	66%	66%
Indeks Kepuasan Masyarakat	CC	CC	CC	B	B	B



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Persentase Desa dengan Kebijakan Penanggulangan Bencana	10 %	10 %	15 %	15 %	20 %	20 %
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Tingkat partisipasi angkatan kerja	1.60%	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	3.89%
Tingkat partisipasi angkatan kerja	1.60%	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	3.89%
Nilai SAKIP OPD	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Penurunan Angka Kekerasan pada Perempuan/Anak	65 %	65 %	65 %	70 %	75 %	75 %
Angka Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	60 %	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Nilai Sakip OPD	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Persentase Penanganan Sampah Pada Wilayah yang Ditangani	74 Persen	73 Persen	77 Persen	80 Persen	83 Persen	83 Persen
Persentase Penurunan Timbulan Sampah Persentase Penanggungjawab Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	74 Persen 60 Persen	73 Persen 60 Persen	77 Persen 70 Persen	80 Persen 80 Persen	83 Persen 85 Persen	83 Persen 85 Persen
Nilai Evaluasi Sakip OPD	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai
Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	65 %	65 %	75 %	85 %	95 %	95 %



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Indeks Desa Membangun	Berkembang Status	Maju Status	Maju Status	Maju Status	Mandiri Status	Mandiri Status
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	51.17 %	51.17 %	52.30 %	54.15 %	54.15 %	54.15 %
Nilai SAKIP OPD	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Persentase Pertumbuhan Sarana, Prasarana dan Fasilitas perhubungan untuk pengendalian keselamatan lalu lintas jalan	5 %	6 %	6 %	7 %	7 %	7 %
Nilai SAKIP OPD	CC %	CC %	CC %	B %	B %	B %
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	88.36 %	90 %	92 %	93 %	94 %	94 %
Indeks SPBE Pemerintah Daerah	1,82 Nilai	1,9 Nilai	2,7 Nilai	3 Nilai	3,25 Nilai	3,25 Nilai
Indeks Akuntabilitas	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai
Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	30 %
Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	20 %	20 %	25 %	30 %	35 %	35 %
Nilai SAKIP OPD	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Jumlah Investor	63 Investor	65 Investor	70 Investor	75 Investor	80 Investor	80 Investor



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Penanaman Modal	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Nilai SAKIP	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Persentase Pertumbuhan Organisasi Kepemudaan yang Mandiri	5 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Persentase Prestasi Olahraga di Tingkat Daerah	10 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Nilai SAKIP OPD	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Peningkatan Sektor Pertanian	8%	9%	10%	11%	12%	13%
Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Cakupan industri kreatif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nilai Sakip OPD	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Nilai LPPD	Sedang Nilai	Sedang Nilai	Sedang Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai
Indeks Kerukunan Umat Beragama	73.83 Nilai	73.83 Nilai	73.85 Nilai	73.87 Nilai	73.9 Nilai	73.9 Nilai
Nilai SAKIP Setda	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai
Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	NA %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	C Nilai	C Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Nilai Sakip OPD	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Indeks Profesionalitas ASN	30,77 %	67.15 %	72,51 %	73.15 %	77.23 %	77.23 %
Indeks Profesionalitas ASN	30,77 %	67.15 %	72.51 %	73.15 %	77.23 %	77.23 %
Nilai Sakip OPD	C Kategori	C Kategori	CC Kategori	B Kategori	B Kategori	B Kategori
Level Maturitas SPIP	1 Level	2 Level	2 Level	3 Level	3 Level	3 Level
Level Kapabilitas APIP	2 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %
Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nilai Akuntabilitas Kecamatan Lakudo	CC	CC	CC	B	B	B
Perwsentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	35 %	40 %	50 %	60 %	70 %	70 %
Nilai Akuntabilitas Kecamatan Mawasangka Timur	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	40 %	40 %	50 %	60 %	70 %	70 %
Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	80 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
Indeks akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai
Perwsentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	35 %	40 %	50 %	60 %	70 %	70 %
Nilai Akuntabilitas Kecamatan Mawasangka	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	40 %	40 %	50 %	60 %	70 %	70 %
Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	80 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
Nilai Akuntabilitas Kecamatan Talaga Raya	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	0 %	80 %	80 %	85 %	90 %	90 %
Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nilai akuntabilitas kecamatan GU	CC NILAI	CC NILAI	CC NILAI	B NILAI	B NILAI	B NILAI
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	80 %	80 %	80 %	85 %	90 %	90 %
Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nilai Akuntabilitas Kecamatan Sangia Wambulu	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Persentase Rata-rata Konflik Sosial per-Kelurahan/Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam hari besar nasional	4 %	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %
Indeks akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai



BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tengah tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2024, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2024 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPD, penelaahan terhadap



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan Provinsi Sulawesi Tenggara, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Labungkari, 5 Juli 2023

Pj. BUPATI BUTON TENGAH

ANDI MUHAMMAD YUSUF



RKPD 2024
PEMERINTAH KAB. BUTON TENGAH